

RENSTRA

R E N C A N A S T R A T E G I S

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
2015-2019



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



RENCANA STRATEGIS
Direktorat Pembinaan SMA
2015–2019

EDISI REVISI 2017

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Diterbitkan Oleh:

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah:

Hamid Muhammad, Ph.D *Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah*

Penanggung Jawab:

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si *Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas*

Koordinator dan Editor:

Suhadi, S.Pd, MT, *Kepala Subdit Program dan Evaluasi*

Tim Penyusun

1. Dr. Eko Warisdiono
2. Suharlan, SH, MM
3. Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
4. Muamar Surawidarto, SE, MM
5. Luna Titi Aprilyana, SE
6. Kodni Ef Sandia, SE
7. Uce Veriyanti, SE
8. Tin Suryani, S.Kom
9. Tiambun Pasaribu, SE
10. Nurul Mahfudi, ST
11. Wiwiet Heriyanto, S.Ip
12. Vidy Binsar Ferdianto, S.Pd
13. Muhammad Adji
14. Jim Bar Pen, SH
15. Halifatul Al Khwarizmi
16. Hartoyo Wibowo
17. Ir. Akhmad Supriyatna, M.Pd
18. Ir. Bambang Hartono, M.Kom
19. Efi Sopiah Nur
20. Murjianto
21. Zaenal Arifin

Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA

Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan

Telp: 021-75911532

www.pasma.kemdikbud.go.id



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMA (Renstra Direktorat Pembinaan SMA) tahun 2015-2019 penting dan strategis mengingat Direktorat Pembinaan SMA merupakan pelaksana kebijakan pemerintah di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas. Renstra ini disusun dengan mengantisipasi dinamika pendidikan SMA sebagai fokus pembinaan pada saat ini dan yang akan datang.

Dalam menyusun Renstra, Direktorat Pembinaan SMA secara objektif menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan SMA, serta tantangan pendidikan dasar dan menengah nasional dan global. Direktorat Pembinaan SMA mengarahkan seluruh kebijakan untuk mencapai tujuan tersedia dan terjangkau layanan pendidikan SMA yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten/kota.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada Nawacita, RPJMN 2015–2019, dan kerangka strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015-2019 serta memperhatikan renstra masing-masing direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen).

Renstra Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019 ini akan menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA, serta pihak-pihak terkait. Selain itu, Renstra Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019 juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja), laporan tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembinaan SMA.

Pencapaian kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun pertama Renstra menuntut penyesuaian pada rencana tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu, dokumen Renstra perlu disesuaikan untuk menjaga target yang ingin dicapai di tahun periode, Kami atas nama Direktorat Pembinaan SMA mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran yang sangat berarti, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Direktorat Pembinaan SMA,

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
NIP. 196104041985031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	3
C. Paradigma Pembangunan Pendidikan	4
D. Kondisi Umum	6
E. Potensi dan Permasalahan	15
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KE- BUDAYAAN	37
A. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	38
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemdikbud	45
C. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMA.....	46
D. Tata Nilai.....	49
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	53
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional.....	55
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dit. Pembinaan SMA.....	60
C. Kerangka Regulasi.....	69
D. Kerangka Kelembagaan.....	71

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	79
A. Target Kinerja.....	80
B. Kerangka Pendanaan.....	85
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi.....	95
BAB V. PENUTUP.....	101
LAMPIRAN	105



BAB I

PENDAHULUAN

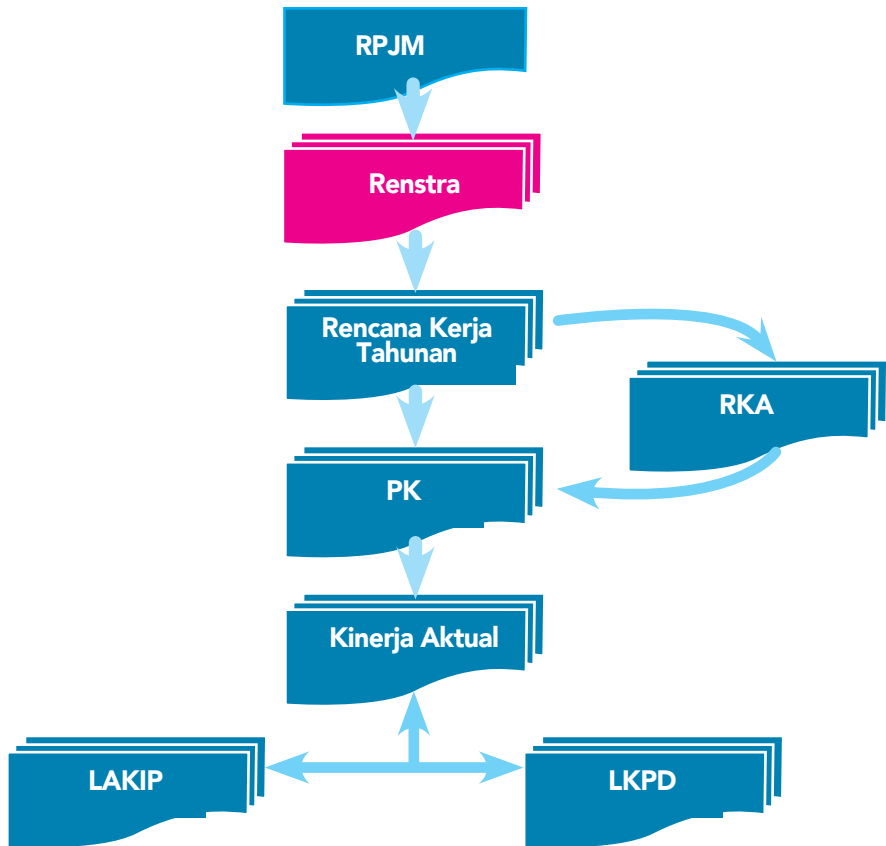
A. LATAR BELAKANG

Pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Di Indonesia, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Ketetapan dalam UUD 1945 tersebut menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses seluas- luasnya bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah mempunyai amanat untuk membangun sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Salah satu peran utama pendidikan di Indonesia adalah untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan salah satunya oleh tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif. Pendidikan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Pendidikan di tingkat menengah mempunyai andil besar dalam peningkatan produktivitas ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan oleh para calon tenaga kerja baik untuk memulai bekerja maupun untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan SMA di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan memandu program kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan SMA untuk periode 2015-2019.

Renstra Direktorat Pembinaan SMA merupakan bagian penting dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang sekaligus menjadi sumber data penting dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembinaan SMA. Gambar 1.1 menunjukkan hubungan keterkaitan antara Renstra dengan instrumen lainnya dalam SAKIP.



Sumber: Dikmen

Gambar 1.1. Bagan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. LANDASAN HUKUM

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

C. PARADIGMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015–2019 disusun berdasar beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan untuk semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi.

Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi

oleh usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.

2. Pendidikan sebagai suatu gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya menjadi optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

3. Pendidikan menghasilkan pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar akan mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik.

4. Pendidikan membentuk karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul yang antara lain bercirikan kejujuran, akhlak mulia, kemandirian, serta kecakapan hidup.

5. Sekolah yang menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya.

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan

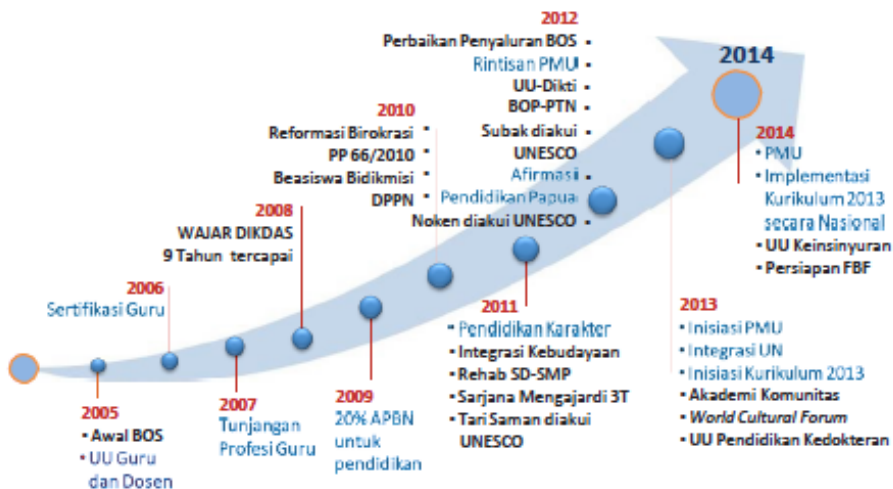
atau proses budaya. Pendidikan juga pada dasarnya adalah proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

D. KONDISI UMUM

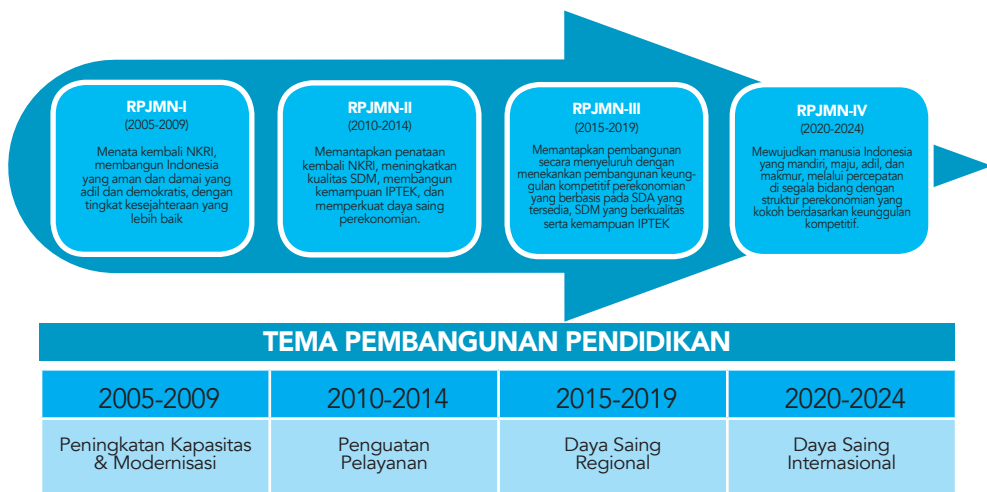
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama periode tahun 2005-2014 telah melakukan sejumlah tonggak terobosan serta inisiasi di dalam pembangunan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Kebijakan dan strategi di atas merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di Indonesia sesuai dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang 2005-2024. Secara skematis, Tema Pembangunan Pendidikan tersaji pada Gambar 1.3.

Pada Tahap I dan Tahap II pembangunan pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelesaikan dua tahapan penting di dalam pembangunan pendidikan. Pada Tahap I (2005-2009) dengan tema "Peningkatan Kapasitas & Modernisasi Penyelenggaraan Pendidikan" yang fokus pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam menyediakan akses pendidikan dan modernisasi penyelenggaraan pendidikan dengan mendorong penggunaan teknologi pembelajaran yang lebih maju. Sementara pada Tahap II (2010-2014) dengan tema "Penguatan Pelayanan pendidikan" yang



Gambar 1.2 Tonggak pencapaian pembangunan pendidikan 2005-2014



Gambar 1.3 Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2024

ditujukan untuk Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan, dan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Dalam menyusun Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019, diperlukan analisis kondisi umum pendidikan menengah (termasuk di dalamnya SMA) di Indonesia saat ini, sebagai berikut.

Pendidikan menengah di Indonesia disediakan bagi seluruh penduduk Indonesia dan diutamakan bagi penduduk berusia 16-18 tahun. Sampai dengan tahun 2013 pendidikan menengah yang dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan pemerintah daerah telah melayani siswa, yang 4.384.026 orang diantaranya adalah siswa SMA seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kondisi Pendidikan Menengah Tahun 2014

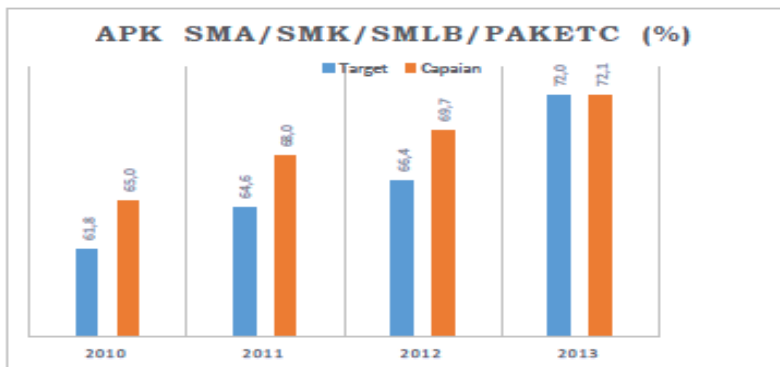
Satuan Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun (Orang)	Jumlah Siswa (Orang)
SMA	13.171.200	4.384.026
SMK		4.303.201
SMLB		9.508
PAKET C		380.335
TOTAL	13.171.200	9.077.070

Sumber: Dikmen, Diolah dari PDSP 2013

Lebih lanjut capaian pembangunan pendidikan menengah tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.

1. Ketersediaan Akses Pendidikan Menengah

Akses pendidikan menengah mencakup ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah bagi penduduk Indonesia. Tersedianya akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan isu yang penting bagi pemerataan kesempatan ekonomi di Indonesia. Ketersediaan pendidikan menengah dapat diukur dengan menggunakan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/Paket C. Gambar 1.4 di bawah menunjukkan pencapaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

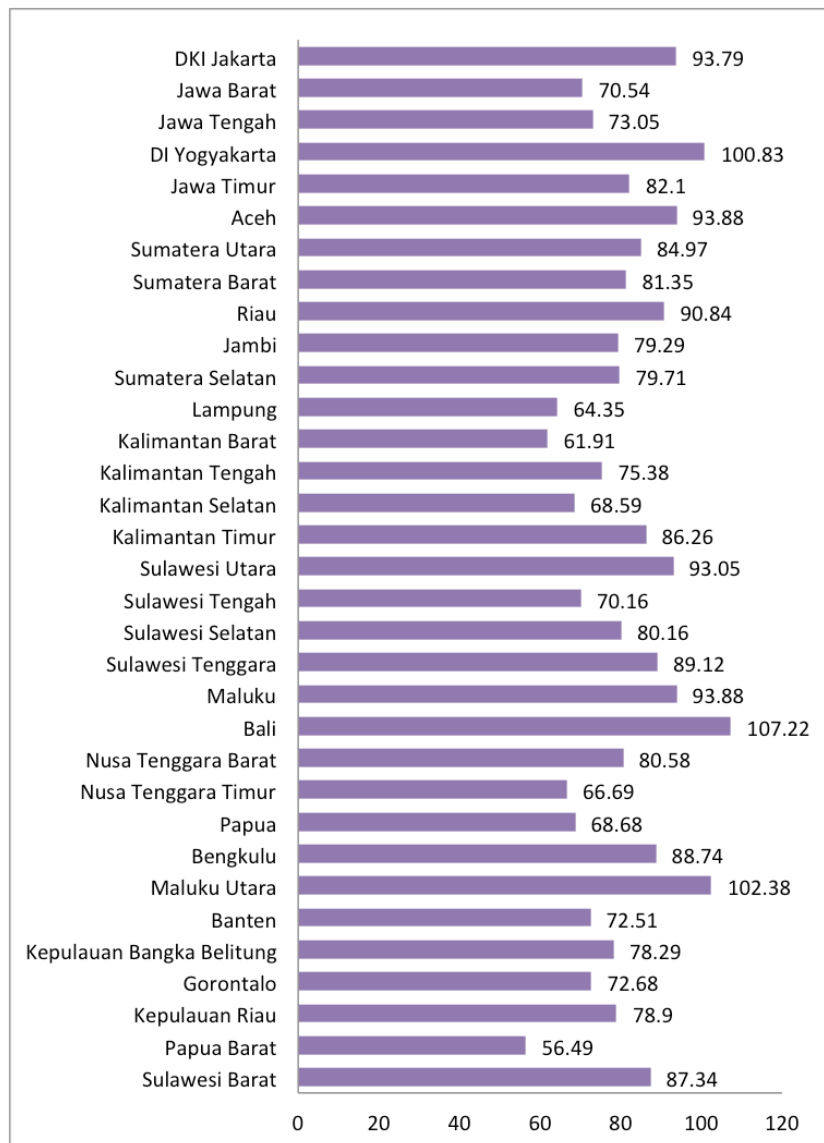


Sumber: Diolah dari LAKIP Dikmen 2010, 2011, 2012, dan 2013

Gambar 1.4 APK SMA/SMK/SMLB/Paket C 2010-2013

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APK Nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Realisasi target APK mencapai 72,1% dari target yang ditetapkan sebesar 72% dengan persentase capaian sebesar 100,14% dari target tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah antara lain penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) telah mampu meningkatkan secara bertahap taraf pendidikan terutama pendidikan menengah masyarakat Indonesia.

Selain ketersediaan pendidikan menengah, keterjangkauan layanan atau pemerataan akses juga merupakan isu yang penting bagi pendidikan menengah, misalnya pemerataan dari aspek geografis (wilayah). Pemerataan akses terhadap pendidikan menengah dapat dilihat dari persebaran APK. Gambar 1.5 menunjukkan persebaran APK Pendidikan Menengah (sekolah menengah di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan



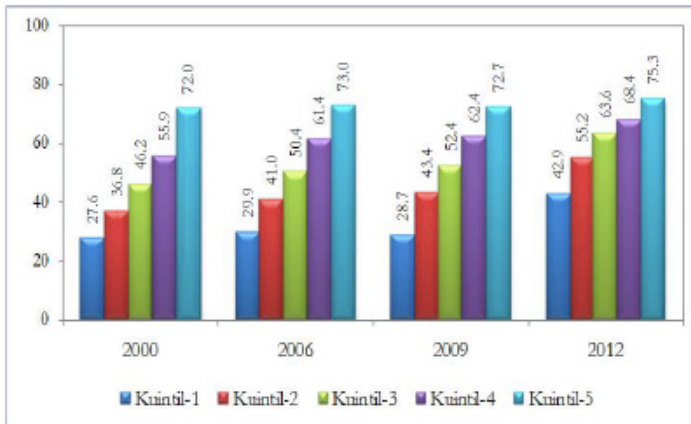
Sumber: Kemendikbud dan Kemenag

Gambar 1.5 Persebaran APK Pendidikan Menengah Tahun 2012/2013

Kebudayaan dan sekolah menengah di bawah koordinasi Kementerian Agama) pada tahun 2012/2013.

2. Keterjangkauan Akses Pendidikan Menengah

Keterjangkauan akses pendidikan ditunjukkan dengan semakin besarnya



Sumber: Bappenas

Gambar 1.6 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga Tahun 2000-2012

kemampuan masyarakat miskin atau rentan miskin untuk mendapat akses pendidikan. Gambar 1.6 menunjukkan pertumbuhan akses pendidikan pada masyarakat tingkat ekonomi miskin atau rentan miskin.

Selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 akses pada masyarakat dengan ekonomi miskin atau rentan miskin menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada Gambar ditunjukkan masyarakat dengan ekonomi paling lemah yaitu pada kuintil 1 menunjukkan peningkatan angka partisipasi dari 28,7% pada tahun 2009 menjadi 42,9% pada tahun 2012. Demikian pula hal dengan masyarakat rentan miskin yang ditunjukkan pada kuintil 2 dengan kenaikan dari 43,4% pada tahun 2009 menjadi 55,2% pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong akses pendidik menengah telah berhasil meningkatkan angka partisipasi masyarakat tingkat ekonomi lemah.

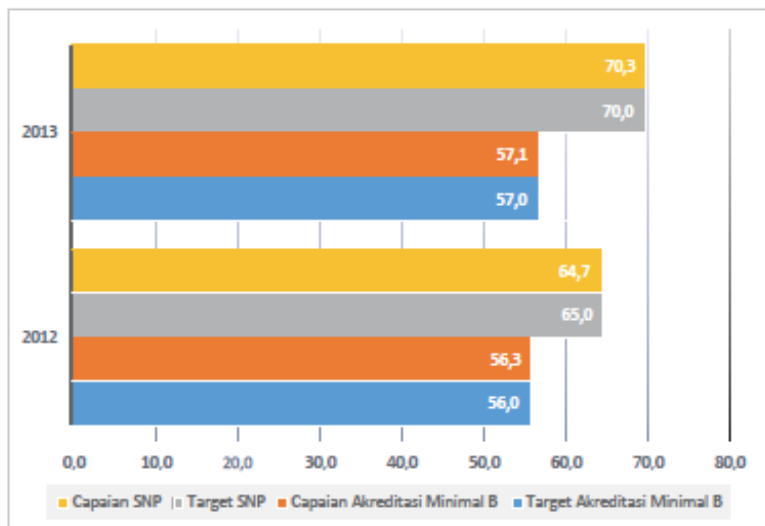
3. Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah

a. Kualitas Sekolah Menengah

Kualitas layanan pendidikan menengah dapat dilihat dari jumlah SMA/SMK/SMLB yang memenuhi akreditasi. Akreditasi digunakan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil akhir penilaian akreditasi satuan atau program pendidikan berupa nilai A, B, C, atau tidak terakreditasi. Dalam hasil penilaian, akreditasi B adalah level akreditasi yang merupakan indikasi bahwa SMA/SMK/SMLB telah memiliki kualitas yang baik. Gambar 1.7 menunjukkan bahwa lebih dari 70% SMA/SMK/SMLB telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan dan lebih dari 50% SMA/SMK/SMLB telah memiliki kualitas yang baik yang ditunjukkan oleh Akreditasi B.

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

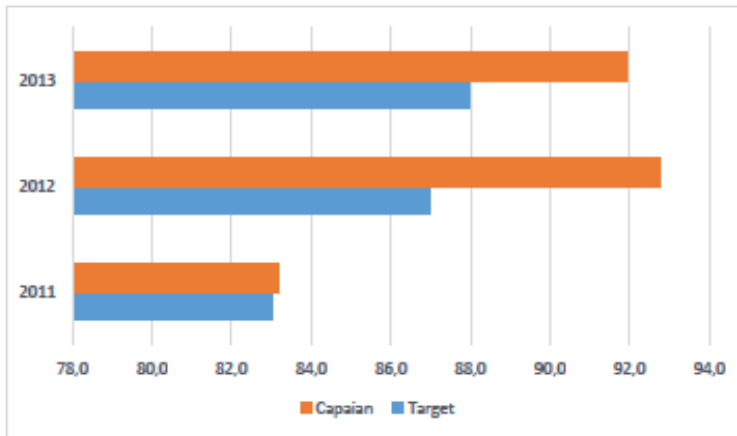
Salah satu unsur utama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan menengah adalah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan



Sumber: Diolah dari LAKIP Dikmen 2013

Gambar 1.7 Persentase SMA/SMK/SMLB memenuhi SNP dan Akreditasi Minimal B

tenaga kependidikan. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualifikasi dan kompetensi pendidik di pendidikan menengah adalah tingkat pendidikan. Untuk memiliki kompetensi yang memadai, maka pendidik di tingkat pendidikan menengah hendaknya memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma setara sarjana (D-4). Gambar 1.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2012, lebih dari 90% pendidik di SMA/SMK/SMLB telah memiliki kualifikasi yang



Sumber: Diolah dari LAKIP Kemdikbud 2012 dan LAKIP Dikmen 2013

Gambar 1.8 Persentase Pendidik SMA/SMK/SMLB Berkualifikasi S-1/D-4

dibutuhkan.

4. Kesetaraan akses Pendidikan Menengah

Peningkatan layanan pendidikan ditujukan pula untuk memberikan akses pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Data BPS menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan mendapat akses pendidikan yang sama. Peningkatan akses pendidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Pembangunan pendidikan menengah selama periode 2010-2014 mendorong peningkatan akses dengan menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada jumlah penduduk laki-laki (55,9% pada tahun 2009 menjadi 63,16% pada tahun 2013) atau perempuan (54,37% pada tahun 2009 menjadi 63,82%

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia 16-18 yang Masih Bersekolah pada Tahun 2009-2013

Jenis Kelamin	Sat	2009	2010	2011	2012	2013
Laki-Laki	%	55.90	56.86	58.11	61.24	63.16
Perempuan	%	54.37	55.12	57.57	61.61	63.82
Rasio penduduk usia 16-18 yang masih bersekolah		1.028	1.032	1.009	1.025	0.990

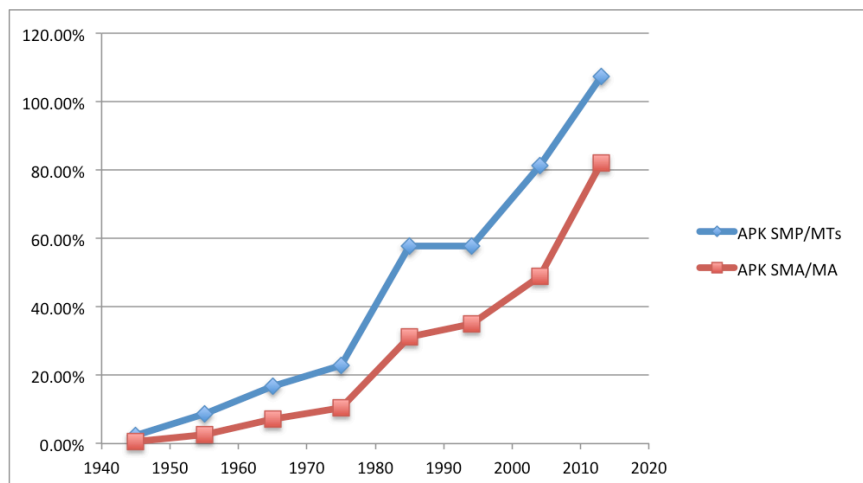
Sumber: BPS 2009-2013, diolah

pada tahun 2013) usia 16-18 tahun yang masih bersekolah, kesetaraan ditunjukkan dengan rasio akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang mencapai 0,99 pada tahun 2013 dari kondisi 2009 yaitu 1,028.

5. Kepastian/keterjaminan memperoleh layanan Pendidikan Menengah

Salah satu tugas besar dari pembangunan pendidikan menengah adalah menjamin tersedianya akses pendidikan bagi lulusan jenjang pendidikan di bawahnya. Berikut pada Gambar 1.9 ditunjukkan perbandingan angka partisipasi SMP dan SM.

Pembangunan pendidikan menengah telah mendorong peningkatan kapasitas pendidikan menengah dalam menampung lulusan SMP/MTs. Kenaikan akses pendidikan menengah dari periode 2004 sebesar 49% menjadi 82% (kenaikan mencapai 33%) pada tahun 2013 menunjukkan

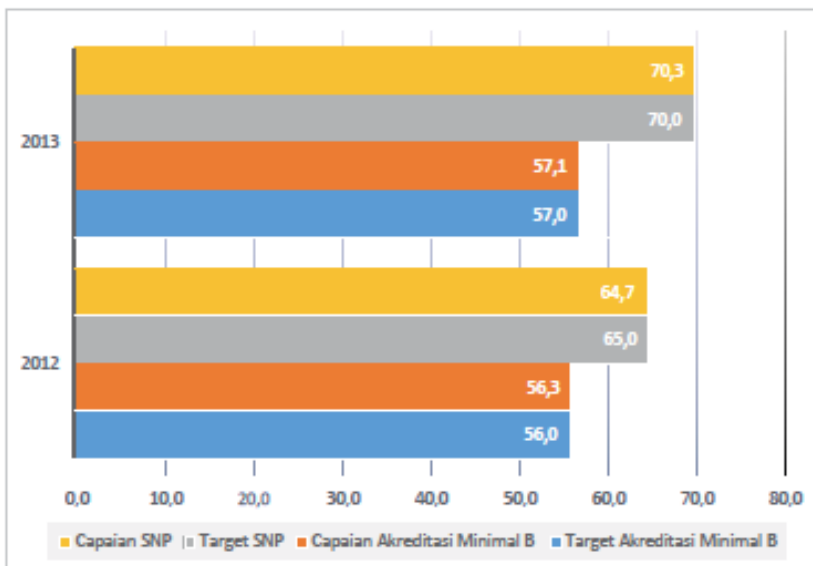


Gambar 1.9. Perbandingan APK SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

keseriusan pemerintah dalam menjamin akses seluas-luasnya bagi lulusan SMP.

6. Tata Kelola Pendidikan Menengah

Tata kelola pendidikan menengah yang baik diperlukan untuk memastikan adanya kesetaraan dan kepastian/ keterjaminan layanan pendidikan menengah. Untuk mendukung adanya tata kelola yang baik, setiap satker mendapat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Program Pendidikan Menengah dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah. Pengukuran adanya ketersediaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pendidikan dapat



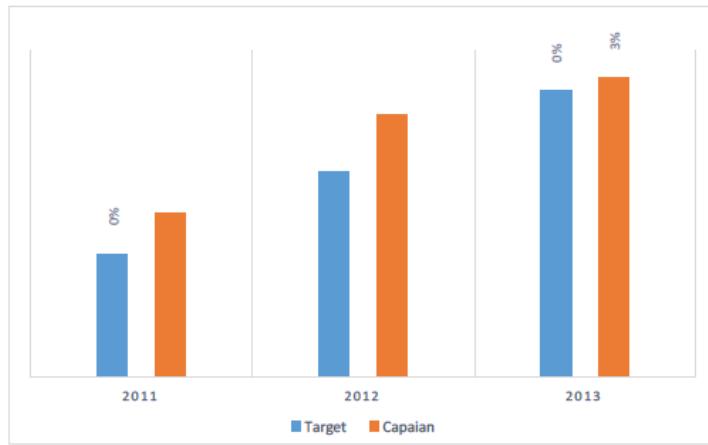
Sumber: Diolah dari LAKIP Kemdikbud 2012 dan LAKIP Dikmen 2013

Gambar 1.10 Persentase Satker Mendapat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Program Pendidikan Menengah

dilihat melalui indikator persentase satker mendapat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Program Pendidikan Menengah. Target dan capaian indikator tersebut dapat dilihat di Gambar 1.10 berikut.

Tata kelola pendidikan menengah tidak terlepas dari unsur pembiayaan pendidikan menengah. Tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menengah di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Anggaran peme-

rintah pusat untuk pendidikan menengah dikelola oleh Ditjen Dikmen. Anggaran ini termuat dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membagi penggunaan DIPA menjadi 4 (empat) pos pengeluaran, yaitu (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal, dan (4) Bantuan Sosial (Bansos). Secara kumulatif pada tahun 2013, pencapaian realisasi anggaran telah mencapai 96,29% atau Rp. 12.175.594.393.000 dari alokasi anggaran DIPA dalam APBN dan APBN-P sebesar Rp.



Sumber: Diolah dari LAKIP Kemdikbud 2011 dan 2012 serta LAKIP Dikmen

Gambar 1.11 Realisasi Anggaran Ditjen Dikmen

12.644.839.500.000,-. Realisasi anggaran ini lebih tinggi daripada realisasi anggaran pada tahun 2012 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.11 berikut.

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis dibutuhkan untuk menggambarkan berbagai isu strategis di luar dunia pendidikan yang patut diperhatikan sebagai acuan dalam pembangunan pendidikan.

a. Trend Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

McKinsey, sebuah konsultan manajemen terkemuka di dunia, memprediksikan bahwa Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030 dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang dan juga dengan mempertimbangkan situasi dan perkembangan ekonomi dunia saat ini. Salah satu syarat utama agar Indonesia dapat merealisasikan potensi tersebut adalah tersedianya tenaga kerja terampil dan produktif. Indonesia harus dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dari sebesar 55 juta tenaga terampil di tahun 2012 menjadi 113 juta tenaga kerja terampil di tahun 2030. Selain peningkatan dari segi jumlah, peningkatan juga diperlukan dari sisi produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

Agar dapat mencapai potensi Indonesia pada tahun 2030, diperlukan perkembangan yang signifikan di bidang industri. Akan tetapi, World Bank menyatakan bahwa tersedianya tenaga kerja dapat menjadi penghambat perkembangan sektor industri. Survei yang dilakukan World Bank menyebutkan bahwa 84% dari pemberi kerja di sektor industri mengalami kesulitan untuk menemukan pekerja yang sesuai untuk posisi manajerial dan 69% dari pemberi kerja tersebut mengalami kesulitan untuk memuhi kebutuhannya akan tenaga kerja terampil.

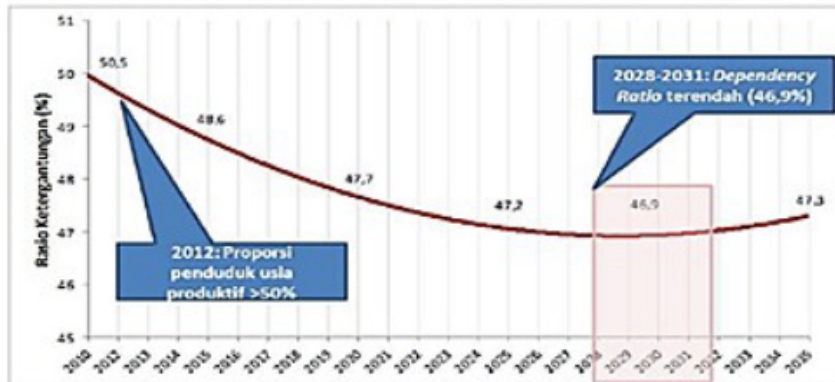
b. Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional

Salah satu tujuan pembangunan ke depan adalah meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain di Dunia. Global Competitiveness Report yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan Global Competitiveness Index (GCI), Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009-2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013-2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan fase transisi dari negara dengan kategori *efficiency driven economy* menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara-negara maju. Sementara capaian Human Development Index (HDI) Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

c. Perkembangan Demografi di Indonesia

Trend pertumbuhan penduduk saat ini membuat Indonesia diperkirakan

PROYEKSI RASIO KETERGANTUNGAN INDONESIA 2010-2035



Sumber data: Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Rasio ketergantungan dihitung dari jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65+ dibagi dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Gambar 1.12 Bonus Demografi

kan akan mendapat ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Pada tahun tahun 2028 - 2031 diperkirakan rasio ketergantungan akan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen (lihat Gambar 1.12).

Dengan pertumbuhan penduduk usia produktif membuat Indonesia mempunyai potensi untuk menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja dapat membuat Indonesia dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

Namun demikian bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya apabila Indonesia dapat dijamin sebagian besar penduduk usia kerja produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja akan berdampak pada pengangguran dan mendorong terjadinya "bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

d. Spektrum Tenaga Kerja di Indonesia

Struktur tenaga kerja Indonesia (usia 15 tahun ke atas) saat ini terdiri atas 65,70% dengan latar belakang pendidikan dasar (SD/SMP), 24,51% lulusan pendidikan menengah, dan 9,79% lulusan pendidikan tinggi. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan khususnya dengan akan diterapkannya ASEAN Economic Community atau Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, sehingga aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sebagai "pasar terbesar dan basis produksi" paling potensial untuk dikembangkan baik faktor sumber daya alam, demografis, kelas menengah yang tumbuh kuat, kebutuhan penguasaan teknologi, menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri sehingga hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

e. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Generasi muda saat ini dihadapkan pada kondisi sosial yang mengkhawatirkan. Permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara (dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki posisi peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antar umat beragama, penggunaan obat-obat terlarang dan pornografi yang meningkat sudah berdampak pada anak-anak kecil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyak kejadian negatif lainnya menjadi serangkaian fenomena dan realita yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

f. Kondisi Jati Diri Bangsa

Sesuai dengan Visi Pemerintah 2015-2019 yaitu "Membangun Indonesia yang Mandiri, Berdaulat, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" seakan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk bersama-sama kembali membangun jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai

menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan Menengah Periode 2015-2019

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang nyata. Namun masih terdapat banyak permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015- 2019.

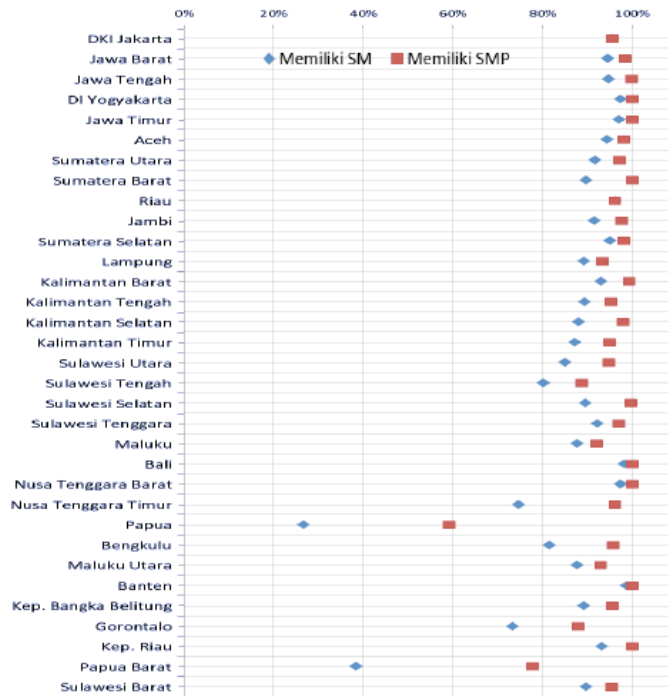
a. Permasalahan Pembangunan Pendidikan Menengah Periode 2015-2019

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

- 1) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas

Periode pembangunan 2015-2019, pemerintah telah men-canakan wajib belajar 12 tahun. Namun demikian sampai dengan tahun 2014 capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 79,2%. Beberapa permasalahan yang mendasari dijabarkan sebagai berikut:

- a) Terbatasnya kemampuan masyarakat dengan latar belakang ekonomi lemah untuk mengakses pendidikan menengah. Kohor rata-rata lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga tahun 2010 menunjukkan hanya kurang dari 50% masyarakat miskin dan 60% masyarakat rentan miskin yang dapat melanjutkan ke pendidikan menengah. Perbedaan kemampuan ekonomi sangat mempengaruhi kemampuan dalam melanjutkan ke pendidikan menengah.
- b) Keterbatasan jumlah SMA/SMK. Sampai saat ini belum



Sumber: Dapodikmen, 2013

Gambar 1.13 Proporsi Kecamatan yang tidak Mempunyai Sekolah Negeri Tahun 2013

seluruh kecamatan di Indonesia memiliki minimal 1 SMA/MA/SMK (lihat Gambar 1.13). Kondisi ini menciptakan munculnya kantong-kantong putus sekolah di berbagai wilayah Indonesia khususnya di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Keterbatasan kapasitas SMA/SMK. Kapasitas SMA/MA/SMK saat ini belum memadai untuk dapat menampung seluruh lulusan SMP. Rasio lulusan SMP terhadap rombel Kelas 1 SM dapat dilihat pada Tabel 1.13.

Berdasarkan analisis rasio jumlah lulusan SMP terhadap ketersediaan rombel di Kelas 1 SM saat ini sebagaimana digambarkan pada tabel, kapasitas yang tersedia di pendidikan menengah hanya mampu menampung rata-rata 76 % dari lulusan SMP/MTs. Kondisi ini semakin mengkonfirmasi belum siapnya satuan pendidikan menengah dalam menampung lulusan SMP/MTs. Di tingkat provinsi, sembilan (9) provinsi berada pada kondisi yang cukup mengkhawatir-

Tabel 1.13 Rasio Jumlah Lulusan SMP Terhadap Ketersediaan Jumlah Rombongan Belajar (Rombel) Kelas 1 SM

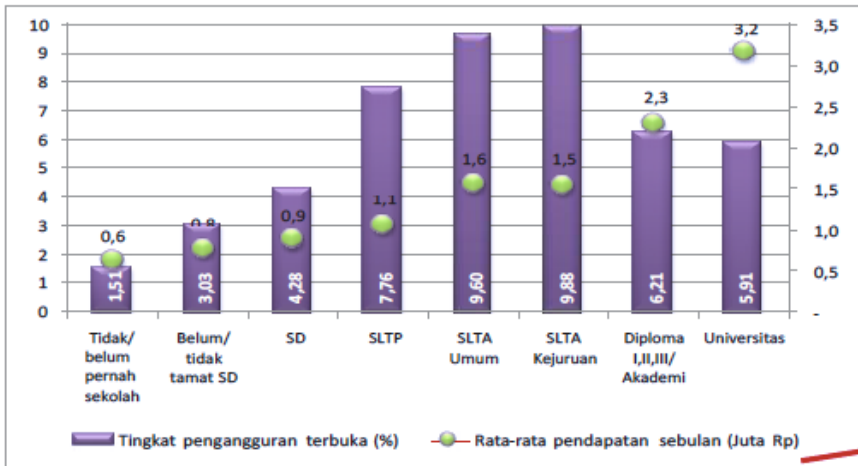
KAB	SMP		SM		Rasio Rombel Lulusan SMP Terhadap Rombel Kelas 1 SM
	Lulusan	Jumlah Rombel	Siswa Kelas 1 saat ini	Jumlah Rombel	
DKI Jakarta	135.991	11.333	159.037	13.253	1,17
Jawa Barat	737.059	61.422	486.960	40.580	0,66
Jawa Tengah	576.920	48.077	396.280	33.023	0,69
DI Yogyakarta	52.180	4.348	50.610	4.218	0,97
Jawa Timur	618.371	51.531	473.512	39.459	0,77
Aceh	97.354	8.113	85.964	7.164	0,88
Sumatera Utara	263.672	21.973	232.159	19.347	0,88
Sumatera Barat	94.534	7.878	76.075	6.340	0,80
Riau	100.600	8.383	81.472	6.789	0,81
Jambi	56.032	4.669	43.123	3.594	0,77
Sumatera Selatan	131.118	10.927	104.835	8.736	0,80
Lampung	142.444	11.870	95.332	7.944	0,67
Kalimantan Barat	78.776	6.565	52.555	4.380	0,67
Kalimantan Tengah	40.495	3.375	28.333	2.361	0,70
Kalimantan Selatan	60.123	5.010	42.788	3.566	0,71
Kalimantan Timur	60.782	5.065	51.357	4.280	0,84
Sulawesi Utara	40.130	3.344	36.737	3.061	0,92
Sulawesi Tengah	50.889	4.241	34.229	2.852	0,67
Sulawesi Selatan	155.441	12.953	121.754	10.146	0,78
Sulawesi Tenggara	47.891	3.991	41.353	3.446	0,86
Maluku	36.065	3.005	29.629	2.469	0,82
Bali	62.763	5.230	55.548	4.629	0,89
Nusa Tenggara Barat	87.942	7.329	71.249	5.937	0,81
Nusa Tenggara Timur	91.159	7.597	63.962	5.330	0,70
Papua	37.848	3.154	29.730	2.478	0,79
Bengkulu	34.164	2.847	27.312	2.276	0,80
Maluku Utara	25.655	2.138	22.942	1.912	0,89
Banten	183.783	15.315	139.668	11.639	0,76
Kepulauan Bangka Belitung	18.817	1.568	16.260	1.355	0,86
Gorontalo	18.954	1.580	14.770	1.231	0,78
Kepulauan Riau	22.955	1.913	20.016	1.668	0,87
Papua Barat	16.352	1.363	13.210	1.101	0,81
Sulawesi Barat	24.443	2.037	17.222	1.435	0,70
NASIONAL	4.201.704	350.142	3.215.983	267.999	0,77

Sumber: Dapodikmen 2013, diolah

kan karena hanya dapat menampung kurang dari 75 % lulusan SMP/MTs.

- 2) Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal

Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA yaitu 9,10% untuk SMA dan 7,21% untuk SMK pada bulan Februari tahun 2014 dan jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.14. Ketidaksielarasan antara dunia kerja dengan kualitas lulusan SMK merupa-



Sumber: Susenas 2013

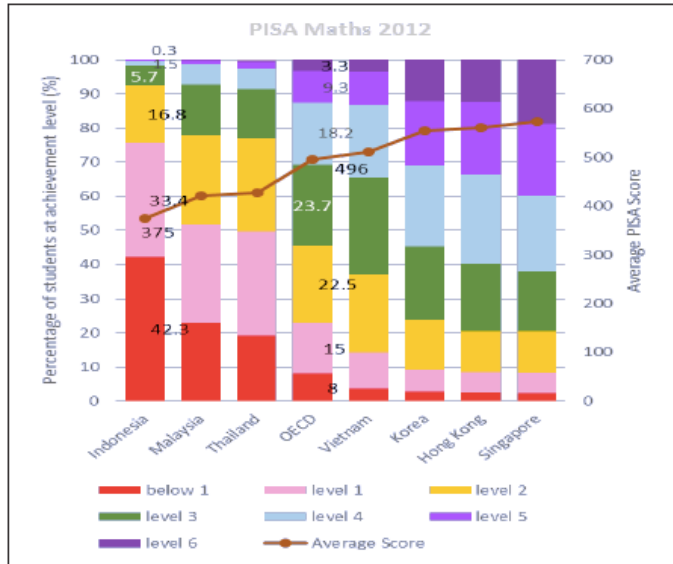
Gambar 1.14 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Agustus 2013

kan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja.

3) Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal

Kualitas pendidikan menengah sangat dipengaruhi oleh kualitas konten dan proses pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas konten dan proses pembelajaran, pada tahun 2013 Kemdikbud memperkenalkan kurikulum baru untuk pendidikan menengah yang disebut Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diperkenalkan untuk merespon berbagai hasil tinjauan atas kurikulum sebelumnya dimana terdapat masukan seperti:

- a) Terlalu banyak mata pelajaran dan memberatkan siswa;
- b) Jam sekolah terlalu singkat dan tidak cukup waktu belajar;
- c) Terlalu menekankan pada menghafal dan kurang dalam pemahaman;
- d) Guru kesulitan dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- e) Kualitas buku pelajaran yang rendah;



Sumber: PISA 2012

Gambar 1.15 Nilai Matematika Siswa Indonesia dan Negara-Negara Tetangga pada PISA 2012

- f) Daya saing global menuntut siswa memiliki ketrampilan tinggi;
- g) Meningkatnya kasus bullying dan perilaku buruk dikalangan remaja

Implementasi Kurikulum 2013 ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah terutama dalam pengukuran kemampuan pendidikan pada tingkat internasional misalnya nilai matematika pada penilaian menurut PISA. Gambar 1.15 menunjukkan bahwa kualitas siswa Indonesia masih relatif lebih rendah dibanding dengan kualitas siswa di negara tetangga yang salah satunya terlihat dari nilai matematika pada PISA 2013.

Terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia, yaitu:

- a) Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan;
 - Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Per-

mendikbud Nomor 23 tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.

Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs terakreditasi minimal B, menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dasar masih rendah. Sedangkan di sisi lain kualitas layanan pendidikan menengah belum merata antara SMA dan SMK. Saat ini sebanyak 73,5% SMA/MA sudah terakreditasi minimal B sementara hanya sebanyak 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah adalah terbatasnya pemahaman kewajiban sekolah untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Disamping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan sehingga tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

b) Lemahnya pelaksanaan kurikulum

Penerapan kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 berdampingan dengan masih diterapkannya kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak sebagai belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.

c) Lemahnya sistem penilaian pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum

direviunya peran, struktur dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif.

4) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

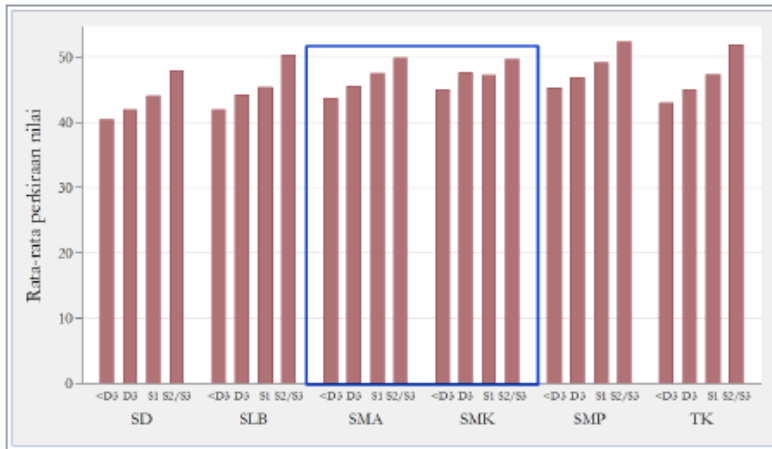
Pendidik adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sesuai mandat Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008, semua pendidik di sekolah menengah harus mempunyai kualifikasi minimal S1/D4 pada tahun 2015. Kualifikasi ini diperlukan agar pendidik mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang mata pelajaran yang diampu. Akan tetapi, sampai pada tahun 2013, masih terdapat 9% pendidik SMA dan SMK yang memiliki kualifikasi di bawah S1/D4. Tabel 1.4 menunjukkan jumlah guru SMA dan SMK yang berkualifikasi S1 dan di bawah S1 pada tahun 2013.

Tabel 1.4 Kualifikasi Guru SMA dan SMK Tahun 2013

Guru	Negeri			Swasta			Total
	<S1	>S1	Jumlah	<S1	>S1	Jumlah	
SMA	8,340	158,253	166,593	12,320	112,207	124,527	291,120
SMK	8,483	107,183	115,666	25,969	164,012	189,981	305,647
TOTAL	16, 823	265, 436	282, 259	38, 289	276, 219	314, 508	596, 767

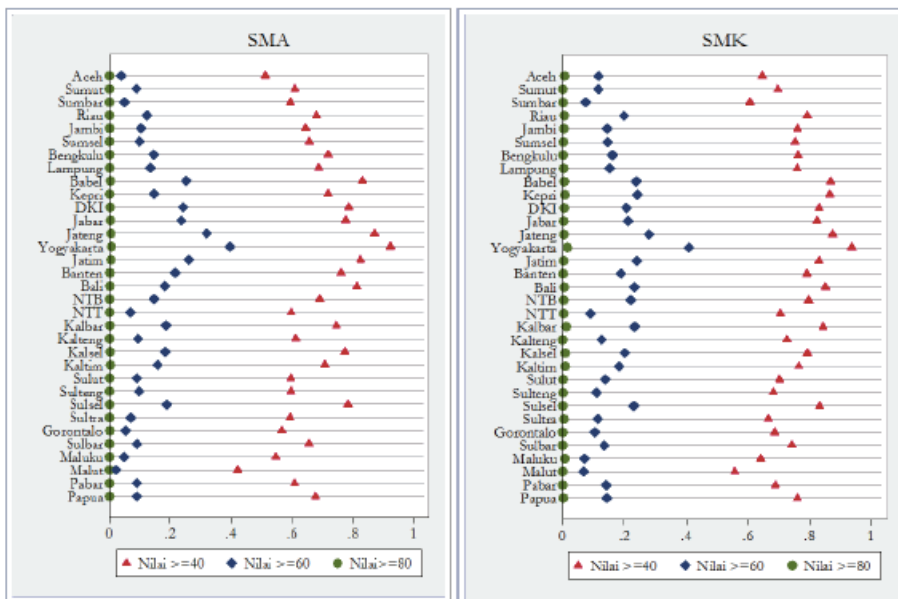
Sumber: Diolah dari Dapodikmen 2013

Akan tetapi, dari segi kompetensi, guru yang berpendidikan S1 dan S2/S3 ternyata mempunyai kompetensi yang tidak terlalu jauh berbeda dengan guru yang berpendidikan D3 dan dibawah D3. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.16 bahwa tidak ada perbedaan signifikan atas rata-rata nilai Ujian Kompetensi Guru dari guru yang berpendidikan S1 dan S2/S3 dan guru yang berpendidikan D3 dan dibawah D3.



Sumber: Bappenas

Gambar 1.16 Rata-rata Nilai Ujian Kompetensi Guru



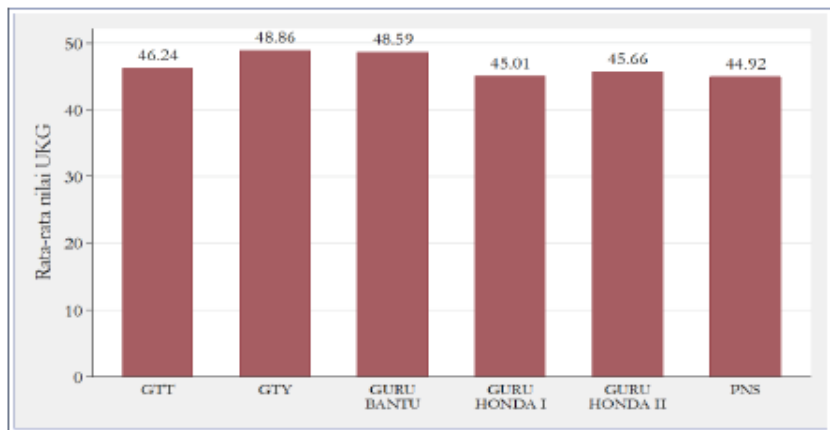
Sumber: Bappenas diolah dari data UKG 2012

Gambar 1.17 Proporsi Nilai UKG Guru Per Provinsi

Sebaran guru juga dinilai masih belum merata dimana guru-guru yang kompeten masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Gambar 1.17 menunjukkan bahwa guru-guru yang memperoleh nilai UKG lebih dari 60 adalah guru-guru di provinsi yang berada di Pulau Jawa. Selain mengindikasikan isu penyebaran guru yang kompe-

ten, hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara kompetensi guru yang dinilai dengan menggunakan UKG dengan ketersediaan fasilitas pendamping, dimana diasumsikan bahwa fasilitas pendamping lebih mudah diakses oleh guru-guru di Pulau Jawa.

Pengangkatan guru PNS juga menjadi salah satu isu utama yaitu guru-guru yang berstatus non-PNS justru memiliki kompetensi yang lebih baik daripada guru-guru yang berstatus PNS.



Sumber: Bappenas

Gambar 1.18 Proporsi Nilai UKG Guru Menurut Status Kepegawaian

Hal ini diindikasikan oleh nilai UKG guru PNS yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai UKG guru yang berstatus non-PNS sebagaimana ditunjukkan di Gambar 1.18. Isu lain terkait kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik adalah pengaruh pendidikan terhadap guru kepada kualitas mutu dan hasil pembelajaran siswa. Dalam rencana strategis Kemdikbud, pendidikan guru termasuk pendidikan guru sekolah menengah merupakan salah satu sasaran strategis. Akan tetapi, terdapat keraguan bahwa peningkatan pendidikan guru berpengaruh secara signifikan kepada peningkatan kualitas pendidikan yang diukur oleh hasil belajar siswa.

- 5) Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa

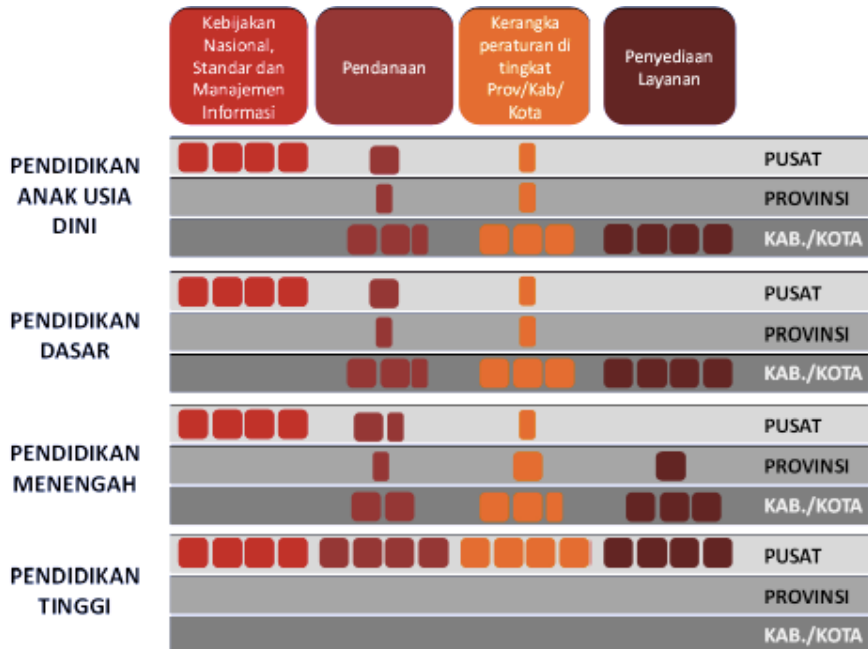
Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Demikian pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dalam pendidikan dan penggunaan bahasa Indonesia dalam aktifitas keseharian serta menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri menunjukkan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral dan gotong royong. Keterbukaan informasi memang membawa banyak kemajuan, namun juga membuka akses yang luas ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan karakter Indonesia.

Pemerintah selama ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter siswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbagai permasalahan masih dihadapi antara lain: (i) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan;

(iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; dan (v) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

6) Tata Kelola Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007. Pembagian kewenangan pendidikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.19. Akan tetapi, Undang-undang dan peraturan tersebut tidak menyebutkan secara tegas (eksplisit) perihal hak dan tanggung jawab yang

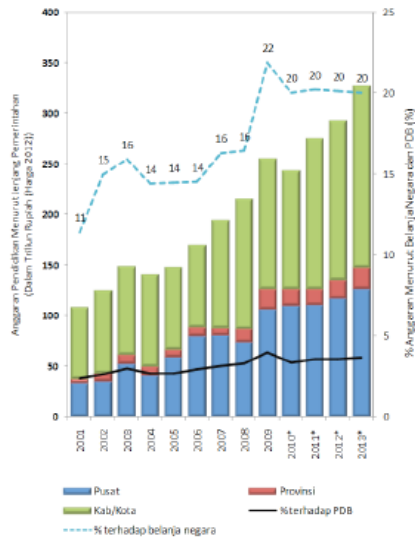


Sumber: Dibuat ulang oleh Bappenas dari "Spending More or Spending Better, World Bank

Gambar 1.19 Pembagian Kewenangan Pendidikan

konkret antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kecuali untuk jenjang pendidikan tinggi. Undang-undang dan peraturan tersebut hanya menyebut pembagian tanggung jawab (*shared responsibilities*) terkait pelayanan pendidikan untuk penduduk usia sekolah. Pemerintah provinsi masih memiliki peran yang sangat terbatas dalam pengembangan sekolah terutama pendidikan dasar dan menengah, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik. Hal ini diperburuk oleh adanya kompleksitas pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ketidakjelasan wewenang dan kompleksitas ini dapat mempengaruhi pembiayaan pendidikan dan realisasi anggaran.

Isu mengenai pembiayaan juga mencakup efisiensi dari penggunaan anggaran. Secara umum, anggaran pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat hampir 3 kali sejak tahun 2001 sebagaimana terlihat dari Gambar 1.20. Akan tetapi, peningkatan anggaran diindikasikan hanya berdampak sedikit dalam peningkatan kual-



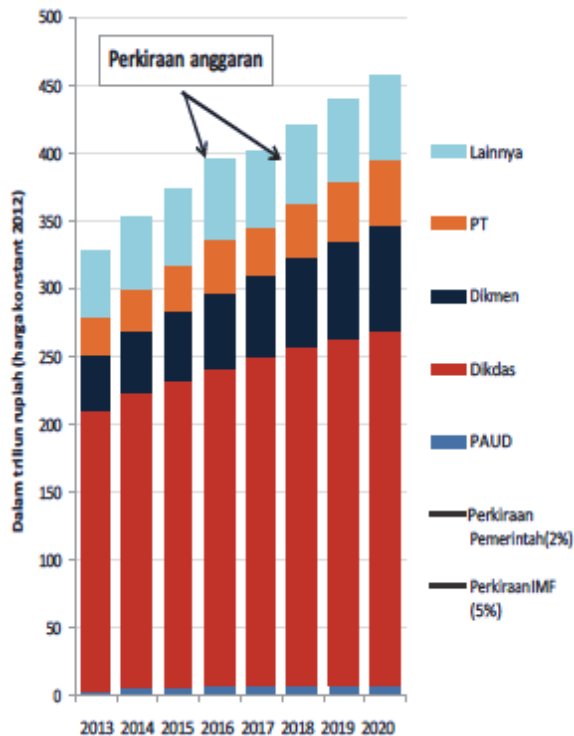
Sumber: Diolah oleh Bappenas

Gambar 1.20 Anggaran Pendidikan di Indonesia

itas pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah adanya inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan yang mencakup hal-hal seperti misalnya pengelolaan dan penyebaran guru yang kurang efektif, program sertifikasi guru yang tidak efektif, dan kelemahan sistem pembiayaan program-program besar seperti BOS. Mengingat kebutuhan anggaran yang semakin meningkat, adanya inefisiensi ini dapat menyebabkan anggaran yang ada tidak mencukupi sesuai yang terlihat di Gambar 1.21.

7) Belum optimalnya tata kelola organisasi Kemendikbud

Akuntabilitas pengelolaan keuangan peningkatan kinerja instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemendikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian. Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja Kementerian/Lembaga dengan kategori B (baik) memberi celah kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kemendikbud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, merupakan wilayah bebas korupsi dan trans-



Sumber: Diolah oleh Bappenas

Gambar 1.21 Perkiraan Anggaran Pendidikan Indonesia

paran kepada publik.

b. Tantangan Pembangunan Pendidikan Menengah Periode 2015-2019

Semua masalah yang diuraikan di atas adalah tantangan untuk diatasi. Berbagai masalah di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan, sebagai langkah-langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

- 1) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas
 - a) Peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, dengan cara: menyediakan akses pendidikan menengah di seluruh kecamatan; menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pemberian Kartu Indonesia

Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus; menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah; meningkatkan peran masyarakat/swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah.

- b) Relevansi pendidikan kejuruan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerjadengan cara: menyelaraskan ketersediaan bidang studi SMK dengan kebutuhan dunia kerja; mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/sesuai dengan KKNl.
- 2) Peningkatan kualitas pembelajaran
- c) Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dengan cara: mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan menengah; meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM; memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah.
 - d) Penguatan Kurikulum dan Pelaksanaannya, dengan cara: mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinyu; mengembangkan kompetensi guru mengenai praktik- praktik yang baik pembelajaran di sekolah; memperkuat kerjasama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.
 - e) Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan, dengan cara: meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah; memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaat hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan; memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel.
- 3) Peningkatan manajemen guru, pendidikan kejuruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
- a) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik, dengan cara: meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; mengawasi proses proses

pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah; meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah.

- b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, dengan cara: meningkatkan kualifikasi guru; memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi guru; menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.
 - c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas dengan cara: meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya LPTK; memperkuat sistem rekrutmen calon guru.
- 4) Penguatan karakter siswa dan jati diri bangsa

Tantangannya adalah bagaimana pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Relevan dengan semua ini adalah apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan

berbagai media komunikasi dan informasi.

- 5) Optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang belum efektif dan efisien.

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meninjau kembali berbagai aturan penggunaan dana transfer APBN untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan; mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan oleh daerah.

- 6) Memperbaiki Tata kelola organisasi Kemendikbud

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik; menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; memperkuat manajemen aparatur sipil negara. □



BAB II.

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

A. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 2.1 berikut memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 2.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemerangat juang tinggi Jujur Mandiri Pantang menyerah Pembangunan dan pembinaan jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasi akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai keberhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 	
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, & trengginas. Aktualisasi insan adiraga. 	

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pem-

belajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawa Cita, memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah:

Visi Kemendikbud 2019:
"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan
yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong"

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya dengan baik apa yang disebut sebagai tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah:

1. Sekolah yang kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan dalam membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif menjadinya sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor

pendukung lain yang penting adalah Kepala Sekolah yang memimpin para pelaku menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Sensitif terhadap kebutuhan siswa sertamampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang terlibat aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya dan terus berlanjut meskipun mereka sudah masuk sekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberi masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif.

4. Masyarakat yang sangat peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya adalah keterbatasan sumber daya Pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan sendiri atau mendukung satuan pendidikan milik Pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan sendiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Masyarakat kini bisa memiliki peran serta dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah.

4. Industri yang berperan penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai Undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting adalah dalam memecahkan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri bisa berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang mereka perlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

5. Organisasi profesi yang berkontribusi besar

Organisasi profesi diharapkan bisa meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberi masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

6. Pemerintah yang berperan optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan maka bentuk dukungan pemerintah diantaranya telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional".

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidi-

kan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten dan kota serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian cukup besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain dengan mengkaitkan alokasi dana Pemerintah dihubungkan dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut:

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, dan keinginan saling tolong menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

2. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, maka ditetapkan 5 (lima) Misi yang merupakan rumusan umum dari upaya-upaya pencapaiannya. Misi tersebut adalah:

Tabel 2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu

pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi;

4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; serta d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk di antaranya budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional serta mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Penerapannya terintegrasi pada pengelolaan pendidikan yang mencakup tujuh jalan revolusi mental, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;

6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Sejalan dengan semangat integrasi antara unit kerja di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Pembinaan SMA. Selanjutnya dijabarkan dalam tujuan strategis sebagai tindak lanjut penetapan tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMDIKBUD

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan Strategis Kemendikbud tahun 2015-2019

Kode	Tujuan Strategis
T1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
T2	Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
T3	Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
T4	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
T5	Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T6	Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, Serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
T7	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Kode	Tujuan Strategis
T8	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

C. VISI DAN MISI DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Menyikapi tujuan dan makna yang terkandung dalam visi dan misi Kemendikbud serta sasaran strategis dalam pembangunan pendidikan SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA bertekad untuk menjadi lembaga kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pendidikan SMA yang berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otorisasi untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mewujudkan layanan prima pendidikan SMA yang terpercaya di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut Direktorat Pembinaan SMA menetapkan visi pendidikan SMA, yaitu:

Visi Direktorat Pembinaan SMA 2019:
 “Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMA yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong untuk Mewujudkan Layanan Prima Pendidikan SMA”

Pencapaian visi di atas diwujudkan dengan menetapkan misi pendidikan SMA dan kesetaraan SMA tahun 2015-2019, yaitu:

M1 : Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang Kuat;

M2 : Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Atas yang Meluas, Merata dan Berkeadilan;

M3 : Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan Berkarakter pada Sekolah Menengah Atas;

M4 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik pada Sekolah Menengah Atas

Sebagai sub sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan SMA diprioritaskan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis:

1. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan

Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T3) dengan sasaran strategis:

Tabel 2.4 Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T3)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3.1	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi mengikuti pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB)	APK SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
SS3.2	Meningkatnya rasio partisipasi perempuan dan laki-laki pada pendidikan SMA	Rasio APK perempuan : laki-laki di SMA/ sebesar 1
SS3.3	Meningkatnya ketersediaan sekolah menengah disetiap kecamatan pada tahun 2019	Seluruh kecamatan (100%) memiliki minimal satu sekolah menengah pada tahun 2019
SS3.4	Meningkatnya penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa miskin pendidikan menengah	KIP diterima oleh sekurang-kurangnya 3.858.211 siswa miskin jenjang SMA, SMK dan SMLB

2. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter (T5) dengan sasaran strategis:

Tabel 2.5 Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter (T5)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5.2	Meningkatnya mutu lulusan pendidikan menengah	Rata-rata Nilai UN SMA minimal 7,0
		Persentase SMA yang memenuhi SPM sebanyak 75%
SS5.3	Meningkatnya karakter/ perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SMA minimal baik
SS5.5	Meningkatnya mutu layanan pendidikan menengah	Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%

3. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik (T8) dengan sasaran strategis:

Tabel 2.6 Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik (T8)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8.3	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan menengah	Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1

Dalam mencapai tujuan strategis di atas Direktorat Pembinaan SMA menetapkan enam sasaran strategis berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan SMA
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan SMA
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan SMA
5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan SMA
6. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendataan dan tata kelola pendidikan SMA.

Berikut dijabarkan target capaian setiap sasaran strategis di atas:

1. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan SMA dengan dicirikan dengan:
 - a. APK SMA/SMK/SMLB (%) sebesar 82.18%
 - b. 100% kecamatan yang memiliki Minimal 1 SMA
 - c. Tersedianya PTK di SM pada 65% daerah khusus
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:
 - a. Angka Putus Sekolah SMA maksimal 0,80%
 - b. Seluruh siswa jenjang pendidikan SMA miskin dan rentan miskin menerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan menengah dicirikan dengan:
 - a. 85% SMA memenuhi akreditasi minimal B

- b. 100% kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) SMA rujukan/ model
 - c. Rata-rata nilai sikap siswa SMA minimal baik (pendidikan karakter)
 - d. Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan menengah
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan SMA dicirikan dengan rasio APK perempuan:laki-laki di SMA sama dengan satu
 5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan SMA dicirikan dengan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA minimal 88%.
 6. Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan akuntabilitas tata kelola pendidikan SMA dicirikan dengan:
 - a. 95% Data pendidikan SMA akurat, berkelanjutan, dan terbaru
 - b. Mendukung nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik)

D. TATA NILAI

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2015-2019 berikut tata nilai Direktorat Pembinaan SMA :

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan. Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawa Cita). Sebelum menguraikan mengenai hal itu, ada baiknya dikemukakan kembali Nawa Cita yang menjadi acuannya, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan SMA, khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SMA, tertuang dalam Nawa Cita nomor 5, 8, dan 2. Khusus agenda pembangunan pendidikan dibahas dalam nawa cita nomor 5, dan 8; sedangkan penguatan efektivitas reformasi birokrasi dan tata kelola terdapat dalam Nawa Cita nomor 2.

Berikut dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan agenda Nawa Cita (sesuai dengan isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SMA.

NAWACITA5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja:
 - a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan SMA melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - b. Peningkatan ketersediaan SMA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap;
 - c. Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
 - d. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.
 - f. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
 - g. Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.
 - h. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru.
 - i. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah ; dan
 - j. Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indone-

sia dan bahasa asing;

2. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui:
 - a. Pemantapan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
 - b. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
3. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:
 - a. Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
 - b. Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - c. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - e. Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - i. Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan

- j. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
4. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:
 - a. Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - b. Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - c. Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - d. Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - e. Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
 - f. Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; serta Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.

NAWACITA 8. Melakukan revolusi karakter bangsa

1. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman social budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui:
 - a. Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/ antropologi), bahasa Indonesia;
 - b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran,

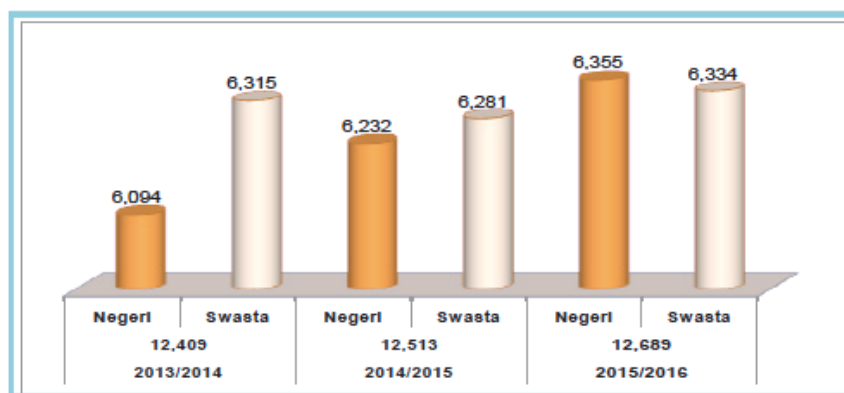
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur melalui:
 - a. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
 - b. pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;
 - c. penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
3. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (*excessive consumption*) tidak baik;
 - b. Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi dengan sebutan populer *Do It Yourself* (DIY).
4. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui:
 - a. Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
 - b. Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap kejadian (*randomness nature of event*) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (*calculated risk*) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi.
 - c. Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.

NAWA CITA 2: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

1. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
 - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
 - b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
2. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis;
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (i) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (ii) mendorong inovasi pelayanan publik; (iii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (iv) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
3. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Kemendikbud
 - a. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik;
 - b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Secara kuantitas, jumlah SMA semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan SMA yang telah diolah, jumlah SMA pada Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah sebanyak 12.689 SMA di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 176 SMA dibandingkan dari Tahun Pelajaran 2014/2015 sebanyak 12.513 SMA. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai perkembangan jumlah lembaga SMA selama 3 tahun terakhir.



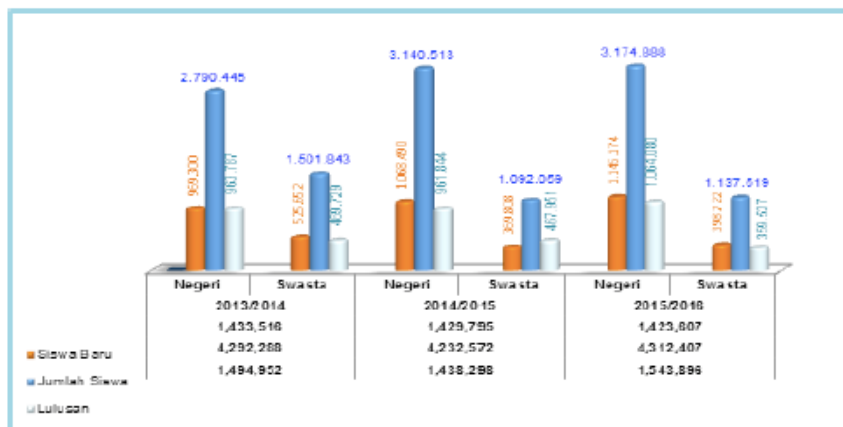
Sumber: PDSPK, Statistik Sekolah Menengah Atas 2014/2015 yang telah diolah

Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah SMA Tahun 2013-2016

Penambahan jumlah SMA tidak seluruhnya didorong oleh intervensi Pemerintah Pusat (dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA), Pemerintah Daerah dan masyarakat juga memberikan kontribusi dalam pembangunan SMA baru. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan jumlah SMA pada tahun 2014/2015 dan 2015/2016 sebanyak 176 SMA. Jumlah peningkatan lembaga SMA tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan Unit Sekolah Baru yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMA pada periode tersebut, yakni sebanyak 101 SMA. Jumlah tersebut merupakan hasil penambahan bantuan USB yang disalurkan Tahun Anggaran 2014 sebesar 31 Unit dan tahun Anggaran 2015 sebanyak 70 Unit. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat juga membarikan kontribusi dalam pembangunan akses layanan SMA.

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah siswa SMA dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun Pelajaran 2015/2016, total jumlah siswa SMA adalah sebesar

4.312.407 siswa. Terjadi peningkatan sebanyak 20.199 siswa SMA dibandingkan dengan total jumlah siswa SMA Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 4.292.288 siswa. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai perkembangan jumlah siswa SMA dalam 3 tahun terakhir.



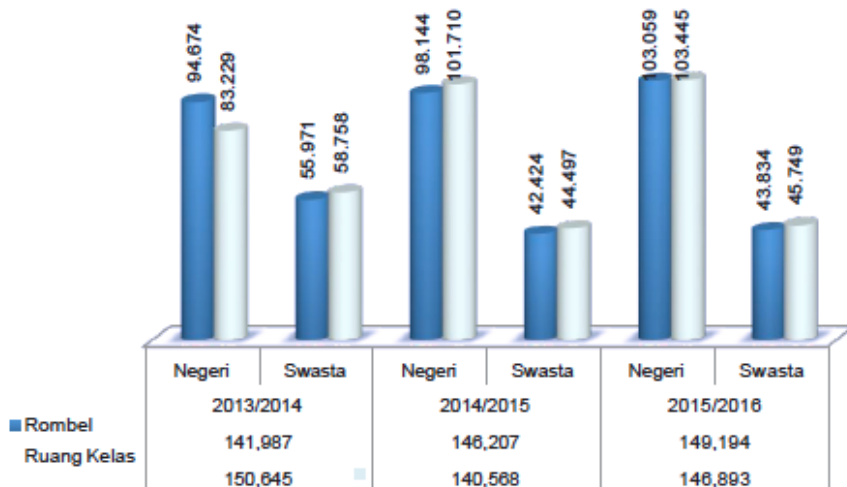
Sumber: PDSPK, Statistik Sekolah Menengah Atas 2014/2015 yang telah diolah

Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Siswa SMA Tahun 2013-2016

Gambar diatas menunjukkan terjadi fluktuasi dalam perkembangan siswa pada pendidikan SMA. Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 terjadi penurunan jumlah siswa SMA sebesar 59.716 siswa dari tahun sebelumnya. Kemudian, jumlah tersebut kembali meningkat sebanyak 79.835 siswa pada

Tahun Pelajaran 2015/2016. Penurunan jumlah siswa SMA tersebut terjadi pada sekolah swasta, yakni sebanyak 409.784 siswa.

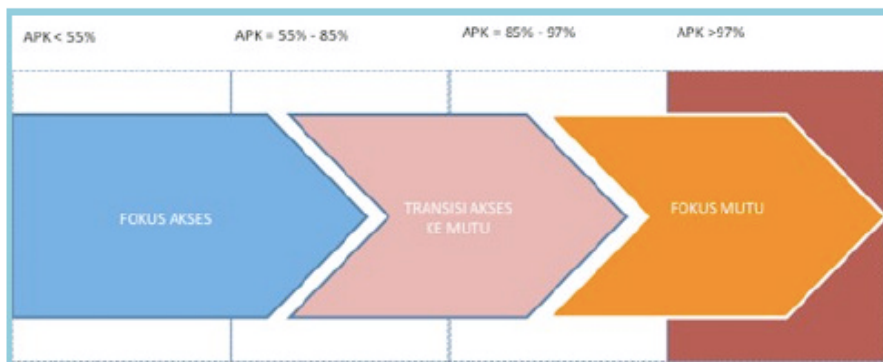
Fluktuasi yang terjadi selama 3 tahun terakhir pada perkembangan jumlah siswa juga terjadi pada ketersediaan Ruang Kelas. Terjadi penurunan jumlah Ruang Kelas pada Tahun Pelajaran 2014/2015 sebanyak 10.077 ruang. Kemudian jumlah kepemilikan Ruang Kelas kembali meningkat sebanyak 6.325 ruang pada Tahun Pelajaran 2015/2016. Selain terjadi penurunan, kepemilikan Ruang Kelas yang ada belum dapat menampung siswa yang ada. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan SMA pada Tahun Pelajaran 2015/2016, tercatat jumlah Ruang Kelas yang tersedia sebanyak 146.893 ruang sedangkan jumlah Rombongan Belajar yang ada sebanyak 146.893. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai kepemilikan Ruang Kelas dan Rombongan Belajar yang ada.



Sumber: PDSPK, Statistik Sekolah Menengah Atas 2014/2015 yang telah diolah

Gambar 3.3. Perkembangan Ruang Kelas dan Rombongan Belajar 2013-2016

Peningkatan akses layanan pendidikan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Kondisi pendidikan di setiap daerah juga cukup beragam sehingga diperlukan intervensi yang berbeda antar daerah. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai fokus program Direktorat Pembinaan SMA 2015-



Gambar 3.4. Fokus Program Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019

2019.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan pencapaian sasaran strategis Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:
 - a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5):
 - 1) Peningkatan ketersediaan SMA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap.
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:
 - a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5):
 - 1) Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - 2) Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:
 - a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5), melalui:
 - 1) Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan SMA yang berkualitas
 - 2) Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.
 - 3) Penguatan kompetensi keahlian di SMA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;

- b. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan (Nawacita 5) melalui:
- 4) Penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
 - 5) Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
- c. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya (Nawacita 5) melalui:
- 1) Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
 - 2) Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - 3) Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - 4) Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - 5) Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - 6) Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - 7) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - 8) Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - 9) Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - 10) Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kese-

hatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.

- d. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel (Nawacita.5) melalui:
 - 1) Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - 2) Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - 3) Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - 4) Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - 5) Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
 - 6) Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; serta Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.

- e. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah (Nawacita 8) untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui:
 - 1) Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), Bahasa Indonesia;
 - 2) Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran,
 - 3) Peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, men-

- guatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda; ;
- 4) pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhaniaan dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;
 - 5) penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
- f. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi (Nawacita 8), melalui:
- 1) Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (*excessive consumption*) tidak baik;
 - 2) Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi dengan sebutan populer Do It Yourself (DIY).
- g. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi (Nawacita 8) melalui:
- 1) Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
 - 2) Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap kejadian (*randomness nature of event*) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (*calculated risk*) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi.
 - 3) Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:
- Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja

(Nawacita 5), melalui: Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler.

5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan SMA dicirikan dengan:

Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat keter-

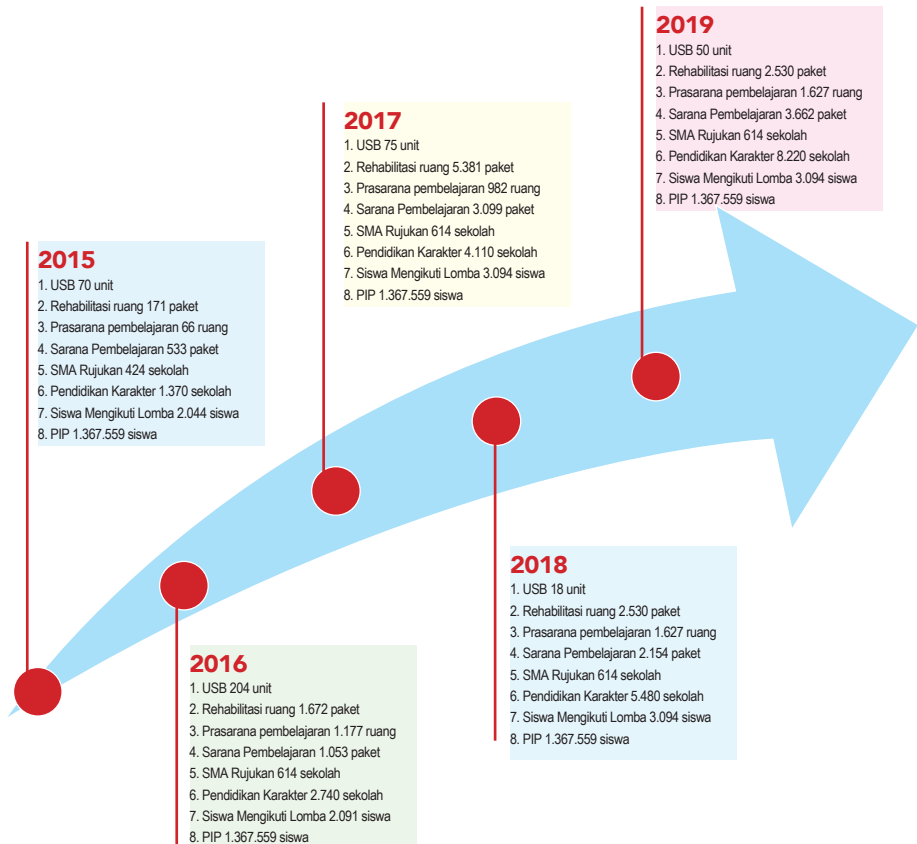
No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Penyempurnaan/revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar 12 tahun)
2	RPP tentang pengelolaan guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
3	Perumusan peraturan perundangan tentang public- private partnership dlm pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme public-private partnership dalam pembangunan pendidikan
4	Peraturan perundangan tentang pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan, lembaga maupun program studi
5	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan dikbud
6	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme block grant	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan block grant secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil resiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan
7	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarannya yang dibebankan secara proposional kepd pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dlm peningkatan profesionalisme & kinerja guru
8	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota
9	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. Kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap Mapel berbeda. b. Tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit
10	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan

sediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita 5), melalui:

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.
 - b. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang.
6. Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan akuntabilitas tata kelola pendidikan SMA dicirikan dengan:
- a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5), melalui:
 - 1) Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru.
 - 2) Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah ;
 - b. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan (Nawacita 5), melalui: Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
 - c. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, (Nawacita 5), melalui:
 - 1) Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
 - 2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
 - d. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Nawacita 2), melalui Penerapan *e-government* untuk mendukung

bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi.

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyusun program prioritas dan target yang akan dicapai sepanjang Tahun 2015-2019 sebagai berikut:



Gambar 3.5. Program dan Target Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi dibutuhkan kementerian untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Perincian jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Pembinaan SMA antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Penyempurnaan/revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar 12 tahun)
2	RPP tentang pengelolaan guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
3	Perumusan peraturan perundangan tentang public- private partnership dlm pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme public-private partnership dalam pembangunan pendidikan
4	Peraturan perundangan tentang pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan, lembaga maupun program studi
5	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan dikbud
6	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme block grant	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan block grant secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil resiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan
7	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarannya yang dibebankan secara proposional kepd pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dlm peningkatan profesionalisme & kinerja guru
8	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota
9	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. Kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap Mapel berbeda. b. Tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
10	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan

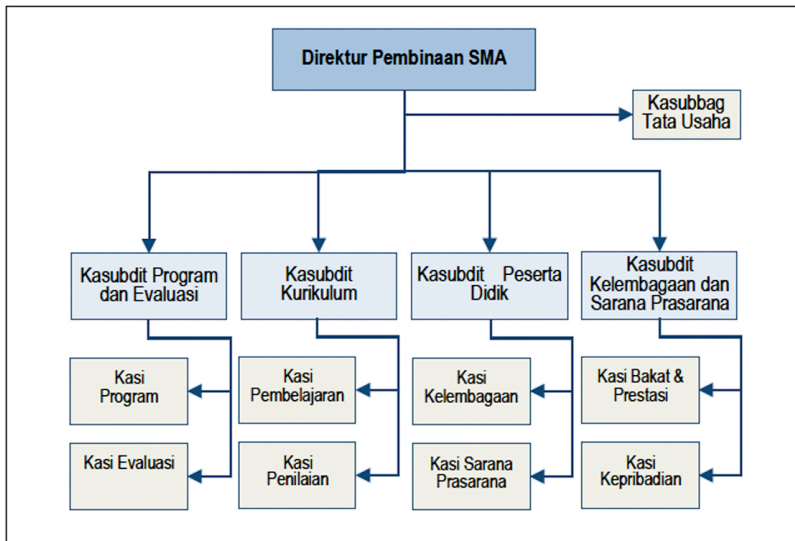
D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain: 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Direktorat Pembinaan SMA merupakan salah satu unit pelaksana teknis dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (Ditjen Dikdasmen). Ditjen Dikdasmen dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan Perpres 14 tahun 2015 Pasal 44, serta Permendikbud No.11 tahun 2015. Berdasarkan Permendikbud No.11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Ditjen Dikdasmen terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK).

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA.



Gambar 3.6 Bagan Organisasi Direktorat Pembinaan SMA

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 408 Bagian Keenam, tugas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 408 tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah atas;
5. Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lem-

baga asing;

6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah atas;
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam rangka mencapai target program prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Pembinaan SMA.

1. Sub Direktorat Program dan Evaluasi

Sub Direktorat program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran, kerja sama dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta laporan Direktorat. Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- c. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. Penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas;
- e. Koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan ang-

garan Direktorat serta fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas; dan

- g. Penyusunan laporan Direktorat.

Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas.
- b. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas, penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas, dan penyusunan laporan Direktorat.

2. Sub Direktorat Kurikulum

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, di bidang kurikulum sekolah menengah atas. Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah menengah atas;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas;
- c. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas.

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas:

- a. Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar,

- prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran sekolah menengah atas.
- b. Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang penilaian sekolah menengah atas.

3. Sub Direktorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas. Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah menengah atas;
- c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan

- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas.

Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola sekolah menengah atas.
- b. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana menengah atas.

4. Sub Direktorat Peserta Didik

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik sekolah menengah atas Subdirektorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik sekolah menengah atas;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah atas;
- c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah atas;

- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah atas.

Subdirektorat Peserta Didik terdiri atas 2 seksi, yakni:

- a. Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik sekolah menengah atas.
- b. Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepribadian peserta didik sekolah menengah atas.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

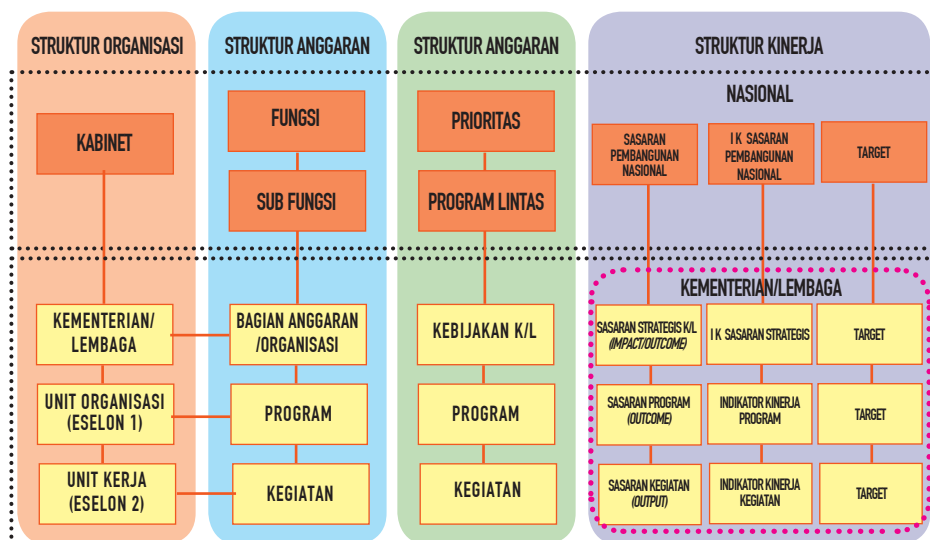
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (accountable). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2015- 2019. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan SMA didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Eselon I diharapkan menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program dan dilengkapi dengan IKP dari masing-masing sasaran program, sedangkan Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan dengan masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk masing-masing sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada gambar 4.1.

Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun



Gambar 4.1 Arsitektur struktur program dan kegiatan

mendatang. Secara teknis, sesuai pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Eselon I dan Eselon II dari Kemendikbud. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan unit Eselon II yang dikelola Direktorat Pembinaan SMA sebagaimana dibahas dalam Bab III sub bab Kerangka Kelembagaan.

Target kinerja dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Penjelasan dari setiap target kinerja Direktorat Pembinaan SMA sebagai berikut:

1. Target Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Pembinaan SMA

Target capaian Program Direktorat Pembinaan SMA terdiri atas 11 Indikator Kinerja Program (IKP). Secara rinci target IKP masing-masing disajikan pada Tabel 4.1.

2. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

**Tabel 4.1 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Direktorat Pembinaan SMA**

Sasaran Program dan IKP		TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan						
IKP 1	APK SMA/SMK/SMLB (%)	75.82	76.68	79.08	80.51	82.18
IKP 2	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah	76.6	82.5	88.3	94.2	100.0
Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan						
IKP 3	Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	1.367.560	1.367.560	1.692.559	1.692.559	1.692.559
IKP 4	Angka siswa putus sekolah SMA (%)	1.2%	1.1%	1.0%	0.9%	0.8%
Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan						
IKP 5	SMA memenuhi akreditasi minimal B	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0
IKP 6	Persentase Kabupaten/Kota memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	29.4	49.9	70.5	90.0	100.0
IKP 7	Rata-rata nilai sikap siswa SMA/SMLB minimal baik (pendidikan karakter)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
IKP 8	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan menengah	70	74	76	80	84
Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan						
IKP 9	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan						
IKP 10	Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA dan SMK (%)	81.5	82.0	84.0	86.0	88.0
Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan akuntabilitas tata kelola pendidikan						
IKP 11	Data pendidikan SMA akurat, berkelanjutan, dan terbaru	85.0	87.0	89.0	92.0	95.0

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta kelompok penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah menengah.

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKK dalam kelompok dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri atas tiga IKK yang secara rinci disajikan pada Ta-

Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN/INDIKATOR		TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di SMA						
IKK 1.1	Jumlah layanan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan SMA	1	1	1	1	1
IKK 1.2	Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan bidang Pendidikan SMA serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan SMA	35	35	35	35	35
IKK 1.3	Jumlah kerja sama dan kemitraan instansi/instansi dalam dan luar negeri	8	8	8	8	8

bel 4.2.

b. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Sekolah Menengah

IKK dalam kelompok penyediaan dan peningkatan layanan pendidi-

Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penyediaan & Peningkatan Layanan Pendidikan SMA

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Sasaran	Baseline 2014	"Target 2015 -2019"				
				2015	2016	2017	2018	2019
SK 3.1	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota							
IKK 3.1	Jumlah siswa SMA penerima BOS SM	Siswa	4,426,882	4,359,141	4,473,857	4,640,653	4,826,279	5,019,330
IKK 3.2	Jumlah RKB SMA yang dibangun	Ruang	1,853	2,153	4,817	1,000	1,624	4,032

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Sasaran	Baseline 2014	"Target 2015 -2019"				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.3	Jumlah unit SMA baru yang dibangun	Sekolah	30	70	204	75	18	50
IKK 3.4	Pembangunan prasarana pembelajaran SMA	ruang	33	66	1,177	982	1,627	1,627
IKK 3.5	Rehabilitasi ruang pembelajaran SMA	Paket	151	171	1,672	5,381	2,530	2,530
IKK 3.6	Pengadaan sarana pembelajaran SMA	Paket	169	553	1,053	3,099	2,154	3,662
IKK 3.7	Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Sekolah	12,311	2,156	13,419	13,517	13,615	13,700
IKK 3.8	Jumlah bahan ajar SMA yang disusun	Modul	16	16	17	18	19	21
IKK 3.9	"Jumlah SMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	4,320	2,251	4,852	8,012	13,615	13,700
IKK 3.10	Jumlah SMA rujukan	Sekolah	91	424	614	614	614	614
IKK 3.11	Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan	Sekolah		-	204	204	204	204
IKK 3.12	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/ olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	Siswa	3,094	2,044	2,091	3,094	3,094	3,094
IKK 3.13	Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa	Siswa	2,942	2,350	2,091	2,249	2,249	2,249
IKK 3.14	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan pendidikan karakter	Sekolah	12,311	1,370	2,740	4,110	5,480	8,220
SK 3.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin							
IKK 3.15	Jumlah siswa SMA penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Siswa	425,033	1,367,559	1,367,559	1,367,559	1,367,559	1,367,559
SK 3.3	Menguatnya Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di SMA							
IKK3.16	Jumlah Satker yang Mendapat Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis SMA	Layanan	35	35	35	35	35	35

Tabel 4.4 Pembagian Wewenang Pengelolaan Pendidikan

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABU- PATEN/ KOTA
1	MANAJEMEN PENDIDIKAN	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan Pendidikan Tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan Pendidikan Khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
2	KURIKULUM	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	AKREDITASI	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---
4	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Daerah Kab/Kota
5	PERIZINAN PENDIDIKAN	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat b. Penerbitan izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat	a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat b. Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat

kan sekolah menengah terdiri atas 18 IKK yang secara rinci disajikan pada Tabel 4.3.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan Negara, diperhatikan pula Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu kewenangan tingkat pemerintah/

kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangannya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel 4.4:

Pelaksanaan UU dan PP tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

3. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut undang-undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada, dimana pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 4.5 menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 4.5 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Biaya	Penanggungjawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	

No.	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
	1. Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/ Masyarakat	
	2. Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/ Masy
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/ Masyarakat	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
	1. Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
	2. Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
	1. Biaya Personalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/ Masy	
	2. Biaya Nonpersonalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/ Masy
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/ Masy	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
	1. Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
	2. Biaya Nonpersonalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

No	Jenis Biaya	Penanggungjawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
2	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1	Biaya Personalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy	
2	Biaya Nonpersonalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2	Biaya Nonpersonalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
	b. Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/ Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah: (i) biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal,

yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Perkiraan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010-2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005-2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN

Rp225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp349,2 triliun.

Namun demikian sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I terhadap program dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan kebutuhan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Struktur Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	Jumlah output	Target Anggaran (Rp. 000.000)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah		123	23.643.252	29.893.609	30.976.962	32.150.542	33.362.015
1.	Pembinaan Sekolah Dasar	14	2.216.195	2.480.098	2.558.540	2.952.532	3.092.981
2.	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	20	2.699.200	4.062.249	4.100.552	4.162.165	4.221.813
3.	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	16	8.010.000	9.432.897	9.803.759	10.118.011	10.452.033
4.	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	25	9.009.000	11.542.632	12.060.600	12.390.842	12.972.781
5.	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	27	912.000	1.542.642	1.566.613	1.592.098	1.620.047
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	20	386.757	405.991	442.798	473.794	506.960
7.	Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan	11	35.100	37.100	39.100	41.100	43.100
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	5	375.000	390.000	405.000	420.000	452.300

Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Pendidikan Dasar Dan Menengah diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan



Gambar 4.2: Proyeksi Anggaran Pembinaan SMA Tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah)

pendanaan pendidikan.

5. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Kerangka pendanaan di atas akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien antara lain jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstitusi terkait. Penataan sistem tata kelola, serta pengawasan internal di lingkungan Kemendikbud.

c. Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra pendidikan secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan dan kebudayaan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan antara lain adalah Kemdikbud, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi serta Kementerian lain yang mengelola program, kegiatan dan anggaran fungsi pendidikan.

d. Tata Kelola

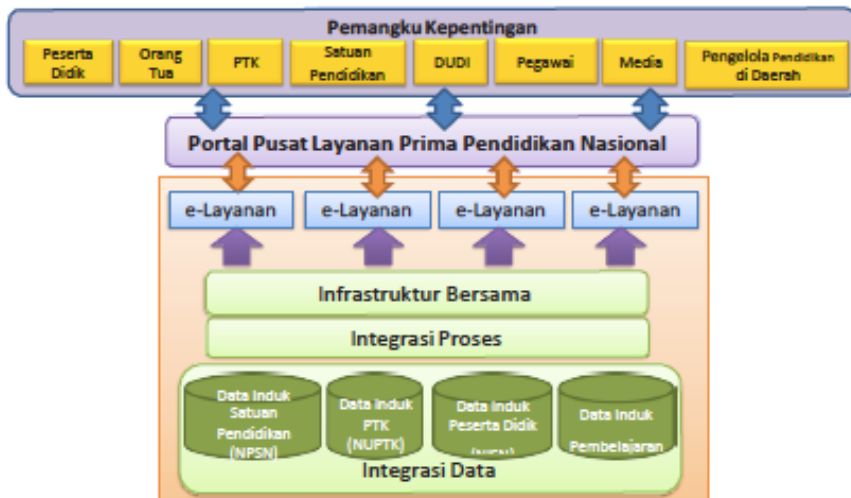
Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

e. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian, dan badan pengawas daerah (Bawasda) untuk dinas pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendikbud.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggungjawab kepada DPR-RI.



Gambar 4.3. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud

6. Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Gambar 4.2 menunjukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud sesuai dengan Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008.

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemendikbud perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus selaras dengan Visi dan Misi Kemendikbud; (ii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus mampu mendukung manajemen Kemendikbud dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi; (iii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi; (iv) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak ter-

jadi data redundancy; (v) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan dan kebudayaan termasuk e-pembelajaran, e-knowledge sharing dan e-sumber belajar; (vi) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Kemdikbud termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; dan (vii) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master Plan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud yang selaras dengan Rencana Strategis Kemendikbud.

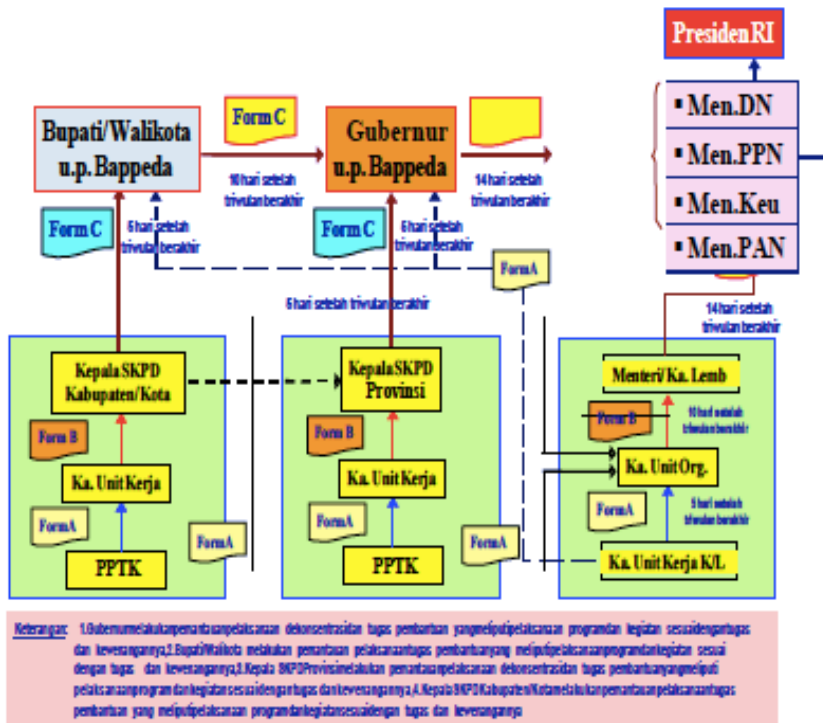
C. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal dan nonformal.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); 6) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja; dan 11) pelaksanaan dilakukan se-



Gambar 4.4. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

cara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota, dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan, dan satuan pendidikan.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemdikbud meliputi: 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, 2) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan

Kemdikbud, 3) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, 4) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, dan 5) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

5. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Satuan Pendidikan dan Kebudayaan

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk:
(i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan

dan kebudayaan provinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparaturnya Pemda Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparaturnya pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2015-2019; (ii) memperbaiki kinerja aparaturnya pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparaturnya pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan dan Kebudayaan

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan dan kebudayaan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM, BAN-PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan. □



BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan pembangunan pendidikan SMA 2015-2019.

Rencana strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 ini disusun untuk memberikan jабaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategik, arah kebijakan serta strategi pembangunan pendidikan SMA 2015-2019 sesuai dengan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) serta arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Rencana strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 ini disusun dengan memperhatikan kondisi capaian pendidikan yang ada saat ini dan berbagai isu-isu strategis yang dihadapi bangsa Indonesia. Disamping itu juga memperhatikan kemampuan pendanaan pemerintah sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RPJMN 2015–2019 serta dengan mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan SMA 2015-2019.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 ini Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun akan lebih terarah, terinci dan akuntabel. □



LAMPIRAN

GAMBARAN UMUM KEADAAN SMA MENURUT STATUS SEKOLAH
OVERVIEW OF GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS) BY STATUS OF SCHOOL
TAHUN / YEAR: 2015/2016

No.	Variabel Variables	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah Total
		Jml./No.	%	Jml./No.	%	
1.	Sekolah/Schools	6.355	50,08	6.334	49,92	12.689
2.	Siswa Baru / New Entrants	1.145.174	74,17	398.722	25,83	1.543.896
3.	Siswa / Pupils	3.174.888	73,62	1.137.519	26,38	4.312.407
	Menurut Jenis Kelamin / By Sex					
	Laki-laki / Male	1.358.741	70,81	560.104	29,19	1.918.845
	Perempuan / Female	1.816.147	75,88	577.415	24,12	2.393.562
	Menurut Tingkat / By Grade					
	Tingkat / Grade X	1.147.615	74,16	399.791	25,84	1.547.406
	Tingkat / Grade XI	1.063.336	73,56	382.120	26,44	1.445.456
	Tingkat / Grade XII	963.937	73,05	355.608	26,95	1.319.545
4.	Mengulang / Repeaters	4.157	60,94	2.665	39,06	6.822
5.	Putus Sekolah / Drop-Outs	21.887	54,10	18.567	45,90	40.454
6.	Lulusan / Graduates	1.064.080	74,75	359.527	25,25	1.423.607
7.	Kepala Sek. dan Guru / Headmasters and Teachers	208.777	70,55	87.135	29,45	295.912
	Menurut Jabatan / By Responsibility					
	Kepala Sekolah / Headmasters	6.355	50,08	6.334	49,92	12.689
	Guru Tetap / Full-time Teachers	145.142	71,19	58.728	28,81	203.870
	Guru Tidak Tetap / Part-time Teachers	57.280	72,18	22.073	27,82	79.353
	Kepala Sekolah / Headmasters					
	Menurut Jenis Kelamin / By Sex					
	Laki-laki / Male	6.355	50,08	6.334	49,92	12.689
	Perempuan / Female	4.778	70,60	1.990	29,40	6.768
	Guru / Teachers	1.577	26,63	4.344	73,37	5.921
	Menurut Status Kepegawaian / By Personnel Status					
	Pegawai Negeri / Civil Servant	202.422	71,47	80.801	28,53	283.223
	Pegawai Negeri / Civil Servant	145.142	93,71	9.748	6,29	154.890
	Bukan Pegawai Negeri / Non-civil Servant	57.280	44,63	71.053	55,37	128.333
8.	Rombongan Belajar / Classes	103.059	70,16	43.834	29,84	146.893
9.	Ruang Kelas / Classrooms	103.445	69,34	45.749	30,66	149.194
	Menurut Status Kepemilikan / By Ownership Status					
	Ruang Kelas Milik / Owned Classrooms	100.886	70,23	42.759	29,77	143.645
	Menurut Kondisi / By Condition					
	Baik / Good	48.154	70,79	19.867	29,21	68.021
	Rusak Ringan / Minor Damage	45.673	70,89	18.753	29,11	64.426
	Rusak Sedang / Middle Damage	3.016	67,08	1.480	32,92	4.496
	Rusak Berat / Major Damage	2.020	57,42	1.498	42,58	3.518
	Rusak Total / Total Damage	2.023	63,54	1.161	36,46	3.184
	Ruang Kelas Bkn. Milik / Not-owned Classrooms	2.559	46,12	2.990	53,88	5.549

GAMBARAN UMUM KEADAAN SMA TIAP PROVINSI

OVERVIEW OF GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS) BY PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi <i>Province</i>	Sekolah <i>Schools</i>	Siswa Baru <i>New Entrants</i>	Siswa <i>Pupils</i>	Mengulang <i>Repeaters</i>	Putus Sekolah <i>Drop Outs</i>	Lulusan <i>Graduates</i>
1	DKI Jakarta	467	55.339	155.240	261	682	52.686
2	Jawa Barat	1.441	213.584	577.605	206	5.220	182.795
3	Banten	497	61.012	165.794	139	1.475	52.772
4	Jawa Tengah	847	132.016	370.935	193	2.412	123.791
5	DI Yogyakarta	160	17.986	51.617	73	264	17.341
6	Jawa Timur	1.441	175.197	490.630	853	4.682	160.215
7	Aceh	487	47.728	134.325	577	1.733	48.854
8	Sumatera Utara	1.020	121.146	337.011	242	4.295	111.562
9	Sumatera Barat	301	48.329	136.361	437	981	48.566
10	Riau	413	49.073	136.562	139	794	46.874
11	Kepulauan Riau	114	12.749	34.636	118	158	11.464
12	Jambi	210	23.818	66.728	95	390	23.238
13	Sumatera Selatan	570	67.393	188.876	303	2.010	65.624
14	Bangka Belitung	65	8.140	22.064	71	201	6.524
15	Bengkulu	129	16.149	44.967	28	461	15.374
16	Lampung	462	50.041	137.159	104	1.353	46.036
17	Kalimantan Barat	378	38.777	106.006	308	1.152	34.279
18	Kalimantan Tengah	230	17.846	49.016	79	486	15.888
19	Kalimantan Selatan	183	21.322	57.344	66	499	17.862
20	Kalimantan Timur	210	22.531	62.399	174	449	19.532
21	Kalimantan Utara	55	4.777	14.357	56	133	4.709
22	Sulawesi Utara	209	17.290	50.978	153	510	16.808
23	Gorontalo	57	9.242	24.749	110	282	7.939
24	Sulawesi Tengah	189	22.938	63.601	116	425	20.115
25	Sulawesi Selatan	552	77.859	219.708	345	2.159	73.519
26	Sulawesi Barat	76	8.438	24.386	18	338	7.683
27	Sulawesi Tenggara	270	28.859	82.539	298	1.233	27.279
28	Maluku	250	21.732	63.394	59	502	21.630
29	Maluku Utara	174	10.657	32.041	84	253	11.705
30	Bali	157	29.022	81.590	21	493	25.459
31	Nusa Tenggara Barat	286	34.426	99.329	300	1.795	32.349
32	Nusa Tenggara Timur	472	54.150	156.071	310	1.810	49.010
33	Papua	206	17.003	51.905	365	570	17.053
34	Papua Barat	111	7.327	22.484	121	254	7.072
	Indonesia	12.689	1.543.896	4.312.407	6.822	40.454	1.423.607

JUMLAH SEKOLAH MENURUT WAKTU PENYELENGGARAAN TIAP PROVINSI
NUMBER OF SCHOOLS BY TIME OF OPERATION AND PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Pagi / Morning		Siang / Afternoon		Kombinasi / Combination		Jumlah Total
		Jml./No. Of	%	Jml./No. Of	%	Jml./No. Of	%	
1	DKI Jakarta	448	95,93	13	2,78	6	1,28	467
2	Jawa Barat	1.272	88,27	80	5,55	89	6,18	1.441
3	Banten	438	88,13	27	5,43	32	6,44	497
4	Jawa Tengah	826	97,52	5	0,59	16	1,89	847
5	DI Yogyakarta	156	97,50	2	1,25	2	1,25	160
6	Jawa Timur	1.327	92,09	76	5,27	38	2,64	1.441
7	Aceh	439	90,14	9	1,85	39	8,01	487
8	Sumatera Utara	927	90,88	50	4,90	43	4,22	1.020
9	Sumatera Barat	271	90,03	5	1,66	25	8,31	301
10	Riau	385	93,22	7	1,69	21	5,08	413
11	Kepulauan Riau	99	86,84	5	4,39	10	8,77	114
12	Jambi	189	90,00	9	4,29	12	5,71	210
13	Sumatera Selatan	467	81,93	76	13,33	27	4,74	570
14	Bangka Belitung	62	95,38	2	3,08	1	1,54	65
15	Bengkulu	117	90,70	8	6,20	4	3,10	129
16	Lampung	417	90,26	36	7,79	9	1,95	462
17	Kalimantan Barat	299	79,10	72	19,05	7	1,85	378
18	Kalimantan Tengah	209	90,87	17	7,39	4	1,74	230
19	Kalimantan Selatan	174	95,08	5	2,73	4	2,19	183
20	Kalimantan Timur	177	84,29	22	10,48	11	5,24	210
21	Kalimantan Utara	45	81,82	7	12,73	3	5,45	55
22	Sulawesi Utara	197	94,26	7	3,35	5	2,39	209
23	Gorontalo	54	94,74	-	-	3	5,26	57
24	Sulawesi Tengah	179	94,71	5	2,65	5	2,65	189
25	Sulawesi Selatan	505	91,49	27	4,89	20	3,62	552
26	Sulawesi Barat	70	92,11	4	5,26	2	2,63	76
27	Sulawesi Tenggara	238	88,15	17	6,30	15	5,56	270
28	Maluku	200	80,00	25	10,00	25	10,00	250
29	Maluku Utara	159	91,38	13	7,47	2	1,15	174
30	Bali	132	84,08	10	6,37	15	9,55	157
31	Nusa Tenggara Barat	251	87,76	12	4,20	23	8,04	286
32	Nusa Tenggara Timur	363	76,91	53	11,23	56	11,86	472
33	Papua	198	96,12	5	2,43	3	1,46	206
34	Papua Barat	97	87,39	8	7,21	6	5,41	111
Indonesia		11.387	89,74	719	5,67	583	4,59	12.689

PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

TREND OF SCHOOLS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2013/2014--2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	120	353	473	118	352	470	118	349	467
2	Jawa Barat	466	913	1.379	463	952	1.415	467	974	1.441
3	Banten	144	331	475	146	342	488	144	353	497
4	Jawa Tengah	515	712	1.227	364	491	855	364	483	847
5	DI Yogyakarta	69	94	163	69	93	162	69	91	160
6	Jawa Timur	419	912	1.331	419	1.007	1.426	420	1.021	1.441
7	Aceh	346	112	458	378	103	481	379	108	487
8	Sumatera Utara	361	577	938	391	616	1.007	400	620	1.020
9	Sumatera Barat	209	74	283	213	83	296	214	87	301
10	Riau	250	115	365	269	131	400	278	135	413
11	Kepulauan Riau	71	30	101	77	32	109	79	35	114
12	Jambi	140	61	201	144	65	209	144	66	210
13	Sumatera Selatan	244	230	474	301	269	570	311	259	570
14	Bangka Belitung	39	26	65	41	25	66	42	23	65
15	Bengkulu	95	28	123	99	30	129	99	30	129
16	Lampung	199	254	453	213	243	456	216	246	462
17	Kalimantan Barat	206	144	350	218	148	366	228	150	378
18	Kalimantan Tengah	151	75	226	163	62	225	170	60	230
19	Kalimantan Selatan	125	52	177	131	54	185	133	50	183
20	Kalimantan Timur	165	104	269	132	75	207	135	75	210
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	39	15	54	39	16	55
22	Sulawesi Utara	107	119	226	103	105	208	108	101	209
23	Gorontalo	48	8	56	46	7	53	50	7	57
24	Sulawesi Tengah	133	42	175	146	41	187	148	41	189
25	Sulawesi Selatan	313	234	547	318	232	550	321	231	552
26	Sulawesi Barat	57	15	72	59	12	71	63	13	76
27	Sulawesi Tenggara	190	62	252	207	58	265	215	55	270
28	Maluku	158	76	234	170	75	245	176	74	250
29	Maluku Utara	123	58	181	113	56	169	115	59	174
30	Bali	76	88	164	78	86	164	78	79	157
31	Nusa Tenggara Barat	144	129	273	150	143	293	150	136	286
32	Nusa Tenggara Timur	231	166	397	281	154	435	298	174	472
33	Papua	119	78	197	113	79	192	119	87	206
34	Papua Barat	61	43	104	60	45	105	65	46	111
Indonesia		6.094	6.315	12.409	6.232	6.281	12.513	6.355	6.334	12.689

Catatan / Note :

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

JUMLAH SISWA BARU MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

NUMBER OF NEW ENTRANTS BY SEX, STATUS OF SCHOOL, AND PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL: NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR: 2015/2016

No.	Provinsi Province	Laki-laki/Male			Perempuan/Female			Laki+Peremp./Male+Female		
		Negeri Public	Swasta Private	Subjml. Sub Tot.	Negeri Public	Swasta Private	Subjml. Sub Tot.	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	12.674	13.495	26.169	16.691	12.479	29.170	29.365	25.974	55.339
2	Jawa Barat	59.044	33.373	92.417	86.132	35.035	121.167	145.176	68.408	213.584
3	Banten	17.208	10.961	28.169	22.045	10.798	32.843	39.253	21.759	61.012
4	Jawa Tengah	34.794	15.263	50.057	63.967	17.992	81.959	98.761	33.255	132.016
5	DI Yogyakarta	4.554	2.944	7.498	7.799	2.689	10.488	12.353	5.633	17.986
6	Jawa Timur	45.059	31.639	76.698	62.509	35.990	98.499	107.568	67.629	175.197
7	Aceh	19.859	1.985	21.844	23.157	2.727	25.884	43.016	4.712	47.728
8	Sumatera Utara	33.562	20.642	54.204	43.235	23.707	66.942	76.797	44.349	121.146
9	Sumatera Barat	18.552	2.154	20.706	25.427	2.196	27.623	43.979	4.350	48.329
10	Riau	18.636	3.456	22.092	23.376	3.605	26.981	42.012	7.061	49.073
11	Kepulauan Riau	4.954	868	5.822	5.938	989	6.927	10.892	1.857	12.749
12	Jambi	9.792	1.302	11.094	11.273	1.451	12.724	21.065	2.753	23.818
13	Sumatera Selatan	22.994	8.344	31.338	27.783	8.272	36.055	50.777	16.616	67.393
14	Bangka Belitung	3.004	678	3.682	3.781	677	4.458	6.785	1.355	8.140
15	Bengkulu	6.660	482	7.142	8.557	450	9.007	15.217	932	16.149
16	Lampung	16.120	5.720	21.840	21.879	6.322	28.201	37.999	12.042	50.041
17	Kalimantan Barat	12.819	5.034	17.853	15.345	5.579	20.924	28.164	10.613	38.777
18	Kalimantan Tengah	7.685	820	8.505	8.434	907	9.341	16.119	1.727	17.846
19	Kalimantan Selatan	8.535	1.372	9.907	10.021	1.394	11.415	18.556	2.766	21.322
20	Kalimantan Timur	8.530	1.541	10.071	10.833	1.627	12.460	19.363	3.168	22.531
21	Kalimantan Utara	1.779	409	2.188	2.229	360	2.589	4.008	769	4.777
22	Sulawesi Utara	6.351	2.080	8.431	6.802	2.057	8.859	13.153	4.137	17.290
23	Gorontalo	3.764	189	3.953	5.075	214	5.289	8.839	403	9.242
24	Sulawesi Tengah	9.966	764	10.730	11.381	827	12.208	21.347	1.591	22.938
25	Sulawesi Selatan	29.335	4.597	33.932	39.011	4.916	43.927	68.346	9.513	77.859
26	Sulawesi Barat	3.588	224	3.812	4.405	221	4.626	7.993	445	8.438
27	Sulawesi Tenggara	12.539	967	13.506	14.478	875	15.353	27.017	1.842	28.859
28	Maluku	8.496	2.117	10.613	8.960	2.159	11.119	17.456	4.276	21.732
29	Maluku Utara	4.342	851	5.193	4.586	878	5.464	8.928	1.729	10.657
30	Bali	10.331	4.478	14.809	10.484	3.729	14.213	20.815	8.207	29.022
31	Nusa Tenggara Barat	13.309	2.973	16.282	15.382	2.762	18.144	28.691	5.735	34.426
32	Nusa Tenggara Timur	16.584	7.640	24.224	20.987	8.999	29.926	37.571	16.579	54.150
33	Papua	6.369	2.481	8.850	5.966	2.187	8.153	12.335	4.668	17.003
34	Papua Barat	2.660	994	3.654	2.798	875	3.673	5.458	1.869	7.327
Indonesia		494.448	192.837	687.285	650.726	205.885	856.611	1.145.174	398.722	1.543.896

PERKEMBANGAN JUMLAH SISWA BARU MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

TREND OF NEW ENTRANTS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2013/2014–2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	35.438	29.078	64.516	27.962	20.613	48.575	29.365	25.974	55.339
2	Jawa Barat	113.047	75.390	188.437	129.865	59.787	189.652	145.176	68.408	213.584
3	Bariten	29.545	23.119	52.664	34.217	19.869	54.086	39.253	21.759	61.012
4	Jawa Tengah	90.240	40.152	130.392	93.064	30.086	123.150	98.761	33.255	132.016
5	DI Yogyakarta	9.534	7.931	17.465	11.712	5.105	16.817	12.353	5.633	17.986
6	Jawa Timur	91.863	67.433	159.296	101.579	62.626	164.205	107.568	67.629	175.197
7	Aceh	45.702	7.266	52.968	40.211	4.101	44.312	43.016	4.712	47.728
8	Sumatera Utara	61.769	52.831	114.600	73.445	42.388	115.833	76.797	44.349	121.146
9	Sumatera Barat	35.041	10.772	45.813	40.861	4.077	44.938	43.979	4.350	48.329
10	Riau	29.287	10.768	40.055	37.984	7.109	45.093	42.012	7.061	49.073
11	Kepulauan Riau	10.591	2.096	12.687	9.945	1.583	11.528	10.892	1.857	12.749
12	Jambi	16.786	6.581	23.367	21.066	2.540	23.606	21.065	2.753	23.818
13	Sumatera Selatan	41.900	28.768	70.668	48.470	16.134	64.604	50.777	16.616	67.393
14	Bangka Belitung	5.050	3.594	8.644	6.301	1.266	7.567	6.785	1.355	8.140
15	Bengkulu	13.985	4.314	18.299	13.784	934	14.718	15.217	932	16.149
16	Lampung	28.233	17.750	45.983	32.934	12.397	45.331	37.999	12.042	50.041
17	Kalimantan Barat	20.218	13.451	33.669	25.194	9.851	35.045	28.164	10.613	38.777
18	Kalimantan Tengah	12.052	5.473	17.525	14.674	1.868	16.542	16.119	1.727	17.846
19	Kalimantan Selatan	13.490	5.840	19.330	17.005	2.143	19.148	18.556	2.766	21.322
20	Kalimantan Timur	18.667	7.452	26.119	17.927	2.913	20.840	19.363	3.168	22.531
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
					Indonesia			948.197	514.206	1.462.403
22	Sulawesi Utara	10.082	8.096	18.118	12.860	4.591	17.451	13.153	4.137	17.290
23	Gorontalo	7.097	538	7.635	7.543	477	8.020	8.839	403	9.242
24	Sulawesi Tengah	15.921	4.180	20.101	19.408	1.487	20.895	21.347	1.591	22.938
25	Sulawesi Selatan	54.945	14.791	69.736	63.230	9.335	72.565	68.346	9.513	77.859
26	Sulawesi Barat	7.368	1.389	8.757	7.990	557	8.547	7.993	445	8.438
27	Sulawesi Tenggara	21.612	6.914	28.526	25.951	1.626	27.577	27.017	1.842	28.859
28	Maluku	14.589	6.375	20.964	16.960	4.350	21.310	17.456	4.276	21.732
29	Maluku Utara	10.922	2.567	13.489	9.422	1.804	11.226	8.928	1.729	10.657
30	Bali	18.798	10.030	28.828	19.893	7.235	27.128	20.815	8.207	29.022
31	Nusa Tenggara Barat	25.093	8.713	33.806	28.430	6.553	34.983	28.691	5.735	34.426
32	Nusa Tenggara Timur	24.832	19.923	44.755	37.474	16.263	53.737	37.571	16.579	54.150
33	Papua	10.326	6.975	17.301	11.633	5.088	16.721	12.335	4.668	17.003
34	Papua Barat	4.164	3.716	7.880	5.595	2.347	7.942	5.458	1.869	7.327
					1.068.490	369.808	1.438.298	1.145.174	398.722	1.543.896

Catatan / Note :

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP PROVINSI

NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL: NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR: 2015/2016

No.	Provinsi Province	Islam Moslem	Protestan Christian	Katolik Catholic	Hindu Hinduism	Budha Buddhism	Konghucu Confucius	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	118.910	19.338	10.407	416	6.069	100	155.240
2	Jawa Barat	547.123	21.026	7.213	440	1.709	94	577.605
3	Banten	151.095	7.268	4.618	291	2.474	48	165.794
4	Jawa Tengah	347.313	13.779	8.979	219	621	24	370.935
5	DI Yogyakarta	44.232	2.575	4.684	79	46	1	51.617
6	Jawa Timur	461.000	17.749	9.073	1.330	1.391	87	490.630
7	Aceh	131.830	2.100	208	2	184	1	134.325
8	Sumatera Utara	181.376	122.315	21.244	281	11.785	10	337.011
9	Sumatera Barat	132.622	2.153	1.531	13	42	-	136.361
10	Riau	119.644	12.031	1.617	29	2.978	263	136.562
11	Kepulauan Riau	27.422	3.755	694	29	2.708	28	34.636
12	Jambi	63.079	2.424	473	13	734	5	66.728
13	Sumatera Selatan	182.835	2.038	1.402	943	1.655	3	188.876
14	Bangka Belitung	20.418	503	338	24	494	287	22.064
15	Bengkulu	43.584	999	244	69	70	1	44.967
16	Lampung	128.875	3.121	2.037	2.583	540	3	137.159
17	Kalimantan Barat	59.430	14.251	28.990	81	2.855	399	106.006
18	Kalimantan Tengah	31.767	12.521	1.805	2.870	48	5	49.016
19	Kalimantan Selatan	54.672	1.455	505	428	283	1	57.344
20	Kalimantan Timur	52.581	6.024	3.200	235	340	19	62.399
21	Kalimantan Utara	10.048	3.342	867	9	91	-	14.357
22	Sulawesi Utara	11.425	36.059	2.808	593	83	10	50.978
23	Gorontalo	24.203	397	18	108	23	-	24.749
24	Sulawesi Tengah	48.785	10.352	672	3.666	123	3	63.601
25	Sulawesi Selatan	193.682	18.904	5.098	1.539	483	2	219.708
26	Sulawesi Barat	19.902	3.700	299	483	2	-	24.386
27	Sulawesi Tenggara	79.799	999	334	1.390	17	-	82.539
28	Maluku	33.245	26.319	3.665	160	3	2	63.394
29	Maluku Utara	24.294	7.617	129	-	1	-	32.041
30	Bali	6.553	1.881	1.129	71.276	737	14	81.590
31	Nusa Tenggara Barat	95.398	412	301	2.921	297	-	99.329
32	Nusa Tenggara Timur	10.562	55.622	89.676	203	6	2	156.071
33	Papua	13.423	30.655	7.731	64	32	-	51.905
34	Papua Barat	7.802	12.883	1.766	23	10	-	22.484
	Indonesia	3.478.929	476.567	223.755	92.810	38.934	1.412	4.312.407

JUMLAH SISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

NUMBER OF PUPILS BY SEX, STATUS OF SCHOOL, AND PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR: 2015/2016

No.	Provinsi <i>Province</i>	Laki-laki / Male			Perempuan / Female			Laki+Peremp./Male+Female		
		Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Subjml. <i>Sub Tot.</i>	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Subjml. <i>Sub Tot.</i>	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	DKI Jakarta	36.736	35.916	72.652	50.343	32.245	82.588	87.079	68.161	155.240
2	Jawa Barat	158.796	90.803	249.599	233.610	94.396	328.006	392.406	185.199	577.605
3	Banten	45.014	31.239	76.253	59.395	30.146	89.541	104.409	61.385	165.794
4	Jawa Tengah	98.787	42.638	141.425	179.537	49.973	229.510	278.324	92.611	370.935
5	DI Yogyakarta	13.200	8.313	21.513	22.454	7.650	30.104	35.654	15.963	51.617
6	Jawa Timur	126.299	90.385	216.684	175.884	98.062	273.946	302.183	188.447	490.630
7	Aceh	55.876	5.609	61.485	66.006	6.834	72.840	121.882	12.443	134.325
8	Sumatera Utara	91.075	57.969	149.044	121.516	66.451	187.967	212.591	124.420	337.011
9	Sumatera Barat	48.811	7.961	56.772	72.603	6.986	79.589	121.414	14.947	136.361
10	Riau	50.652	10.185	60.837	64.824	10.901	75.725	115.476	21.086	136.562
11	Kepulauan Riau	13.339	2.352	15.691	16.355	2.590	18.945	29.694	4.942	34.636
12	Jambi	26.768	3.949	30.717	31.848	4.163	36.011	58.616	8.112	66.728
13	Sumatra Selatan	61.650	24.767	86.417	78.750	23.709	102.459	140.400	48.476	188.876
14	Bangka Belitung	7.836	1.919	9.755	10.425	1.884	12.309	18.261	3.803	22.064
15	Bengkulu	18.056	1.983	20.039	23.547	1.381	24.928	41.603	3.364	44.967
16	Lampung	42.306	17.772	60.078	58.483	18.598	77.081	100.789	36.370	137.159
17	Kalimantan Barat	34.573	14.344	48.917	41.316	15.773	57.089	75.889	30.117	106.006
18	Kalimantan Tengah	20.986	2.565	23.551	22.729	2.736	25.465	43.715	5.301	49.016
19	Kalimantan Selatan	22.775	3.534	26.309	27.376	3.659	31.035	50.151	7.193	57.344
20	Kalimantan Timur	23.091	4.475	27.566	30.151	4.682	34.833	53.242	9.157	62.399
21	Kalimantan Utara	5.396	1.250	6.646	6.595	1.116	7.711	11.991	2.366	14.357
22	Sulawesi Utara	17.722	6.971	24.693	19.581	6.704	26.285	37.303	13.675	50.978
23	Gorontalo	9.982	598	10.580	13.600	569	14.169	23.582	1.167	24.749
24	Sulawesi Tengah	26.701	2.567	29.268	31.536	2.797	34.333	58.237	5.364	63.601
25	Sulawesi Selatan	78.822	17.853	96.675	107.445	15.588	123.033	186.267	33.441	219.708
26	Sulawesi Barat	10.168	763	10.931	12.752	703	13.455	22.920	1.466	24.386
27	Sulawesi Tenggara	35.250	3.888	39.138	40.553	2.848	43.401	75.803	6.736	82.539
28	Maluku	24.577	6.355	30.932	26.117	6.345	32.462	50.694	12.700	63.394
29	Maluku Utara	12.864	2.827	15.691	13.575	2.775	16.350	26.439	5.602	32.041
30	Bali	29.565	12.260	41.825	29.708	10.057	39.765	59.273	22.317	81.590
31	Nusa Tenggara Barat	37.915	9.661	47.576	43.463	8.290	51.753	81.378	17.951	99.329
32	Nusa Tenggara Timur	45.922	24.623	70.545	58.491	27.035	85.526	104.413	51.658	156.071
33	Papua	19.249	8.425	27.674	17.482	6.749	24.231	36.731	15.174	51.905
34	Papua Barat	7.982	3.385	11.367	8.097	3.020	11.117	16.079	6.405	22.484
	Indonesia	1.358.741	560.104	1.918.845	1.816.147	577.415	2.393.562	3.174.888	1.137.519	4.312.407

JUMLAH SISWA MENURUT TINGKAT DI APROVINSI
NUMBER OF PUPILS BY GRADE AND PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Tingkat / Grade X		Tingkat / Grade XI		Tingkat / Grade XII		Jumlah Total
		Jml/No.Of	%	Jml/No.Of	%	Jml/No.Of	%	
1	DKI Jakarta	55.472	35,73	49.487	31,88	50.281	32,39	155.240
2	Jawa Barat	213.705	37,00	189.922	32,88	173.978	30,12	577.605
3	Banten	61.092	36,85	55.682	33,59	49.020	29,57	165.794
4	Jawa Tengah	132.114	35,62	123.988	33,43	114.833	30,96	370.935
5	DI Yogyakarta	18.020	34,91	16.919	32,78	16.678	32,31	51.617
6	Jawa Timur	175.655	35,80	163.947	33,42	151.028	30,78	490.630
7	Aceh	48.041	35,76	45.578	33,93	40.706	30,30	134.325
8	Sumatera Utara	121.231	35,97	114.280	33,91	101.500	30,12	337.011
9	Sumatera Barat	48.640	35,67	45.159	33,12	42.562	31,21	136.361
10	Riau	49.140	35,98	45.737	33,49	41.685	30,52	136.562
11	Kepulauan Riau	12.810	36,98	11.502	33,21	10.324	29,81	34.636
12	Jambi	23.872	35,78	22.816	34,19	20.040	30,03	66.728
13	Sumatera Selatan	67.532	35,75	64.396	34,09	56.948	30,15	188.876
14	Bangka Belitung	8.188	37,11	7.284	33,01	6.592	29,88	22.064
15	Bengkulu	16.164	35,95	15.119	33,62	13.684	30,43	44.967
16	Lampung	50.102	36,53	45.503	33,18	41.554	30,30	137.159
17	Kalimantan Barat	38.968	36,76	35.560	33,55	31.478	29,69	106.006
18	Kalimantan Tengah	17.893	36,50	16.676	34,02	14.447	29,47	49.016
19	Kalimantan Selatan	21.360	37,25	18.931	33,01	17.053	29,74	57.344
20	Kalimantan Timur	22.643	36,29	21.163	33,92	18.598	29,80	62.399
21	Kalimantan Utara	4.807	33,48	5.018	34,95	4.532	31,57	14.357
22	Sulawesi Utara	17.355	34,04	17.603	34,53	16.020	31,43	50.978
23	Gorontalo	9.304	37,59	8.129	32,85	7.316	29,56	24.749
24	Sulawesi Tengah	23.000	36,16	21.666	34,07	18.935	29,77	63.601
25	Sulawesi Selatan	78.038	35,52	73.454	33,43	68.216	31,05	219.708
26	Sulawesi Barat	8.441	34,61	8.513	34,91	7.432	30,48	24.386
27	Sulawesi Tenggara	28.927	35,05	28.015	33,94	25.597	31,01	82.539
28	Maluku	21.753	34,31	21.700	34,23	19.941	31,46	63.394
29	Maluku Utara	10.702	33,40	11.246	35,10	10.093	31,50	32.041
30	Bali	29.029	35,58	26.860	32,92	25.701	31,50	81.590
31	Nusa Tenggara Barat	34.556	34,79	34.888	35,12	29.885	30,09	99.329
32	Nusa Tenggara Timur	54.270	34,77	53.004	33,96	48.797	31,27	156.071
33	Papua	17.182	33,10	17.817	34,33	16.906	32,57	51.905
34	Papua Barat	7.400	32,91	7.894	35,11	7.190	31,98	22.484
Indonesia		1.547.406	35,88	1.445.456	33,52	1.319.545	30,60	4.312.407

JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP PROVINSI
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SMA/ GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN/ YEAR: 2015/2016

No.	Provinsi Province	Kelompok Umur / Age-group (tahun/ year)						Jumlah Total
		<16	%	16-18	%	>18	%	
1	DKI Jakarta	17.247	11,11	136.425	87,88	1.568	1,01	155.240
2	Jawa Barat	96.916	16,78	470.250	81,41	10.439	1,81	577.605
3	Banten	23.413	14,12	139.158	83,93	3.223	1,94	165.794
4	Jawa Tengah	55.865	15,06	307.784	82,98	7.286	1,96	370.935
5	DI Yogyakarta	10.951	21,22	39.668	76,85	998	1,93	51.617
6	Jawa Timur	109.951	22,41	367.059	74,81	13.620	2,78	490.630
7	Aceh	20.695	15,41	108.838	81,03	4.792	3,57	134.325
8	Sumatera Utara	46.960	13,93	280.095	83,11	9.956	2,95	337.011
9	Sumatera Barat	39.217	28,76	89.489	65,63	7.655	5,61	136.361
10	Riau	27.979	20,49	103.210	75,58	5.373	3,93	136.562
11	Kepulauan Riau	5.947	17,17	27.374	79,03	1.315	3,80	34.636
12	Jambi	9.243	13,85	55.414	83,04	2.071	3,10	66.728
13	Sumatera Selatan	23.625	12,51	158.342	83,83	6.909	3,66	188.876
14	Bangka Belitung	3.260	14,78	17.873	81,01	931	4,22	22.064
15	Bengkulu	9.665	21,49	33.560	74,63	1.742	3,87	44.967
16	Lampung	24.613	17,94	108.448	79,07	4.098	2,99	137.159
17	Kalimantan Barat	24.487	23,10	73.242	69,09	8.277	7,81	106.006
18	Kalimantan Tengah	8.332	17,00	38.448	78,44	2.236	4,56	49.016
19	Kalimantan Selatan	11.160	19,46	43.674	76,16	2.510	4,38	57.344
20	Kalimantan Timur	10.100	16,19	50.065	80,23	2.234	3,58	62.399
21	Kalimantan Utara	3.543	24,68	9.899	68,95	915	6,37	14.357
22	Sulawesi Utara	3.136	6,15	46.718	91,64	1.124	2,20	50.978
23	Gorontalo	5.273	21,31	18.188	73,49	1.288	5,20	24.749
24	Sulawesi Tengah	10.415	16,38	51.376	80,78	1.810	2,85	63.601
25	Sulawesi Selatan	31.060	14,14	182.148	82,90	6.500	2,96	219.708
26	Sulawesi Barat	5.772	23,67	17.610	72,21	1.004	4,12	24.386
27	Sulawesi Tenggara	12.431	15,06	66.482	80,55	3.626	4,39	82.539
28	Maluku	6.413	10,12	55.312	87,25	1.669	2,63	63.394
29	Maluku Utara	4.621	14,42	26.148	81,61	1.272	3,97	32.041
30	Bali	15.985	19,59	64.140	78,61	1.465	1,80	81.590
31	Nusa Tenggara Barat	21.518	21,66	74.025	74,53	3.786	3,81	99.329
32	Nusa Tenggara Timur	50.839	32,57	83.788	53,69	21.444	13,74	156.071
33	Papua	12.213	23,53	32.043	61,73	7.649	14,74	51.905
34	Papua Barat	5.740	25,53	13.535	60,20	3.209	14,27	22.484
Indonesia		768.585	17,82	3.389.828	78,61	153.994	3,57	4.312.407

PERKEMBANGAN JUMLAH SISWA MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

TREND OF PUPILS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR: 2013/2014–2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	91.117	92.458	183.575	88.523	65.377	153.900	87.079	68.161	155.240
2	Jawa Barat	352.243	216.216	568.479	377.673	174.180	551.853	392.406	185.199	577.605
3	Banten	88.164	68.774	156.938	98.806	57.023	155.829	104.409	61.385	165.794
4	Jawa Tengah	268.828	131.755	400.583	274.671	89.545	364.216	278.324	92.611	370.935
5	DI Yogyakarta	29.663	23.462	53.125	35.601	15.353	50.954	35.654	15.963	51.617
6	Jawa Timur	297.329	196.544	493.873	297.983	184.326	482.309	302.183	188.447	490.630
7	Aceh	136.988	17.147	154.135	123.574	12.969	136.543	121.882	12.443	134.325
8	Sumatera Utara	197.832	146.922	344.754	230.725	121.518	352.243	212.591	124.420	337.011
9	Sumatera Barat	97.679	34.019	131.698	123.333	13.135	136.468	121.414	14.947	136.361
10	Riau	88.581	30.671	119.252	113.436	21.538	134.974	115.476	21.086	136.562
11	Kepulauan Riau	28.245	6.418	34.663	29.136	4.574	33.710	29.094	4.942	34.036
12	Jambi	49.530	18.207	67.737	60.269	8.252	68.521	58.616	8.112	66.728
13	Sumatera Selatan	117.515	84.539	202.054	143.313	47.678	190.991	140.400	48.476	188.876
14	Bangka Belitung	13.288	8.136	21.424	17.488	3.548	21.036	18.261	3.803	22.064
15	Bengkulu	33.193	15.101	48.294	41.412	2.929	44.341	41.603	3.364	44.967
16	Lampung	71.093	55.048	126.141	98.000	36.904	134.904	100.789	36.370	137.159
17	Kalimantan Barat	60.953	37.227	98.180	74.226	29.096	103.322	75.889	30.117	106.006
18	Kalimantan Tengah	33.643	13.881	47.524	42.328	5.403	47.731	43.715	5.301	49.016
19	Kalimantan Selatan	40.057	15.522	55.579	48.266	6.204	54.470	50.151	7.193	57.344
20	Kalimantan Timur	53.605	19.983	73.588	51.790	8.505	60.295	53.242	9.157	62.399
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	11.693	2.178	13.871	11.991	2.366	14.357
22	Sulawesi Utara	34.883	17.316	52.199	37.497	13.274	50.771	37.303	13.675	50.978
23	Gorontalo	17.948	1.677	19.625	22.204	1.441	23.645	23.582	1.167	24.749
24	Sulawesi Tengah	46.544	11.518	58.062	56.363	4.772	61.135	58.237	5.364	63.601
25	Sulawesi Selatan	153.955	46.096	200.051	186.127	28.016	214.143	186.267	33.441	219.708
26	Sulawesi Barat	19.200	3.697	22.897	22.664	1.626	24.290	22.920	1.466	24.386
27	Sulawesi Tenggara	55.896	21.325	77.221	75.527	4.970	80.497	75.803	6.736	82.539
28	Maluku	40.725	21.788	62.513	50.470	12.982	63.452	50.694	12.700	63.394
29	Maluku Utara	25.305	8.703	34.008	28.371	5.497	33.868	26.439	5.602	32.041
30	Bali	57.010	26.800	83.810	58.165	20.980	79.145	59.273	22.317	81.590
31	Nusa Tenggara Barat	70.455	29.010	99.465	81.760	18.912	100.672	81.378	17.951	99.329
32	Nusa Tenggara Timur	74.810	53.743	128.553	107.883	47.203	155.086	104.413	51.658	156.071
33	Papua	30.339	18.589	48.928	35.150	15.491	50.641	36.731	15.174	51.905
34	Papua Barat	13.809	9.571	23.380	16.116	6.660	22.776	16.079	6.405	22.484
Indonesia		2.796.445	1.501.943	4.298.388	3.140.513	1.092.059	4.232.572	3.174.888	1.137.519	4.312.407

Catatan / Note:

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

JUMLAH SISWA MENGULANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT TIAP PROVINSI

NUMBER OF REPEATERS BY SEX, GRADE, AND PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Laki-laki / Male				Perempuan / Female				Laki2+Peremp./Male+Female			
		Tingkat / Grade			SubJml	Tingkat / Grade			Sub Tot	Tingkat / Grade			Jumlah Total
		X	XI	XII		X	XI	XII		X	XI	XII	
1	DKI Jakarta	116	92	4	212	17	29	3	49	133	121	7	261
2	Jawa Barat	97	58	4	159	24	20	3	47	121	78	7	206
3	Banten	57	47	6	110	23	6	-	29	80	53	6	139
4	Jawa Tengah	89	74	1	164	9	19	1	29	98	93	2	193
5	DI Yogyakarta	32	23	5	60	2	9	2	13	34	32	7	73
6	Jawa Timur	365	264	20	649	93	105	6	204	458	369	26	853
7	Aceh	259	173	21	453	54	57	13	124	313	230	34	577
8	Sumatera Utara	71	95	15	181	14	40	7	61	85	135	22	242
9	Sumatera Barat	286	102	4	392	25	20	-	45	311	122	4	437
10	Riau	61	53	1	115	6	18	-	24	67	71	1	139
11	Kepulauan Riau	55	51	1	107	6	4	1	11	61	55	2	118
12	Jambi	47	35	4	86	7	1	1	9	54	36	5	95
13	Sumatera Selatan	110	98	17	225	29	48	1	78	139	146	18	303
14	Bangka Belitung	46	17	5	68	2	1	-	3	48	18	5	71
15	Bengkulu	15	10	3	28	-	-	-	-	15	10	3	28
16	Lampung	48	30	2	80	13	11	-	24	61	41	2	104
17	Kalimantan Barat	142	88	3	233	49	25	1	75	191	113	4	308
18	Kalimantan Tengah	35	18	4	57	12	9	1	22	47	27	5	79
19	Kalimantan Selatan	33	21	3	57	5	4	-	9	38	25	3	66
20	Kalimantan Timur	74	34	2	110	38	26	-	64	112	60	2	174
21	Kalimantan Utara	26	17	1	44	4	4	4	12	30	21	5	56
22	Sulawesi Utara	54	54	8	116	11	24	2	37	65	78	10	153
23	Gorontalo	48	27	1	76	14	20	-	34	62	47	1	110
24	Sulawesi Tengah	49	26	9	84	13	11	8	32	62	37	17	116
25	Sulawesi Selatan	137	80	32	249	42	33	21	96	179	113	53	345
26	Sulawesi Barat	3	7	4	14	-	4	-	4	3	11	4	18
27	Sulawesi Tenggara	43	47	87	177	25	22	74	121	68	69	161	298
28	Maluku	18	13	7	38	3	6	12	21	21	19	19	59
29	Maluku Utara	34	25	2	61	11	11	1	23	45	36	3	84
30	Bali	7	13	-	20	-	1	-	1	7	14	-	21
31	Nusa Tenggara Barat	85	88	25	198	45	46	11	102	130	134	36	300
32	Nusa Tenggara Timur	102	122	28	252	18	20	20	58	120	142	48	310
33	Papua	126	92	21	239	53	59	14	126	179	151	35	365
34	Papua Barat	54	30	2	86	19	14	2	35	73	44	4	121
Indonesia		2.824	2.024	352	5.200	686	727	209	1.622	5.510	2.751	561	6.822

PERKEMBANGAN JUMLAH SISWA MENGULANG MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

TREND OF NUMBER OF REPEATERS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2013/2014–2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	296	415	711	803	737	1.540	151	110	261
2	Jawa Barat	299	351	650	842	609	1.451	95	111	206
3	Banten	87	73	160	422	115	537	73	66	139
4	Jawa Tengah	295	517	812	898	801	1.699	92	101	193
5	DI Yogyakarta	89	91	180	337	124	461	14	59	73
6	Jawa Timur	317	436	753	697	790	1.487	299	554	853
7	Aceh	275	232	507	735	324	1.059	534	43	577
8	Sumatera Utara	229	265	494	755	471	1.226	108	134	242
9	Sumatera Barat	258	359	617	672	603	1.275	386	51	437
10	Riau	168	214	382	640	355	995	109	30	139
11	Kepulauan Riau	44	28	72	274	37	311	109	9	118
12	Jambi	89	102	191	348	158	506	76	19	95
13	Sumatera Selatan	151	181	332	586	306	892	134	169	303
14	Bangka Belitung	44	56	100	216	87	303	50	21	71
15	Bengkulu	52	54	106	201	92	293	23	5	28
16	Lampung	139	164	303	476	266	742	75	29	104
17	Kalimantan Barat	259	342	601	1.096	612	1.708	208	100	308
18	Kalimantan Tengah	71	55	126	249	59	308	67	12	79
19	Kalimantan Selatan	99	126	225	376	180	556	48	18	66
20	Kalimantan Timur	113	144	257	338	157	495	123	51	174
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	207	102	309	45	11	56
22	Sulawesi Utara	52	58	110	290	91	381	86	67	153
23	Gorontalo	54	31	85	242	43	285	92	18	110
24	Sulawesi Tengah	160	203	363	692	350	1.042	108	8	116
25	Sulawesi Selatan	246	319	565	719	487	1.206	194	151	345
26	Sulawesi Barat	61	63	124	234	95	329	18	-	18
27	Sulawesi Tenggara	94	114	208	428	189	617	147	151	298
28	Maluku	90	112	202	311	161	472	37	22	59
29	Maluku Utara	91	94	185	286	122	408	84	-	84
30	Bali	60	19	79	249	31	280	16	5	21
31	Nusa Tenggara Barat	160	204	364	511	250	761	122	178	300
32	Nusa Tenggara Timur	266	321	587	770	580	1.350	218	92	310
33	Papua	260	336	596	776	527	1.303	140	225	365
34	Papua Barat	69	80	149	327	134	461	76	45	121
Indonesia		5.037	6.159	11.196	17.003	10.045	27.048	4.157	2.665	6.822

Catatan / Note :

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT TIAP PROVINSI
NUMBER OF DROP-OUTS BY SEX, GRADE, AND PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL: NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Laki-laki/Male				Perempuan/Female				Laki2+Peremp./Male+Female			
		Tingkat/Grade		Subjml		Tingkat/Grade		Subjml		Tingkat/Grade		Jumlah	
		X	XI	XII	Sub Tot	X	XI	XII	Sub Tot	X	XI	XII	Total
1	DKI Jakarta	132	148	120	400	99	95	88	282	231	243	208	682
2	Jawa Barat	523	924	1.226	2.673	488	879	1.180	2.547	1.011	1.803	2.406	5.220
3	Banten	147	274	424	845	120	181	329	630	267	455	753	1.475
4	Jawa Tengah	292	401	592	1.285	288	321	518	1.127	580	722	1.110	2.412
5	DI Yogyakarta	28	56	60	144	27	35	58	120	55	91	118	264
6	Jawa Timur	415	720	1.320	2.455	311	600	1.316	2.227	726	1.320	2.636	4.682
7	Aceh	198	291	407	896	205	215	417	837	403	506	824	1.733
8	Sumatera Utara	480	679	1.153	2.312	435	494	1.054	1.983	915	1.173	2.207	4.295
9	Sumatera Barat	224	205	167	596	94	121	170	385	318	326	337	981
10	Riau	123	133	167	423	93	97	181	371	216	230	348	794
11	Kepulauan Riau	24	30	29	83	16	24	35	75	40	54	64	158
12	Jambi	39	71	95	205	32	49	104	185	71	120	199	390
13	Sumatera Selatan	201	260	593	1.054	167	235	554	956	368	495	1.147	2.010
14	Bangka Belitung	57	37	24	118	21	38	24	83	78	75	48	201
15	Bengkulu	50	62	150	262	31	50	118	199	81	112	268	461
16	Lampung	127	178	332	637	136	184	396	716	263	362	728	1.353
17	Kalimantan Barat	142	154	239	535	132	159	326	617	274	313	565	1.152
18	Kalimantan Tengah	49	69	122	240	34	62	150	246	83	131	272	486
19	Kalimantan Selatan	92	75	75	242	85	71	101	257	177	146	176	499
20	Kalimantan Timur	39	70	101	210	42	67	130	239	81	137	231	449
21	Kalimantan Utara	14	12	39	65	13	16	39	68	27	28	78	133
22	Sulawesi Utara	48	85	136	269	39	63	139	241	87	148	275	510
23	Gorontalo	22	33	83	138	16	37	91	144	38	70	174	282
24	Sulawesi Tengah	43	53	109	205	41	66	113	220	84	119	222	425
25	Sulawesi Selatan	181	276	661	1.118	146	249	646	1.041	327	525	1.307	2.159
26	Sulawesi Barat	19	62	80	161	12	60	105	177	31	122	185	338
27	Sulawesi Tenggara	110	165	342	617	109	155	352	616	219	320	694	1.233
28	Maluku	43	68	151	262	33	45	162	240	76	113	313	502
29	Maluku Utara	13	50	70	133	12	30	78	120	25	80	148	253
30	Bali	40	104	107	251	26	73	143	242	66	177	250	493
31	Nusa Tenggara Barat	95	232	606	933	88	212	562	862	183	444	1.168	1.795
32	Nusa Tenggara Timur	197	236	557	990	135	168	517	820	332	404	1.074	1.810
33	Papua	42	93	159	294	42	69	165	276	84	162	324	570
34	Papua Barat	39	30	58	127	28	36	63	127	67	66	121	254
Indonesia		4.288	6.336	10.554	21.178	3.596	5.256	10.424	19.276	7.884	11.592	20.978	40.454

PERKEMBANGAN SISWA PUTUS SEKOLAH TIAP PROVINSI
TREND OF DROP-OUTS BY PROVINCE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR: 2013/2014--2015/2016

No.	Provinsi Province	2012/13-2013/14	2013/14-2014/2015			2014/15-2015/2016		
			Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKIJakarta	1.638	587	663	1.250	225	457	682
2	Jawa Barat	3.062	4.231	3.940	8.171	2.173	3.047	5.220
3	Banten	1.487	1.176	1.339	2.515	553	922	1.475
4	Jawa Tengah	1.727	2.316	1.765	4.081	877	1.535	2.412
5	DIYogyakarta	612	158	159	317	95	169	264
6	Jawa Timur	4.281	2.754	3.412	6.166	1.401	3.281	4.682
7	Aceh	1.279	2.294	483	2.777	1.415	318	1.733
8	Sumatera Utara	3.781	3.143	2.596	5.739	1.815	2.480	4.295
9	Sumatera Barat	2.102	2.151	392	2.543	700	281	981
10	Riau	2.083	1.612	366	1.978	589	205	794
11	Kepulauan Riau	766	371	40	411	109	49	158
12	Jambi	1.050	676	122	798	315	75	390
13	Sumatera Selatan	1.149	2.535	1.078	3.613	1.090	920	2.010
14	Bangka Belitung	862	231	135	366	152	49	201
15	Bengkulu	1.275	723	44	767	381	80	461
16	Lampung	1.617	1.445	697	2.142	813	540	1.353
17	Kalimantan Barat	1.449	1.482	708	2.190	759	393	1.152
18	Kalimantan Tengah	1.187	1.070	169	1.239	396	90	486
19	Kalimantan Selatan	1.313	736	162	898	407	92	499
20	Kalimantan Timur	711	910	195	1.105	359	90	449
21	Kalimantan Utara	*)	125	42	167	98	35	133
22	Sulawesi Utara	836	686	231	917	339	171	510
23	Gorontalo	608	676	68	744	276	6	282
24	Sulawesi Tengah	1.172	1.247	202	1.449	353	72	425
25	Sulawesi Selatan	1.859	3.015	580	3.595	1.430	729	2.159
26	Sulawesi Barat	688	388	37	425	211	127	338
27	Sulawesi Tenggara	969	1.967	229	2.196	1.029	204	1.233
28	Maluku	1.285	687	240	927	367	135	502
29	Maluku Utara	639	531	164	695	165	88	253
30	Bali	1.249	463	347	810	244	249	493
31	Nusa Tenggara Barat	1.475	1.824	629	2.453	1.178	617	1.795
32	Nusa Tenggara Timur	2.197	1.958	1.240	3.198	1.085	725	1.810
33	Papua	981	629	244	873	331	239	570
34	Papua Barat	320	510	194	704	157	97	254
Indonesia		47.709	45.307	22.912	68.219	21.887	18.567	40.454

Catatan/Note:

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

JUMLAH PESERTA DAN LULUSAN MENURUT JENIS KELAMINTI A PROVINSI
NUMBER OF APPLICANTS AND GRADUATES BY SEX BY PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Peserta / Applicants			Lulusan / Graduates		
		Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	28.610	25.518	54.128	27.828	24.858	52.686
2	Jawa Barat	104.887	79.100	183.987	104.350	78.445	182.795
3	Bariten	30.255	24.351	54.606	29.178	23.594	52.772
4	Jawa Tengah	73.070	52.264	125.334	71.986	51.805	123.791
5	DI Yogyakarta	10.569	6.880	17.449	10.533	6.808	17.341
6	Jawa Timur	89.420	72.764	162.184	88.085	72.130	160.215
7	Aceh	23.639	26.114	49.753	23.061	25.793	48.854
8	Sumatera Utara	60.862	51.350	112.212	60.503	51.059	111.562
9	Sumatera Barat	31.363	17.697	49.060	30.962	17.604	48.566
10	Riau	24.863	22.749	47.612	24.505	22.369	46.874
11	Kepulauan Riau	6.096	5.877	11.973	5.735	5.729	11.464
12	Jambi	12.471	11.219	23.690	12.087	11.151	23.238
13	Sumatera Selatan	36.950	29.651	66.601	36.493	29.131	65.624
14	Bangka Belitung	4.019	2.741	6.760	3.867	2.657	6.524
15	Bengkulu	10.985	4.781	15.766	10.718	4.656	15.374
16	Lampung	25.653	20.863	46.516	25.365	20.671	46.036
17	Kalimantan Barat	17.994	16.807	34.801	17.656	16.623	34.279
18	Kalimantan Tengah	8.375	7.861	16.236	8.109	7.779	15.888
19	Kalimantan Selatan	9.776	8.652	18.428	9.381	8.481	17.862
20	Kalimantan Timur	10.978	8.926	19.904	10.720	8.812	19.532
21	Kalimantan Utara	2.649	2.101	4.750	2.618	2.091	4.709
22	Sulawesi Utara	9.057	8.162	17.219	8.857	7.951	16.808
23	Gorontalo	4.865	3.287	8.152	4.827	3.112	7.939
24	Sulawesi Tengah	10.198	10.307	20.505	9.955	10.160	20.115
25	Sulawesi Selatan	46.244	28.211	74.455	45.748	27.771	73.519
26	Sulawesi Barat	4.837	3.093	7.930	4.673	3.010	7.683
27	Sulawesi Tenggara	19.353	8.154	27.507	19.200	8.079	27.279
28	Maluku	11.967	10.376	22.343	11.403	10.227	21.630
29	Maluku Utara	6.557	5.488	12.045	6.316	5.389	11.705
30	Bali	12.906	12.837	25.743	12.767	12.692	25.459
31	Nusa Tenggara Barat	18.494	14.582	33.076	18.006	14.343	32.349
32	Nusa Tenggara Timur	25.743	24.028	49.771	25.590	23.420	49.010
33	Papua	8.996	8.383	17.379	8.839	8.214	17.053
34	Papua Barat	3.767	3.503	7.270	3.651	3.421	7.072
Indonesia		806.468	638.677	1.445.145	793.572	630.035	1.423.607

PERKEMBANGAN JUMLAH LULUSAN MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

TREND OF GRADUATES BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2013/2014–2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	32.055	32.861	64.916	33.913	34.766	68.679	31.102	21.584	52.686
2	Jawa Barat	108.998	67.900	176.898	115.318	71.836	187.154	126.031	56.764	182.795
3	Banten	25.228	20.408	45.636	26.691	21.591	48.282	33.929	18.843	52.772
4	Jawa Tengah	81.522	44.010	125.532	86.248	46.562	132.810	93.879	29.912	123.791
5	DI Yogyakarta	10.574	5.649	16.223	11.186	5.977	17.163	12.287	5.054	17.341
6	Jawa Timur	85.878	64.942	150.820	90.857	68.707	159.564	100.508	59.707	160.215
7	Aceh	49.984	3.500	53.484	52.881	3.703	56.584	44.036	4.818	48.854
8	Sumatera Utara	57.381	51.418	108.799	60.707	54.399	115.106	70.041	41.521	111.562
9	Sumatera Barat	37.700	6.062	43.762	39.886	6.413	46.299	44.091	4.475	48.566
10	Riau	27.782	8.283	36.065	29.393	8.763	38.156	39.802	7.072	46.874
11	Kepulauan Riau	9.136	1.511	10.647	9.665	1.598	11.263	10.010	1.454	11.464
12	Jambi	20.029	3.229	23.258	21.191	3.416	24.607	20.317	2.921	23.238
13	Sumatera Selatan	41.023	24.298	65.321	43.401	25.706	69.107	49.687	15.937	65.624
14	Bangka Belitung	5.280	1.814	7.094	5.586	1.919	7.505	5.397	1.127	6.524
15	Bengkulu	11.634	3.239	14.873	12.309	3.427	15.736	14.386	988	15.374
16	Lampung	23.679	15.956	39.635	25.052	16.881	41.933	33.374	12.662	46.036
17	Kalimantan Barat	18.342	9.595	27.937	19.405	10.151	29.556	24.706	9.573	34.279
18	Kalimantan Tengah	13.526	2.709	16.235	14.310	2.867	17.177	14.152	1.736	15.888
19	Kalimantan Selatan	13.499	3.301	16.800	14.282	3.492	17.774	15.988	1.874	17.862
20	Kalimantan Timur	17.401	5.749	23.150	18.410	6.082	24.492	16.792	2.740	19.532
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	6.222	2.201	8.423	3.877	832	4.709
22	Sulawesi Utara	11.924	4.104	16.028	12.615	4.342	16.957	12.471	4.337	16.808
23	Gorontalo	7.067	461	7.528	7.477	488	7.965	7.460	479	7.939
24	Sulawesi Tengah	15.620	1.845	17.465	16.525	1.952	18.477	18.600	1.515	20.115
25	Sulawesi Selatan	45.445	10.036	55.481	48.079	10.618	58.697	63.650	9.869	73.519
26	Sulawesi Barat	6.574	468	7.042	6.956	495	7.451	7.141	542	7.683
27	Sulawesi Tenggara	25.580	3.665	29.245	27.063	3.878	30.941	25.557	1.722	27.279
28	Maluku	14.106	5.013	19.119	14.923	5.304	20.227	17.185	4.445	21.630
29	Maluku Utara	7.804	2.119	9.923	8.256	2.242	10.498	10.117	1.588	11.705
30	Bali	16.369	7.543	23.912	17.318	7.980	25.298	18.753	6.706	25.459
31	Nusa Tenggara Barat	26.838	5.800	32.638	28.393	6.137	34.530	26.782	5.567	32.349
32	Nusa Tenggara Timur	20.903	15.719	36.622	22.115	16.630	38.745	35.165	13.845	49.010
33	Papua	8.702	5.145	13.847	9.206	5.443	14.649	11.824	5.229	17.053
34	Papua Barat	5.672	1.876	7.548	6.005	1.985	7.990	4.983	2.089	7.072
Indonesia		903.255	440.228	1.343.483	961.844	467.951	1.429.795	1.064.080	359.527	1.423.607

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR MENURUT TINGKAT TIAP PROVINSI
NUMBER OF CLASSES BY GRADE AND PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR: 2015/2016

No.	Provinsi Province	Tingkat / Grade			Jumlah Total
		X	XI	XII	
1	DKI Jakarta	1.856	1.737	1.803	5.396
2	Jawa Barat	6.470	5.944	5.643	18.057
3	Banten	1.863	1.766	1.650	5.279
4	Jawa Tengah	4.256	4.140	4.036	12.432
5	DI Yogyakarta	660	669	670	1.999
6	Jawa Timur	5.747	5.515	5.352	16.614
7	Aceh	1.826	1.734	1.675	5.235
8	Sumatera Utara	3.663	3.477	3.250	10.390
9	Sumatera Barat	1.653	1.580	1.533	4.766
10	Riau	1.642	1.578	1.482	4.702
11	Kepulauan Riau	426	408	387	1.221
12	Jambi	828	805	747	2.380
13	Sumatera Selatan	2.148	2.037	1.912	6.097
14	Bangka Belitung	273	257	243	773
15	Bengkulu	567	538	506	1.611
16	Lampung	1.650	1.542	1.489	4.681
17	Kalimantan Barat	1.227	1.165	1.094	3.486
18	Kalimantan Tengah	670	677	615	1.962
19	Kalimantan Selatan	721	695	641	2.057
20	Kalimantan Timur	795	737	686	2.218
21	Kalimantan Utara	179	183	169	531
22	Sulawesi Utara	694	736	693	2.123
23	Gorontalo	317	287	266	870
24	Sulawesi Tengah	791	752	689	2.232
25	Sulawesi Selatan	2.544	2.443	2.324	7.311
26	Sulawesi Barat	297	280	264	841
27	Sulawesi Tenggara	1.093	1.050	987	3.130
28	Maluku	829	863	815	2.507
29	Maluku Utara	462	474	432	1.368
30	Bali	900	851	838	2.589
31	Nusa Tenggara Barat	1.126	1.117	1.046	3.289
32	Nusa Tenggara Timur	1.991	1.984	1.874	5.849
33	Papua	647	655	631	1.933
34	Papua Barat	322	332	310	964
Indonesia		51.133	49.008	46.752	146.893

PERKEMBANGAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI
TREND OF CLASSES BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE
SMA/ GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2013/2014–2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	2.784	3.736	6.520	2.470	2.749	5.219	2.508	2.888	5.396
2	Jawa Barat	11.902	10.354	22.256	10.473	6.441	16.914	11.127	6.930	18.057
3	Banten	2.717	2.528	5.245	2.736	2.185	4.921	2.916	2.363	5.279
4	Jawa Tengah	9.681	7.645	17.326	8.459	3.573	12.032	8.770	3.662	12.432
5	DI Yogyakarta	1.177	996	2.173	1.280	729	2.009	1.283	716	1.999
6	Jawa Timur	8.851	6.025	14.876	9.271	6.770	16.041	9.536	7.078	16.614
7	Aceh	5.073	672	5.745	4.558	513	5.071	4.670	565	5.235
8	Sumatera Utara	6.219	3.979	10.198	5.946	4.001	9.947	6.292	4.098	10.390
9	Sumatera Barat	4.207	591	4.798	3.994	614	4.608	4.151	615	4.766
10	Riau	3.190	1.125	4.315	3.610	858	4.468	3.835	867	4.702
11	Kepulauan Riau	846	310	1.156	936	222	1.158	980	241	1.221
12	Jambi	2.020	479	2.499	1.967	360	2.327	2.041	339	2.380
13	Sumatera Selatan	3.898	2.749	6.647	4.129	1.808	5.937	4.384	1.713	6.097
14	Bangka Belitung	508	210	718	594	145	739	626	147	773
15	Bengkulu	1.361	397	1.758	1.356	159	1.515	1.456	155	1.611
16	Lampung	2.582	2.287	4.869	3.090	1.429	4.519	3.267	1.414	4.681
17	Kalimantan Barat	1.781	1.769	3.550	2.287	1.035	3.322	2.453	1.033	3.486
18	Kalimantan Tengah	1.393	321	1.714	1.560	301	1.861	1.669	293	1.962
19	Kalimantan Selatan	1.513	385	1.898	1.652	298	1.950	1.760	297	2.057
20	Kalimantan Timur	1.637	571	2.208	1.695	403	2.098	1.797	421	2.218
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	403	95	498	428	103	531
22	Sulawesi Utara	1.110	708	1.818	1.415	669	2.084	1.449	674	2.123
23	Gorontalo	699	153	852	744	55	799	816	54	870
24	Sulawesi Tengah	1.520	421	1.941	1.833	256	2.089	1.984	248	2.232
25	Sulawesi Selatan	4.518	1.638	6.156	5.581	1.358	6.939	5.918	1.393	7.311
26	Sulawesi Barat	699	189	888	749	60	809	780	61	841
27	Sulawesi Tenggara	1.972	505	2.477	2.682	277	2.959	2.840	290	3.130
28	Maluku	1.250	559	1.809	1.859	569	2.428	1.939	568	2.507
29	Maluku Utara	987	251	1.238	1.040	266	1.306	1.078	290	1.368
30	Bali	1.555	756	2.311	1.871	708	2.579	1.882	707	2.589
31	Nusa Tenggara Barat	2.678	676	3.354	2.489	704	3.193	2.591	698	3.289
32	Nusa Tenggara Timur	2.676	1.745	4.421	3.634	1.848	5.482	3.922	1.927	5.849
33	Papua	1.131	983	2.114	1.185	644	1.829	1.259	674	1.933
34	Papua Barat	539	258	797	596	322	918	652	312	964
Indonesia		94.674	55.971	150.645	98.144	42.424	140.568	103.059	43.834	146.893

Catatan / Note :

*) Masih tergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur / Including in Kalimantan Timur

JUMLAH RUANG KELAS MILIK MENURUT KONDISI DAN BUKAN MILIK TIAP PROVINSI
NUMBER OF OWNED CLASSROOMS BY CONDITION AND NOT-OWNED BY PROVINCE
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR: 2015/2016

No.	Provinsi Province	Milik/Owned					Sub Jumlah Sub Total	Bukan Milik Not-owned	Jumlah Total
		Baik Good	Rusak Ringan Minor Damage	Rusak Sedang Middle Damage	Rusak Berat Major Damage	Rusak Total Total Damage			
1	DKI Jakarta	3.332	2.035	21	7	51	5.446	31	5.477
2	Jawa Barat	8.385	7.651	576	361	370	17.343	918	18.261
3	Banten	2.638	2.072	244	131	134	5.219	270	5.489
4	Jawa Tengah	7.268	5.001	301	187	133	12.890	164	13.054
5	DI Yogyakarta	1.057	896	39	16	46	2.054	38	2.092
6	Jawa Timur	7.849	7.085	400	380	340	16.054	707	16.761
7	Aceh	1.905	2.939	280	209	76	5.409	151	5.560
8	Sumatera Utara	5.065	4.635	299	244	199	10.442	222	10.664
9	Sumatera Barat	2.435	1.965	88	128	63	4.679	89	4.768
10	Riau	2.349	2.067	143	97	54	4.710	173	4.883
11	Kepulauan Riau	660	430	27	40	67	1.224	30	1.254
12	Jambi	791	1.285	118	56	111	2.361	45	2.406
13	Sumatera Selatan	2.891	2.658	220	180	122	6.071	207	6.278
14	Bangka Belitung	484	276	7	7	16	790	3	793
15	Bengkulu	545	942	24	60	25	1.596	10	1.606
16	Lampung	1.908	2.370	162	169	85	4.694	108	4.802
17	Kalimantan Barat	1.636	1.471	101	130	78	3.416	110	3.526
18	Kalimantan Tengah	870	950	73	49	33	1.975	88	2.063
19	Kalimantan Selatan	1.129	895	28	5	25	2.082	42	2.124
20	Kalimantan Timur	1.144	879	29	11	56	2.119	132	2.251
21	Kalimantan Utara	194	247	11	3	8	463	26	489
22	Sulawesi Utara	919	980	90	44	26	2.059	91	2.150
23	Gorontalo	403	425	5	14	16	863	8	871
24	Sulawesi Tengah	893	958	81	94	62	2.088	91	2.179
25	Sulawesi Selatan	3.343	3.228	278	118	89	7.056	249	7.305
26	Sulawesi Barat	391	358	21	23	29	822	41	863
27	Sulawesi Tenggara	1.320	1.291	98	94	91	2.894	141	3.035
28	Maluku	678	1.211	125	115	106	2.235	206	2.441
29	Maluku Utara	432	651	59	72	46	1.260	92	1.352
30	Bali	1.453	883	18	18	55	2.427	85	2.512
31	Nusa Tenggara Barat	1.140	1.688	126	100	103	3.157	143	3.300
32	Nusa Tenggara Timur	1.604	2.409	321	278	394	5.006	722	5.728
33	Papua	583	1.101	58	48	53	1.843	44	1.887
34	Papua Barat	327	494	25	30	22	898	72	970
	Indonesia	68.021	64.426	4.496	3.518	3.184	143.645	5.549	149.194

PERKEMBANGAN JUMLAH RUANG KELAS MILIK NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI

TREND OF PUBLIC AND PRIVATE OWNED CLASSROOMS BY PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR: 2013/2014--2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	2.257	3.873	6.130	2.509	2.724	5.233	2.554	2.892	5.446
2	Jawa Barat	8.526	10.120	18.646	10.483	6.462	16.945	10.660	6.683	17.343
3	Banten	2.567	2.899	5.466	2.886	2.190	5.076	2.931	2.288	5.219
4	Jawa Tengah	8.440	12.361	20.801	8.804	3.896	12.700	9.012	3.878	12.890
5	DI Yogyakarta	1.258	1.019	2.277	1.304	697	2.001	1.306	748	2.054
6	Jawa Timur	8.906	5.107	14.013	9.455	6.459	15.914	9.527	6.527	16.054
7	Aceh	4.666	545	5.211	4.858	420	5.278	4.996	473	5.469
8	Sumatera Utara	5.492	3.603	9.095	6.017	4.088	10.105	6.206	4.236	10.442
9	Sumatera Barat	3.349	489	3.838	4.068	607	4.675	4.071	608	4.679
10	Riau	2.926	613	3.539	3.699	873	4.572	3.785	925	4.710
11	Kepulauan Riau	831	235	1.066	970	237	1.207	977	247	1.224
12	Jambi	1.678	380	2.058	2.003	336	2.339	2.031	330	2.361
13	Sumatera Selatan	3.109	1.891	5.000	4.155	1.857	6.012	4.228	1.843	6.071
14	Bangka Belitung	543	225	768	625	153	778	628	162	790
15	Bengkulu	1.212	396	1.608	1.434	166	1.600	1.430	166	1.596
16	Lampung	2.197	2.166	4.363	3.301	1.370	4.671	3.314	1.380	4.694
17	Kalimantan Barat	1.752	1.834	3.586	2.403	958	3.361	2.418	998	3.416
18	Kalimantan Tengah	1.133	321	1.454	1.667	267	1.934	1.704	271	1.975
19	Kalimantan Selatan	1.409	366	1.775	1.769	293	2.062	1.783	299	2.082
20	Kalimantan Timur	1.433	593	2.026	1.704	393	2.097	1.725	394	2.119
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	358	80	438	363	100	463
22	Sulawesi Utara	1.332	591	1.923	1.415	615	2.030	1.440	619	2.059
23	Gorontalo	604	122	726	809	54	863	809	54	863
24	Sulawesi Tengah	1.587	286	1.873	1.789	233	2.022	1.852	236	2.088
25	Sulawesi Selatan	3.530	1.447	4.977	5.722	1.234	6.956	5.733	1.323	7.056
26	Sulawesi Barat	388	50	438	754	60	814	761	61	822
27	Sulawesi Tenggara	1.457	336	1.793	2.591	225	2.816	2.666	228	2.894
28	Maluku	1.135	475	1.610	1.717	511	2.228	1.725	510	2.235
29	Maluku Utara	790	235	1.025	1.034	204	1.238	1.047	213	1.260
30	Bali	1.463	730	2.193	1.731	659	2.390	1.770	657	2.427
31	Nusa Tenggara Barat	1.577	677	2.254	2.517	688	3.205	2.495	662	3.157
32	Nusa Tenggara Timur	1.886	1.743	3.629	3.061	1.858	4.919	3.143	1.863	5.006
33	Papua	1.120	535	1.655	1.199	576	1.775	1.255	588	1.843
34	Papua Barat	426	245	671	574	292	866	601	297	898
Indonesia		80.979	56.508	137.487	99.385	41.735	141.120	100.886	42.759	143.645

Catatan/Note:

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

PERKEMBANGAN JUMLAH RUANG KELAS NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI

TREND OF PUBLIC AND PRIVATE CLASSROOMS BY PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2013/2014–2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	2.257	3.937	6.194	2.509	2.757	5.266	2.554	2.923	5.477
2	Jawa Barat	9.317	10.335	19.652	10.796	6.992	17.788	11.020	7.241	18.261
3	Banten	2.597	3.066	5.663	2.972	2.385	5.357	2.997	2.492	5.489
4	Jawa Tengah	8.611	12.496	21.107	8.862	3.994	12.856	9.073	3.981	13.054
5	DI Yogyakarta	1.258	1.030	2.288	1.325	715	2.040	1.329	763	2.092
6	Jawa Timur	8.997	5.394	14.391	9.514	7.042	16.556	9.596	7.165	16.761
7	Aceh	4.689	581	5.270	4.913	530	5.443	4.985	575	5.560
8	Sumatera Utara	5.546	3.726	9.272	6.109	4.196	10.305	6.327	4.337	10.664
9	Sumatera Barat	3.400	622	4.022	4.116	649	4.765	4.118	650	4.768
10	Riau	2.944	640	3.584	3.832	917	4.749	3.914	969	4.883
11	Kepulauan Riau	842	236	1.078	983	248	1.231	996	258	1.254
12	Jambi	1.820	411	2.231	2.006	372	2.378	2.034	372	2.406
13	Sumatera Selatan	3.194	2.029	5.223	4.231	1.969	6.200	4.321	1.957	6.278
14	Bangka Belitung	543	229	772	628	158	786	631	162	793
15	Bengkulu	1.296	399	1.695	1.441	169	1.610	1.437	169	1.606
16	Lampung	2.214	2.260	4.474	3.312	1.447	4.759	3.330	1.472	4.802
17	Kalimantan Barat	1.772	1.935	3.707	2.427	1.030	3.457	2.454	1.072	3.526
18	Kalimantan Tengah	1.143	354	1.497	1.727	312	2.039	1.735	328	2.063
19	Kalimantan Selatan	1.434	417	1.851	1.791	314	2.105	1.805	319	2.124
20	Kalimantan Timur	1.576	652	2.228	1.786	441	2.227	1.808	443	2.251
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	380	86	466	384	105	489
22	Sulawesi Utara	1.415	637	2.052	1.436	672	2.108	1.465	685	2.150
23	Gorontalo	609	125	734	814	54	868	817	54	871
24	Sulawesi Tengah	1.602	311	1.913	1.851	249	2.100	1.923	256	2.179
25	Sulawesi Selatan	3.561	1.493	5.054	5.858	1.339	7.197	5.858	1.447	7.305
26	Sulawesi Barat	388	88	476	780	64	844	797	66	863
27	Sulawesi Tenggara	1.515	358	1.873	2.664	286	2.950	2.753	282	3.035
28	Maluku	1.169	509	1.678	1.843	560	2.403	1.874	567	2.441
29	Maluku Utara	828	266	1.094	1.067	257	1.324	1.076	276	1.352
30	Bali	1.472	786	2.258	1.768	712	2.480	1.807	705	2.512
31	Nusa Tenggara Barat	1.622	748	2.370	2.604	737	3.341	2.587	713	3.300
32	Nusa Tenggara Timur	2.006	1.848	3.854	3.551	1.939	5.490	3.723	2.005	5.728
33	Papua	1.159	573	1.732	1.212	597	1.809	1.266	621	1.887
34	Papua Barat	433	267	700	602	308	910	651	319	970
Indonesia		83.229	58.758	141.987	101.710	44.497	146.207	103.445	45.749	149.194

Catatan / Note :

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / including in Kaltim

JUMLAH LABORATORIUM MENURUT JENIS TIAP PROVINSI

NUMBER OF LABORATORIES BY TYPE AND PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi <i>Province</i>	IPA <i>Science</i>	Biologi <i>Biology</i>	Kimia <i>Chemistry</i>	Fisika <i>Physics</i>	Bahasa <i>Language</i>	IPS <i>Social Sc.</i>	Komputer <i>Computer</i>	Multimedia <i>Multimedia</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	DKI Jakarta	142	230	233	239	179	57	208	49	1.337
2	Jawa Barat	396	428	396	408	319	62	706	131	2.846
3	Banten	169	110	100	101	84	6	226	31	827
4	Jawa Tengah	173	515	491	482	363	62	842	122	3.050
5	DI Yogyakarta	32	99	97	95	65	18	152	20	578
6	Jawa Timur	343	471	462	462	350	73	754	142	3.057
7	Aceh	172	172	171	164	113	12	480	50	1.334
8	Sumatera Utara	411	302	282	259	242	15	380	87	1.978
9	Sumatera Barat	79	127	113	126	32	2	234	14	727
10	Riau	105	133	113	125	55	2	270	17	820
11	Kepulauan Riau	43	37	32	35	27	1	80	15	270
12	Jambi	85	52	52	59	35	2	120	8	413
13	Sumatera Selatan	148	198	192	190	73	3	236	37	1.077
14	Bangka Belitung	18	44	44	40	19	1	64	9	239
15	Bengkulu	39	51	54	51	30	-	108	12	345
16	Lampung	141	130	120	121	70	41	232	42	897
17	Kalimantan Barat	99	110	95	107	26	1	212	13	663
18	Kalimantan Tengah	100	43	45	42	26	3	152	17	428
19	Kalimantan Selatan	57	66	74	53	66	3	130	14	463
20	Kalimantan Timur	66	57	65	59	83	4	144	17	495
21	Kalimantan Utara	17	8	13	7	9	-	34	5	93
22	Sulawesi Utara	75	65	51	57	21	5	110	12	396
23	Gorontalo	3	32	40	32	7	-	62	1	177
24	Sulawesi Tengah	77	57	43	56	17	-	124	5	379
25	Sulawesi Selatan	174	219	189	199	70	5	310	25	1.191
26	Sulawesi Barat	30	25	23	23	9	1	58	4	173
27	Sulawesi Tenggara	92	75	87	82	23	5	154	19	537
28	Maluku	69	70	55	65	17	4	128	11	419
29	Maluku Utara	67	37	20	38	8	2	76	5	253
30	Bali	39	80	77	81	58	11	136	23	505
31	Nusa Tenggara Barat	97	80	65	71	41	5	152	13	524
32	Nusa Tenggara Timur	120	87	87	71	51	1	136	22	575
33	Papua	66	51	45	44	27	3	104	8	348
34	Papua Barat	33	19	21	21	11	2	58	7	172
Indonesia		3.777	4.280	4.047	4.065	2.626	412	7.372	1.007	27.586

Catatan / Notes:

Social.Sc. = Social Science

PERKEMBANGAN JUMLAH LABORATORIUM NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI

TREND OF PUBLIC AND PRIVATE LABORATORIES BY PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2013/2014–2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014*)			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	586	1.078	1.664	485	818	1.303	505	832	1.337
2	Jawa Barat	1.254	1.575	2.829	1.344	1.234	2.578	1.497	1.349	2.846
3	Banten	295	563	858	339	400	739	406	421	827
4	Jawa Tengah	1.730	1.447	3.177	1.687	1.053	2.740	1.799	1.251	3.050
5	DI Yogyakarta	295	281	576	319	201	520	331	247	578
6	Jawa Timur	1.426	1.639	3.065	1.502	1.304	2.806	1.623	1.434	3.057
7	Aceh	692	122	814	855	90	945	1.022	312	1.334
8	Sumatera Utara	755	1.503	2.258	764	976	1.740	965	1.013	1.978
9	Sumatera Barat	492	135	627	473	77	550	546	181	727
10	Riau	347	67	414	463	159	622	562	258	820
11	Kepulauan Riau	141	79	220	149	63	212	179	91	270
12	Jambi	259	71	330	234	55	289	307	106	413
13	Sumatera Selatan	513	409	922	612	300	912	702	375	1.077
14	Bangka Belitung	143	59	202	164	40	204	171	68	239
15	Bengkulu	197	37	234	234	39	273	264	81	345
16	Lampung	406	341	747	526	262	788	579	318	897
17	Kalimantan Barat	328	187	515	384	132	516	465	198	663
18	Kalimantan Tengah	253	52	305	229	48	277	307	121	428
19	Kalimantan Selatan	254	63	317	307	55	362	347	116	463
20	Kalimantan Timur	286	149	435	306	85	391	357	138	495
21	Kalimantan Utara	**)	**)	**)	46	10	56	64	29	93
22	Sulawesi Utara	230	136	366	218	71	289	268	128	396
23	Gorontalo	106	11	117	133	9	142	138	39	177
24	Sulawesi Tengah	210	38	248	221	33	254	285	94	379
25	Sulawesi Selatan	745	694	1.439	741	199	940	816	375	1.191
26	Sulawesi Barat	92	10	102	103	5	108	139	34	173
27	Sulawesi Tenggara	220	34	254	327	46	373	418	119	537
28	Maluku	196	66	262	259	63	322	294	125	419
29	Maluku Utara	113	38	151	134	19	153	183	70	253
30	Bali	306	221	527	328	113	441	340	165	505
31	Nusa Tenggara Barat	314	88	402	302	78	380	375	149	524
32	Nusa Tenggara Timur	233	238	471	278	175	453	346	229	575
33	Papua	146	132	278	166	100	266	202	146	348
34	Papua Barat	70	39	109	78	43	121	102	70	172
Indonesia		13.633	11.602	25.235	14.710	8.355	23.065	16.904	10.682	27.586

Catatan/ Note:

*) Angka Revisi / Revised Figure

**) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

PERKEMBANGAN JUMLAH PERPUSTAKAAN NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI

TREND OF PUBLIC AND PRIVATE LIBRARIES BY PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2013/2014–2015/2016

No.	Provinsi Province	2013/2014 *)			2014/2015			2015/2016		
		Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	113	284	397	101	263	364	103	273	376
2	Jawa Barat	301	617	918	391	643	1.034	395	601	996
3	Banten	137	300	437	116	231	347	119	228	347
4	Jawa Tengah	346	465	811	346	403	749	359	389	748
5	DI Yogyakarta	66	89	155	71	84	155	73	83	156
6	Jawa Timur	396	840	1.236	392	679	1.071	399	617	1.016
7	Aceh	251	93	344	321	67	388	326	60	386
8	Sumatera Utara	282	398	680	307	458	765	315	448	763
9	Sumatera Barat	192	76	268	184	68	252	190	62	252
10	Riau	237	127	364	197	90	287	195	88	283
11	Kepulauan Riau	70	27	97	56	28	84	57	31	88
12	Jambi	128	45	173	123	37	160	130	36	166
13	Sumatera Selatan	273	251	524	274	195	469	276	189	465
14	Bangka Belitung	37	25	62	40	20	60	40	20	60
15	Bengkulu	90	30	120	91	27	118	91	26	117
16	Lampung	169	175	344	181	169	350	181	154	335
17	Kalimantan Barat	166	84	250	187	87	274	192	84	276
18	Kalimantan Tengah	45	23	68	140	35	175	138	35	173
19	Kalimantan Selatan	123	54	177	111	37	148	115	34	149
20	Kalimantan Timur	110	85	195	99	53	152	99	51	150
21	Kalimantan Utara	**)	**)	**)	28	11	39	30	11	41
22	Sulawesi Utara	94	81	175	89	70	159	92	65	157
23	Gorontalo	42	7	49	41	4	45	41	4	45
24	Sulawesi Tengah	123	23	146	106	24	130	109	24	133
25	Sulawesi Selatan	158	194	352	280	166	446	279	153	432
26	Sulawesi Barat	54	9	63	48	5	53	49	5	54
27	Sulawesi Tenggara	168	17	185	170	33	203	171	25	196
28	Maluku	101	74	175	106	45	151	108	41	149
29	Maluku Utara	84	48	132	93	31	124	90	25	115
30	Bali	74	84	158	73	68	141	75	63	138
31	Nusa Tenggara Barat	137	127	264	132	88	220	133	75	208
32	Nusa Tenggara Timur	129	159	288	185	110	295	179	107	286
33	Papua	102	88	190	74	53	127	76	52	128
34	Papua Barat	46	48	94	41	26	67	40	24	64
Indonesia		4.844	5.047	9.891	5.194	4.408	9.602	5.265	4.183	9.448

Catatan / Note :

*) Angka Revisi / Revised Figure

***) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

PERKEMBANGAN JUMLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
 TREND OF PUPILS OF GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
 TAHUN/ YEAR : 2003/2004-2015/2016

Tahun Year	SB		Tingkat/Grade		Lulusan Graduates	Jml Siswa Tot Pupils	Putus Sek. Drop-outs
	NE	X	XI	XII			
2003/04	1.139.742	1.145.277	1.103.593	1009.103		3.257.973	
			98,73%	98,70%	978.657 96,98%		62.089 19%
2004/05	1.176.740	1.182.595	1.130.727	1089.293		3.402.615	
			98,04%	97,97%	1.065.592 97,82%		53.441 157%
2005/06	1.222.049	1.230.206	1.159.474	1077.740		3.497.420	
			97,44%		61.652 1076.154 97,15%		176%
2006/07	1.268.243	1.276.105	1.185.984	1.129.757		3.591.846	
			97,69%	98,22%	1.043.095 92,33%		97.663 2,72%
2007/08	1.337.862	1.347.339	1.246.643	1.164.911		3.758.893	
			95,42%	98,98%	1.088.619 93,45%		127.720 3,40%
2008/09	1.328.683	1.337.651	1.285.679	1.233.915		3.857.245	
			96,87%	97,67%	1.163.207 94,27%		126.069 3,27%
2009/10	1.374.807	1.382.731	1.300.281	1.259.764		3.942.776	
			95,02%	98,18%	1.196.285 94,96%		139.999 3,55%
2010/11	1.498.647	1.506.166	1.318.342	1.280.631		4.105.139	
			96,04%	98,58%	1.274.186 99,50%		47.709 1,16%
2011/12	1.413.223	1.450.331	1.446.501	1.299.635		4.196.467	
			99,64%	99,21%	1.280.186 98,50%		42.471 1,0%
2012/13	1.399.050	1.454.920	1.445.114	1.372.826		4.272.860	
			99,63%	99,38%	1.343.483 97,86%		42.008 0,98%
2013/14	1.462.403	1.398.273	1.449.609	1.444.406		4.292.288	
			95,36%	99,69%	1.429.795 98,99%		68.219 1,59%
2014/15	1.435.549	1.454.099	1.333.327	1.445.146		4.232.572	
			99,41%	98,97%	1.423.607 98,51%		40.454 0,96%
2015/16	1.543.896	1.547.406	1.445.456	1.319.545		4.312.407	

ARUS SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
 FLOW OF PUPILS OF GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
 TAHUN / YEAR : 2009/2010-2015/2016

Tahun Year	Siswa Baru New Entrants		Tingkat / Grade			Iml. Siswa Graduates	Mengulang Repeaters	Putus Sek. Drop-outs
	X	Y	XI	XII	III			
09/10	1.374.807	1.382.731	1.300.281	1.259.764	3.942.776			3,5%
		443%	148%	472%				
		61.272	19.298	59.429				139.999
		0,54%	0,34%	0,32%				0,4%
		7.519	4.402	4.050				15.971
		95,02%	98,18%					
		1.313.940	1.276.581	1.196.285				
10/11	1.498.647	1.506.166	1.318.342	1.280.681	4.105.139			1,1%
		1,63%	1,73%	0,03%				
		24.520	22.757	432				47.709
		0,47%	0,15%	0,47%				1,10%
		37.108	1.963	603				45.084
		97,90%	98,12%					
		1.444.538	1.293.622	1.274.186				
11/12	1.413.223	1.450.381	1.446.501	1.299.635	4.196.467			1,0%
		0,97%	0,82%	1,28%				
		13.842	12.037	16.592				42.471
		0,48%	0,17%	0,22%				0,27%
		5.870	2.495	2.857				11.222
		98,6%	99,02%					
		1.400.619	1.461.969	1.280.186				
12/13	1.399.050	1.454.920	1.445.111	1.372.826	4.272.860			0,98%
		0,48%	0,68%	1,77%				
		6.503	9.553	25.952				42.008
		0,41%	0,17%	0,37%				0,26%
		5.870	2.495	5.358				11.196
		98,6%	99,02%					
		1.400.619	1.274.449	1.343.483				
13/14	1.462.403	1.398.273	1.449.609	1.444.406	4.292.288			1,59%
		2,09%	1,80%	0,88%				
		30.712	24.815	12.692				68.219
		1,26%	0,48%	0,13%				0,63%
		18.550	6.579	1.919				27.048
		96,64%	97,72%					
		1.419.011	1.348.215	1.429.795				
14/15	1.435.549	1.454.099	1.333.327	1.445.116	4.232.572			0,96%
		0,54%	0,87%	1,45%				
		7.884	11.592	20.978				40.454
		0,34%	0,22%	0,04%				0,18%
		3.510	2.751	561				6.822
		99,22%	98,92%					
		1.442.705	1.318.984	1.423.607				
15/16	1.543.806	1.547.406	1.445.456	1.319.545	4.312.407			

catatan/Notes:

1. Mengulang/Repeaters, d: Putus Sekolah/Drop-outs, p: Naik Tingkat/Promot to, g: ulu-On/Graduates
2. Siswa Baru / New Entrants Siswa Tingkat XI / Pupils in Grade XI - Mengulang Tingkat XI Repeaters in Grade XI
3. Siswa Naik Tingkat XI / Promotion to Grade XI * Siswa Tingkat XII / Pupils Grade XII - Mengulang Tingkat XI Repeaters in Grade XI
4. r16*(e)16+d 180016

KOHORT SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
 COHORT OF PUPILS OF GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
 TAHUN / YEAR :2003/2004-2015/2016

Tahun Year	Tingkat/Grade			Iulusan Graduatts
	I	XI	XII	
2003/04	100 1145.277			
2004/05	100 1.182.595	99 1.130.727		
2005/06	100 1230.206	98 1159.474	97	94 1076.154
2006/07	100 1276.105	96 1185.984	6 1129.757	88 1043.095
2007/08	100 1347.339	98 1246.643	95 1164.911	88 1088.619
2008/09	100 1337.651	95 1.285.679	97 1233.915	91 1163.207
2009/10	100 1382.731	97 1300.281	94 1259.764	89 1196.285
2010/11	100 1506.166	95 1318.342	96	95 1274.186
2011/12	100 1450.331	96 1446.501	4 1299.635	93 1280.186
2012/13	100 1454.920	100 1445.114	91 1372.826	89 1343.483
2013/14	100 1398.273	100 1449.609	100 1444.406	99 1429.795
2014/15	100 1.454.099	95 1.333.327	99 1.445.146	98 1.423.607
2015/16	100 1547.406	99 1445.456	94 1319.545	

No. Jenis Indikator TyP of Ind. colors	Nilai Indikator Value of Ind. colors			
1. Angka Menaulans / Retention Rate	Siswa / Pupils 2014/2015 4.232572	Mencuan 1 RetP/Oler 6822	Angka Menaulans Retention Rate 0,16	
2. Angka Putus Sekolah / Drop-out rate	Siswa / Pupils 2014/2015 432572	Putus Sek. Drop-outs 40.454	Angka Putus Sek. Drop-outs Rate 0,96	
3. Angka Lulusan / Completion Rate	Siswa Tk. XII H/15 Pupils GrXII 14/15 1445146	Lulusan Graduates 423.607	Angka Lulusan Completion Rate 98,51	
4. Persentase Guru Tidak Tetap terhadap KS dan Guru / PTD (Integritas of Part-time Teachers to Headmasters & Teachers)	KS dan Guru Headmasters & Teachers 295.902	Guru Tidak Tetap Part-Time Teachers 79353	% Guru TTD of PTD Teachers 26,82	
5. Persentase Kualitas Menajar terhadap KS dan Guru seluruhnya / Percentage of Quality of Headmaster and Teachers to Total Teachers	KS dan Guru Headmasters & Teachers 295.902	KS & Guru Layak Quality Teachers 282612	% Guru Layak of Quality Teachers 9,551	
6. Persentase Kepala Sekolah Perempuan terhadap Kepala Sekolah / PTD (Integritas of Female Headmasters to Headmasters)	Kepala Sekolah Headmasters 12.689	Kepsek Perempuan Female Headmasters 5921	% Kepsek Perempuan of Female Headmasters 46,66	
7. Persentase Ruangan Kelas Baik terhadap Ruangan Kelas / PTD (Integritas of Good Classroom to Classroom)	Ruangan Kelas Classrooms 13645	Ruang Kelas Baik Good Classroom 6802.1	% Ruangan Kelas Baik of Good Classrooms 4,735	
8. Persentase Laboratorium terhadap Sekolah / PTD (Integritas of Laboratories to Schools)	Sekolah / Schools 12.689	Lab / Laboratories 27586 Biologi/Biology 3777 Kimia/ Chemistry 480 Fisika/ Physics 4047 Bahasa/ Language 4065 Komputer/ Computer 412 Mutl Medis/ Multimedial 2626	% Lab/Lab 29,77 3,33 3,189 32,04 3,25 2,90	
9. Persentase Perpustakaan terhadap Sekolah / PTD (Integritas of Libraries to Schools)	Sekolah / Schools 12.689	Perpustakaan Libraries 9.4411	% Perpustakaan Libraries 74,46	
Rasio Pendidikan / Educational Ratios				
1. Siswa per Sekolah / Pupils to Schools	Negeri Public 500	Swasta Private 180	Rata-rata Average 340	
2. Siswa per Rombongan Belajar / Pupils to classes	31	26	29	
3. Siswa per KS & Guru / Pupils to HM & Teachers	15	13	15	
4. Rombongan Belajar per Sekolah / Class to Schools	15,22	6,92	11,58	
5. Rombongan Belajar per Ruangan Kelas Milik Classes to Classroom		1,03	1,02	
6. Rombongan Belajar per KS & Guru / Class to HM & Teachers	0,49	0,50	60	
7. KS & Guru per Sekolah / Headmaster & Teachers to Schools	33	14	23	
Tingkat/ Grade				
8. Siswa per Sekolah per Tingkat Pupils to Schools by Grade	X 22	XI 114	XII 104	Rata-rata Average 340
9. Siswa per Kelas per Tingkat Pupils to Class by Grade	30	29	28	29

ANGKA MENGULANG MENURUT TINGKAT TIAP PROVINSI

REPEATERS BY GRADE AND PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Tingkat / Grade			Rata-rata Average
		X	XI	XII	
1	DKI Jakarta	0,27	0,23	0,01	0,17
2	Jawa Barat	0,06	0,04	0,00	0,04
3	Banten	0,15	0,10	0,01	0,09
4	Jawa Tengah	0,08	0,08	0,00	0,05
5	DI Yogyakarta	0,20	0,18	0,04	0,14
6	Jawa Timur	0,28	0,22	0,02	0,18
7	Aceh	0,69	0,51	0,07	0,42
8	Sumatera Utara	0,07	0,12	0,02	0,07
9	Sumatera Barat	0,68	0,27	0,01	0,32
10	Riau	0,15	0,16	0,00	0,10
11	Kepulauan Riau	0,52	0,49	0,02	0,35
12	Jambi	0,23	0,16	0,02	0,14
13	Sumatera Selatan	0,21	0,23	0,03	0,16
14	Bangka Belitung	0,62	0,25	0,08	0,34
15	Bengkulu	0,10	0,07	0,02	0,06
16	Lampung	0,13	0,09	0,00	0,08
17	Kalimantan Barat	0,53	0,33	0,01	0,30
18	Kalimantan Tengah	0,28	0,17	0,03	0,17
19	Kalimantan Selatan	0,19	0,14	0,02	0,12
20	Kalimantan Timur	0,53	0,29	0,01	0,29
21	Kalimantan Utara	0,62	0,46	0,11	0,40
22	Sulawesi Utara	0,37	0,45	0,06	0,30
23	Gorontalo	0,75	0,59	0,01	0,47
24	Sulawesi Tengah	0,29	0,18	0,09	0,19
25	Sulawesi Selatan	0,24	0,16	0,08	0,16
26	Sulawesi Barat	0,03	0,13	0,06	0,07
27	Sulawesi Tenggara	0,24	0,26	0,63	0,37
28	Maluku	0,10	0,09	0,09	0,09
29	Maluku Utara	0,39	0,32	0,03	0,25
30	Bali	0,03	0,05	0,00	0,03
31	Nusa Tenggara Barat	0,37	0,41	0,11	0,30
32	Nusa Tenggara Timur	0,22	0,27	0,10	0,20
33	Papua	1,02	0,89	0,22	0,72
34	Papua Barat	0,88	0,56	0,06	0,53
Indonesia		0,24	0,20	0,04	0,16

Catatan:

Angka mengulang dihitung dari jumlah mengulang menurut tingkat dibagi dengan jumlah siswa menurut tingkat tahun sebelumnya dikalikan dengan 100

Repetition rates are calculated by number of repeaters by grade divided by number of pupils by grade, previous academic year, and multiply by 100

PERKEMBANGAN ANGKA MENGULANG MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

TREND OF REPEATERS RATE BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR: 2011/2012 – 2015/2016

No.	Provinsi Province	2012/13		2013/14		2014/15		2015/16	
		Jml./No.	%	Jml./No.	%	Jml./No.	%	Jml./No.	%
1	DKI Jakarta	755	0,40	711	0,38	1.540	0,84	261	0,17
2	Jawa Barat	645	0,11	650	0,11	1.451	0,26	206	0,04
3	Banten	139	0,09	160	0,10	537	0,34	139	0,09
4	Jawa Tengah	822	0,21	812	0,20	1.699	0,42	193	0,05
5	DI Yogyakarta	157	0,30	180	0,34	461	0,87	73	0,14
6	Jawa Timur	883	0,18	753	0,15	1.487	0,30	853	0,18
7	Aceh	879	0,57	507	0,32	1.059	0,69	577	0,42
8	Sumatera Utara	546	0,16	494	0,14	1.226	0,36	242	0,07
9	Sumatera Barat	558	0,43	617	0,47	1.275	0,97	437	0,32
10	Riau	332	0,29	382	0,32	995	0,83	139	0,10
11	Kepulauan Riau	63	0,22	72	0,21	311	0,90	118	0,35
12	Jambi	166	0,25	191	0,27	506	0,75	95	0,14
13	Sumatera Selatan	293	0,15	332	0,17	892	0,44	303	0,16
14	Bangka Belitung	87	0,42	100	0,47	303	1,41	71	0,34
15	Bengkulu	92	0,21	106	0,23	293	0,61	28	0,06
16	Lampung	264	0,22	303	0,25	742	0,59	104	0,08
17	Kalimantan Barat	587	0,63	601	0,63	1.708	1,74	308	0,30
18	Kalimantan Tengah	110	0,23	126	0,26	308	0,65	79	0,17
19	Kalimantan Selatan	196	0,38	225	0,41	556	1,00	66	0,12
20	Kalimantan Timur	224	0,33	257	0,35	495	0,67	174	0,29
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	*)	309	3	56	0,49
22	Sulawesi Utara	96	0,19	110	0,21	381	0,73	153	0,30
23	Gorontalo	74	0,37	85	0,41	285	1,45	110	0,47
24	Sulawesi Tengah	316	0,56	363	0,63	1.042	1,79	116	0,19
25	Sulawesi Selatan	496	0,27	565	0,30	1.206	0,60	345	0,16
26	Sulawesi Barat	108	0,50	124	0,54	329	1,44	18	0,07
27	Sulawesi Tenggara	181	0,24	208	0,26	617	0,80	298	0,37
28	Maluku	176	0,29	202	0,32	472	0,76	59	0,09
29	Maluku Utara	161	0,53	185	0,59	408	1,20	84	0,25
30	Bali	69	0,09	79	0,10	280	0,33	21	0,03
31	Nusa Tenggara Barat	317	0,32	364	0,36	761	0,77	300	0,30
32	Nusa Tenggara Timur	780	0,65	587	0,48	1.350	1,05	310	0,20
33	Papua	520	1,15	596	1,27	1.303	2,66	365	0,72
34	Papua Barat	130	0,57	149	0,62	461	1,97	121	0,53
Indonesia		11.222	0,27	11.196	0,26	27.048	0,63	6.822	0,16

Catatan / Note:

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

ANGKA PUTUS SEKOLAH MENURUT TINGKAT TIAP PROVINSI
DROP-OUTS RATES BY GRADE AND PROVINCE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Tingkat / Grade			Rata-rata Average
		X	XI	XII	
1	DKI Jakarta	0,47	0,46	0,41	0,44
2	Jawa Barat	0,53	0,96	1,39	0,95
3	Banten	0,49	0,88	1,52	0,95
4	Jawa Tengah	0,47	0,59	0,94	0,66
5	DI Yogyakarta	0,32	0,52	0,72	0,52
6	Jawa Timur	0,44	0,80	1,74	0,97
7	Aceh	0,89	1,12	1,78	1,27
8	Sumatera Utara	0,78	1,06	2,10	1,29
9	Sumatera Barat	0,70	0,72	0,74	0,72
10	Riau	0,47	0,51	0,79	0,59
11	Kepulauan Riau	0,34	0,49	0,59	0,47
12	Jambi	0,30	0,53	0,91	0,57
13	Sumatera Selatan	0,56	0,77	1,86	1,05
14	Bangka Belitung	1,00	1,06	0,78	0,96
15	Bengkulu	0,54	0,76	1,84	1,04
16	Lampung	0,57	0,80	1,66	1,00
17	Kalimantan Barat	0,76	0,90	1,75	1,11
18	Kalimantan Tengah	0,49	0,82	1,81	1,02
19	Kalimantan Selatan	0,91	0,80	1,05	0,92
20	Kalimantan Timur	0,38	0,66	1,26	0,74
21	Kalimantan Utara	0,56	0,61	1,75	0,96
22	Sulawesi Utara	0,49	0,86	1,74	1,00
23	Gorontalo	0,46	0,88	2,33	1,19
24	Sulawesi Tengah	0,39	0,58	1,16	0,70
25	Sulawesi Selatan	0,45	0,74	1,88	1,01
26	Sulawesi Barat	0,35	1,48	2,55	1,39
27	Sulawesi Tenggara	0,78	1,20	2,70	1,53
28	Maluku	0,35	0,53	1,54	0,79
29	Maluku Utara	0,22	0,71	1,34	0,75
30	Bali	0,24	0,67	0,98	0,62
31	Nusa Tenggara Barat	0,52	1,34	3,64	1,78
32	Nusa Tenggara Timur	0,61	0,77	2,25	1,17
33	Papua	0,48	0,95	2,02	1,13
34	Papua Barat	0,81	0,85	1,81	1,12
Indonesia		0,54	0,81	1,55	0,96

Catatan/Notes:

Angka putus sekolah dihitung dari jumlah putus sekolah menurut tingkat dibagi dengan jumlah

siswa menurut tingkat tahun sebelumnya dikalikan dengan 100

Drop Outs rates are calculated by number of Drop Outs by grade divided by number of pupils by grade, previous academic year, and multiply by 100

PERKEMBANGAN ANGKA PUTUS SEKOLAH TIAP PROVINSI
TREND OF REPETITION RATE BY PROVINCE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2012/2013--2015/2016

No.	Provinsi <i>Province</i>	2011/12-- 2012/13		2012/13--2013/14		2013/14--2014/15		2014/15--2015/16	
		Jml./No.	%	Jml./ No.	%	Jml./No.	%	Jml./No.	%
1	DKI Jakarta	1.592	0,85	1.807	0,96	1.250	0,68	682	0,44
2	Jawa Barat	2.941	0,52	2.632	0,46	8.171	1,44	5.220	0,95
3	Banten	1.312	0,89	1.373	0,90	2.515	1,60	1.475	0,95
4	Jawa Tengah	1.638	0,41	2.141	0,53	4.081	1,02	2.412	0,66
5	DI Yogyakarta	533	1,03	518	0,98	317	0,60	264	0,52
6	Jawa Timur	4.176	0,84	3.599	0,73	6.166	1,25	4.682	0,97
7	Aceh	1.045	0,67	939	0,59	2.777	1,80	1.733	1,27
8	Sumatera Utara	3.676	1,07	3.226	0,93	5.739	1,66	4.295	1,29
9	Sumatera Barat	1.818	1,41	889	0,67	2.543	1,93	981	0,72
10	Riau	1.978	1,71	1.384	1,17	1.978	1,66	794	0,59
11	Kepulauan Riau	539	1,92	567	1,69	411	1,19	158	0,47
12	Jambi	794	1,19	2.090	2,95	798	1,18	390	0,57
13	Sumatera Selatan	829	0,43	567	0,28	3.613	1,79	2.010	1,05
14	Bangka Belitung	515	2,50	950	4,50	366	1,71	201	0,96
15	Bengkulu	990	2,23	504	1,10	767	1,59	461	1,04
16	Lampung	1.483	1,22	1.646	1,34	2.142	1,70	1.353	1,00
17	Kalimantan Barat	1.361	1,46	1.321	1,39	2.190	2,23	1.152	1,11
18	Kalimantan Tengah	1.041	2,17	1.361	2,82	1.239	2,61	486	1,02
19	Kalimantan Selatan	1.143	2,21	912	1,67	898	1,62	499	0,92
20	Kalimantan Timur	427	0,62	1.932	2,63	1.105	1,78	449	0,74
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	*)	167	1	133	0,96
22	Sulawesi Utara	501	0,98	744	1,44	917	1,76	510	1,00
23	Gorontalo	580	2,93	839	4,05	744	3,79	282	1,19
24	Sulawesi Tengah	1.073	1,89	1.496	2,60	1.449	2,50	425	0,70
25	Sulawesi Selatan	1.856	1,00	1.063	0,56	3.595	1,80	2.159	1,01
26	Sulawesi Barat	606	2,79	1.440	6,29	425	1,86	338	1,39
27	Sulawesi Tenggara	874	1,14	512	0,64	2.196	2,84	1.233	1,53
28	Maluku	1.161	1,90	823	1,32	927	1,48	502	0,79
29	Maluku Utara	431	1,43	790	2,50	695	2,04	253	0,75
30	Bali	1.053	1,31	767	0,95	810	0,97	493	0,62
31	Nusa Tenggara Barat	1.258	1,28	816	0,81	2.453	2,47	1.795	1,78
32	Nusa Tenggara Timur	2.154	1,80	1.165	0,95	3.198	2,49	1.810	1,17
33	Papua	945	2,08	731	1,56	873	1,78	570	1,13
34	Papua Barat	148	0,65	464	1,95	704	3,01	254	1,12
Indonesia		42.471	1,01	42.008	0,98	68.219	1,59	40.454	0,96

Catatan

/Note:

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

ANJKA LULUSAN MENURUT STATUS SEKOLAH TAP PROVINSI
 COMPLETION RATE BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE
 SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
 TAHUN / YEAR: 2015/2016

No. Prov/Inst	Negeri/Public			Swasta/Private			Jumlah/ Total		
	Swasta/Inst	Lulusan	%	Swasta/Inst	Lulusan	%	Swasta/Inst	Lulusan	%
1 OKU Jakarta	31.212	31.102	99,65	22.916	21.584	94,19	54.128	52.686	97,34
2 Jawa Barat	126.656	126.031	99,51	57.331	56.764	99,01	183.987	182.795	99,35
3 Banten	34.363	33.929	98,74	20.243	18.843	93,08	54.606	52.772	96,64
4 Jawa Tengah	94.674	93.879	99,16	30.660	29.912	97,56	125.334	123.791	98,77
5 DI Yogyakarta	12.318	12.287	99,77	5.131	5.054	98,50	17.449	17.341	99,38
6 Jawa Timur	101.779	100.508	98,75	60.405	59.707	98,84	162.184	160.215	98,79
7 Aceh	44.672	44.036	98,56	5.081	4.818	94,82	49.753	48.854	98,19
8 Sumatera Utara	70.411	70.041	99,47	41.801	41.521	99,33	112.212	111.562	99,42
9 Sumatera Barat	44.517	44.091	99,04	4.543	4.475	98,50	49.060	48.566	98,99
10 Riau	40.293	39.802	98,76	7.319	7.072	96,63	47.612	46.874	98,45
11 Kepulauan Riau	10.426	10.010	96,01	1.547	1.454	93,99	11.973	11.464	95,75
12 Jambi	20.667	20.317	98,31	3.023	2.921	96,63	23.690	23.238	98,09
13 Sumatera Selatan	49.794	49.687	99,79	16.807	15.937	94,82	66.601	65.624	98,53
14 Bangka Belitung	5.582	5.397	96,69	1.178	1.127	95,67	6.760	6.524	96,51
15 Bengkulu	14.705	14.386	97,83	1.061	988	93,12	15.766	15.374	97,51
16 Lampung	33.787	33.374	98,76	12.729	12.662	99,47	46.516	46.036	98,97
17 Kalimantan Barat	24.894	24.706	99,24	9.907	9.573	96,63	34.801	34.279	98,50
18 Kalimantan Tengah	14.405	14.152	98,24	1.831	1.736	94,81	16.236	15.888	97,86
19 Kalimantan Selatan	16.471	15.988	97,07	1.957	1.874	95,76	18.428	17.862	96,93
20 Kalimantan Timur	16.960	16.792	99,01	2.944	2.740	93,07	19.904	19.532	98,13
21 Kalimantan Utara	3.913	3.877	99,06	837	832	99,40	4.750	4.709	99,14
22 Sulawesi Utara	12.560	12.471	99,29	4.659	4.337	93,09	17.219	16.808	97,61
23 Gorontalo	7.646	7.460	97,57	506	479	94,66	8.152	7.939	97,39
24 Sulawesi Tengah	18.878	18.600	98,53	1.627	1.515	93,12	20.505	20.115	98,10
25 Sulawesi Selatan	63.950	63.650	99,53	10.505	9.869	93,95	74.455	73.519	98,74
26 Sulawesi Barat	7.369	7.141	96,91	561	542	96,61	7.930	7.683	96,89
27 Sulawesi Tenggara	25.742	25.557	99,26	1.765	1.722	97,56	27.507	27.279	99,17
28 Maluku	17.611	17.185	97,56	4.732	4.445	93,93	22.343	21.630	96,81
29 Maluku Utara	10.339	10.117	97,87	1.706	1.588	93,08	12.045	11.705	97,18
30 Bali	18.905	18.753	99,20	6.838	6.706	98,07	25.743	25.459	98,90
31 Nusa Tenggara Barat	27.244	26.782	98,30	5.832	5.567	95,46	33.076	32.349	97,80
32 Nusa Tenggara Timur	35.205	35.165	99,89	14.566	13.845	95,05	49.771	49.010	98,47
33 Papua	11.968	11.824	98,80	5.411	5.229	96,64	17.379	17.053	98,12
34 Papua Barat	5.089	4.983	97,92	2.181	2.089	95,78	7.270	7.072	97,28
Indonesia	1075005	1064080	98,98	370140	359527	97,13	1445145	1423607	98,51

catatan / Notes:

Angka lulusan dihitung dari jumlah lulusan tahun tertentu dibagi dengan jumlah siswa tingkat 12 tahun sebelumnya dikalikan dengan 100

Completion rates are calculated by number of graduates in a certain academic year divided by number of pupils in grade 12 in previous academic year and multiply by 100

PERKEMBANGAN ANGKA LULUSAN TIAP PROVINSI
TREND OF COMPLETION RATE BY PROVINCE
SMA/ GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2012/2013–2015/2016

No.	Provinsi Province	2012/13		2013/14		2014/15		2015/16	
		Jml./No.	%	Jml./No.	%	Jml./No.	%	Jml./No.	%
1	DKI Jakarta	49.320	99,23	64.916	98,25	68.679	99,35	52.686	97,34
2	Jawa Barat	184.543	99,64	176.898	97,65	187.154	99,03	182.795	99,35
3	Banten	43.424	98,74	45.636	97,15	48.282	99,18	52.772	96,64
4	Jawa Tengah	118.465	99,23	125.532	98,75	132.810	99,76	123.791	98,77
5	DI Yogyakarta	14.672	96,44	16.223	97,25	17.163	99,85	17.341	99,38
6	Jawa Timur	154.462	99,46	150.820	97,28	159.564	99,90	160.215	98,79
7	Aceh	45.375	98,39	53.484	96,25	56.584	99,21	48.854	98,19
8	Sumatera Utara	104.070	98,92	108.799	97,82	115.106	98,88	111.562	99,42
9	Sumatera Barat	36.655	99,65	43.762	98,56	46.299	98,46	48.566	98,99
10	Riau	37.245	97,78	36.065	98,25	38.156	98,92	46.874	98,45
11	Kepulauan Riau	5.336	87,20	10.647	97,45	11.263	98,56	11.464	95,75
12	Jambi	18.017	96,16	23.258	98,77	24.607	99,89	23.238	98,09
13	Sumatera Selatan	55.106	98,31	65.321	98,25	69.107	98,24	65.624	98,53
14	Bangka Belitung	5.074	89,79	7.094	97,24	7.505	98,01	6.524	96,51
15	Bengkulu	12.100	93,84	14.873	96,99	15.736	99,74	15.374	97,51
16	Lampung	37.296	99,12	39.635	98,34	41.933	98,21	46.036	98,97
17	Kalimantan Barat	30.530	96,89	27.937	97,28	29.556	97,26	34.279	98,50
18	Kalimantan Tengah	13.504	94,40	16.235	98,12	17.177	98,44	15.888	97,86
19	Kalimantan Selatan	14.638	98,07	16.800	98,76	17.774	98,19	17.862	96,93
20	Kalimantan Timur	19.445	96,35	23.150	98,23	24.492	98,04	19.532	98,13
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	*)	8.423	99,2	4.709	99,14
22	Sulawesi Utara	16.748	99,34	16.028	98,14	16.957	98,78	16.808	97,61
23	Gorontalo	4.829	92,53	7.528	97,56	7.965	98,33	7.939	97,39
24	Sulawesi Tengah	18.251	95,18	17.465	98,25	18.477	99,29	20.115	98,10
25	Sulawesi Selatan	64.911	98,93	55.481	98,28	58.697	98,84	73.519	98,74
26	Sulawesi Barat	6.118	95,49	7.042	97,86	7.451	99,31	7.683	96,89
27	Sulawesi Tenggara	20.440	99,46	29.245	98,63	30.941	98,58	27.279	99,17
28	Maluku	19.170	96,96	19.119	97,89	20.227	97,49	21.630	96,81
29	Maluku Utara	9.929	95,90	9.923	97,36	10.498	98,77	11.705	97,18
30	Bali	26.170	99,45	23.912	98,12	25.298	99,43	25.459	98,90
31	Nusa Tenggara Barat	30.308	98,25	32.638	98,63	34.530	98,42	32.349	97,80
32	Nusa Tenggara Timur	41.076	98,57	36.622	97,25	38.745	98,67	49.010	98,47
33	Papua	14.889	96,90	13.847	96,52	14.649	97,11	17.053	98,12
34	Papua Barat	8.070	94,81	7.548	96,25	7.990	97,78	7.072	97,28
Indonesia		1.280.186	98,50	1.343.483	97,86	1.429.795	98,99	1.423.607	98,51

Catatan

/Note:

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

PERSENTASE RUANG KELAS MILIK BAIK TERHADAP RUANG KELAS MILIK MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI
PERCENTAGE OF GOOD OWNED CLASSROOMS TO TOTAL OWNED CLASSROOMS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Negeri / Public			Swasta / Private			Jumlah / Total		
		RKMilk Owned Cls	Baik Good Cond.	%	RKMilk Owned Cls	Baik Good Cond.	%	RKMilk Owned Cls	Baik Good Cond.	%
1	DKI Jakarta	2.554	1.515	59,32	2.892	1.817	62,83	5.446	3.332	61,18
2	Jawa Barat	10.660	5.230	49,06	6.683	3.155	47,21	17.343	8.385	48,35
3	Banten	2.931	1.483	50,60	2.288	1.155	50,48	5.219	2.638	50,55
4	Jawa Tengah	9.012	5.428	60,23	3.878	1.840	47,45	12.890	7.268	56,38
5	DI Yogyakarta	1.306	677	51,84	748	380	50,80	2.054	1.057	51,46
6	Jawa Timur	9.527	5.117	53,71	6.527	2.732	41,86	16.054	7.849	48,89
7	Aceh	4.936	1.737	35,19	473	168	35,52	5.409	1.905	35,22
8	Sumatera Utara	6.206	2.799	45,10	4.236	2.266	53,49	10.442	5.065	48,51
9	Sumatera Barat	4.071	2.071	50,87	608	364	59,87	4.679	2.435	52,04
10	Riau	3.785	1.800	47,56	925	549	59,35	4.710	2.349	49,87
11	Kepulauan Riau	977	492	50,36	247	168	68,02	1.224	660	53,92
12	Jambi	2.031	651	32,05	330	140	42,42	2.361	791	33,50
13	Sumatera Selatan	4.228	2.051	48,51	1.843	840	45,58	6.071	2.891	47,62
14	Bangka Belitung	628	391	62,26	162	93	57,41	790	484	61,27
15	Bengkulu	1.430	498	34,83	166	47	28,31	1.596	545	34,15
16	Lampung	3.314	1.386	41,82	1.380	522	37,83	4.694	1.908	40,65
17	Kalimantan Barat	2.418	1.186	49,05	998	450	45,09	3.416	1.636	47,89
18	Kalimantan Tengah	1.704	760	44,60	271	110	40,59	1.975	870	44,05
19	Kalimantan Selatan	1.783	934	52,38	299	195	65,22	2.082	1.129	54,23
20	Kalimantan Timur	1.725	963	55,83	394	181	45,94	2.119	1.144	53,99
21	Kalimantan Utara	363	157	43,25	100	37	37,00	463	194	41,90
22	Sulawesi Utara	1.440	635	44,10	619	284	45,88	2.059	919	44,63
23	Gorontalo	809	378	46,72	54	25	46,30	863	403	46,70
24	Sulawesi Tengah	1.852	780	42,12	236	113	47,88	2.088	893	42,77
25	Sulawesi Selatan	5.733	2.761	48,16	1.323	582	43,99	7.056	3.343	47,38
26	Sulawesi Barat	761	376	49,41	61	15	24,59	822	391	47,57
27	Sulawesi Tenggara	2.666	1.248	46,81	228	72	31,58	2.894	1.320	45,61
28	Maluku	1.725	594	34,43	510	84	16,47	2.235	678	30,34
29	Maluku Utara	1.047	363	34,67	213	69	32,39	1.260	432	34,29
30	Bali	1.770	978	55,25	657	475	72,30	2.427	1.453	59,87
31	Nusa Tenggara Barat	2.495	968	38,80	662	172	25,98	3.157	1.140	36,11
32	Nusa Tenggara Timur	3.143	1.109	35,28	1.863	495	26,57	5.006	1.604	32,04
33	Papua	1.255	414	32,99	588	169	28,74	1.843	583	31,63
34	Papua Barat	601	224	37,27	297	103	34,68	898	327	36,41
Indonesia		100.886	48.154	47,73	42.759	19.867	46,46	143.645	68.021	47,35

PERSENTASE RUANG LABORATORIUM TERHADAP JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

PERCENTAGE OF LABORATORIES TO SCHOOLS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE

SMA/GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Negeri / Public			Swasta / Private			Jumlah / Total			
1	DKI Jakarta	118	505	71,33	349	832	39,73	467	1.337	47,72
2	Jawa Barat	467	1.497	53,43	974	1.349	23,08	1.441	2.846	32,92
3	Banten	144	406	46,99	353	421	19,88	497	827	27,73
4	Jawa Tengah	364	1.799	82,37	483	1.251	43,17	847	3.050	60,02
5	DI Yogyakarta	69	331	79,95	91	247	45,24	160	578	60,21
6	Jawa Timur	420	1.623	64,40	1.021	1.434	23,41	1.441	3.057	35,36
7	Aceh	379	1.022	44,94	108	312	48,15	487	1.334	45,65
8	Sumatera Utara	400	965	40,21	620	1.013	27,23	1.020	1.978	32,32
9	Sumatera Barat	214	546	42,52	87	181	34,67	301	727	40,25
10	Riau	278	562	33,69	135	258	31,85	413	820	33,09
11	Kepulauan Riau	79	179	37,76	35	91	43,33	114	270	39,47
12	Jambi	144	307	35,53	66	106	26,77	210	413	32,78
13	Sumatera Selatan	311	702	37,62	259	375	24,13	570	1.077	31,49
14	Bangka Belitung	42	171	67,86	23	68	49,28	65	239	61,28
15	Bengkulu	99	264	44,44	30	81	45,00	129	345	44,57
16	Lampung	216	579	44,68	246	318	21,54	462	897	32,36
17	Kalimantan Barat	228	465	33,99	150	198	22,00	378	663	29,23
18	Kalimantan Tengah	170	307	30,10	60	121	33,61	230	428	31,01
19	Kalimantan Selatan	133	347	43,48	50	116	38,67	183	463	42,17
20	Kalimantan Timur	135	357	44,07	75	138	30,67	210	495	39,29
21	Kalimantan Utara	39	64	27,35	16	29	30,21	55	93	28,18
22	Sulawesi Utara	108	268	41,36	101	128	21,12	209	396	31,58
23	Gorontalo	50	138	46,00	7	39	92,86	57	177	51,75
24	Sulawesi Tengah	148	285	32,09	41	94	38,21	189	379	33,42
25	Sulawesi Selatan	321	816	42,37	231	375	27,06	552	1.191	35,96
26	Sulawesi Barat	63	139	36,77	13	34	43,59	76	173	37,94
27	Sulawesi Tenggara	215	418	32,40	55	119	36,06	270	537	33,15
28	Maluku	176	294	27,84	74	125	28,15	250	419	27,93
29	Maluku Utara	115	183	26,52	59	70	19,77	174	253	24,23
30	Bali	78	340	72,65	79	165	34,81	157	505	53,61
31	Nusa Tenggara Barat	150	375	41,67	136	149	18,26	286	524	30,54
32	Nusa Tenggara Timur	298	346	19,35	174	229	21,93	472	575	20,30
33	Papua	119	202	28,29	87	146	27,97	206	348	28,16
34	Papua Barat	65	102	26,15	46	70	25,36	111	172	25,83
	Indonesia	6.355	16.904	44,33	6.334	10.682	28,11	12.689	27.586	36,23

Catatan / Note:

Jumlah laboratorium terdiri Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa, Komputer dan Multimedia

Number of laboratories consist of Biology, Chemistry, Physics, Language, Computer and Multi Media

PERKEMBANGAN PERSENTASE PERPUSTAKAAN TERHADAP JUMLAH SEKOLAH TIAP PROVINSI

TREND OF PERCENTAGE OF LIBRARIES TO SCHOOLS BY PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015

No.	Provinsi Province	2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016	
		Jml./No. Of	%	Jml./No. Of	%	Jml./No. Of	%	Jml./No. Of	%
1	DKI Jakarta	528	112,58	397	84,47	364	77,45	376	80,51
2	Jawa Barat	970	73,48	918	64,88	1.034	73,07	996	69,12
3	Banten	462	100,22	437	89,55	347	71,11	347	69,82
4	Jawa Tengah	857	100,71	811	94,85	749	87,60	748	88,31
5	DI Yogyakarta	164	100,61	155	95,68	155	95,68	156	97,50
6	Jawa Timur	1.306	100,69	1.236	86,68	1.071	75,11	1.016	70,51
7	Aceh	363	78,91	344	71,52	388	80,67	386	79,26
8	Sumatera Utara	719	72,85	680	67,53	765	75,97	763	74,80
9	Sumatera Barat	283	97,92	268	90,54	252	85,14	252	83,72
10	Riau	385	98,47	364	91,00	287	71,75	283	68,52
11	Kepulauan Riau	102	100,99	97	88,99	84	77,06	88	77,19
12	Jambi	183	87,14	173	82,78	160	76,56	166	79,05
13	Sumatera Selatan	554	100,00	524	91,93	469	82,28	465	81,58
14	Bangka Belitung	65	100,00	62	93,94	60	90,91	60	92,31
15	Bengkulu	127	99,22	120	93,02	118	91,47	117	90,70
16	Lampung	364	81,43	344	75,44	350	76,75	335	72,51
17	Kalimantan Barat	264	72,33	250	68,31	274	74,86	276	73,02
18	Kalimantan Tengah	72	33,33	68	30,22	175	77,78	173	75,22
19	Kalimantan Selatan	187	102,75	177	95,68	148	80,00	149	81,42
20	Kalimantan Timur	259	99,23	195	94,20	152	73,43	150	71,43
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	*)	39	72	41	74,55
22	Sulawesi Utara	185	89,81	175	84,13	159	76,44	157	75,12
23	Gorontalo	52	101,96	49	92,45	45	84,91	45	78,95
24	Sulawesi Tengah	154	83,24	146	78,07	130	69,52	133	70,37
25	Sulawesi Selatan	372	69,02	352	64,00	446	81,09	432	78,26
26	Sulawesi Barat	67	91,78	63	88,73	53	74,65	54	71,05
27	Sulawesi Tenggara	196	76,86	185	69,81	203	76,60	196	72,59
28	Maluku	185	76,76	175	71,43	151	61,63	149	59,60
29	Maluku Utara	140	85,37	132	78,11	124	73,37	115	66,09
30	Bali	167	100,60	158	96,34	141	85,98	138	87,90
31	Nusa Tenggara Barat	279	100,00	264	90,10	220	75,09	208	72,73
32	Nusa Tenggara Timur	304	72,55	288	66,21	295	67,82	286	60,59
33	Papua	201	97,57	190	98,96	127	66,15	128	62,14
34	Papua Barat	99	93,40	94	89,52	67	63,81	64	57,66
Indonesia		10.615	87,68	9.891	79,05	9.602	76,74	9.448	74,46

Catatan / Note :

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim

RASIO PENDIDIKAN TIAP PROVINSI
EDUCATIONAL RATIOS BY PROVINCE
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Siswa/ Sekolah Pupils/ Schools	Siswa/ Rombel Pupils/ Classes	Siswa/ Guru*) Pupils/ Teachers*)	Rombel/ Sekolah Classes/ Schools	Rombel/ RK Milik Owned Cls.	Rombel/ Guru*) Classes/ Teachers*)	Guru*)/ Sekolah Teachers*)/ Schools
1	DKI Jakarta	332	29	15	11,55	0,99	0,51	23
2	Jawa Barat	401	32	18	12,53	1,04	0,55	23
3	Banten	334	31	18	10,62	1,01	0,57	19
4	Jawa Tengah	438	30	15	14,68	0,96	0,49	30
5	DI Yogyakarta	323	26	12	12,49	0,97	0,46	27
6	Jawa Timur	340	30	15	11,53	1,03	0,51	23
7	Aceh	276	26	10	10,75	0,97	0,38	28
8	Sumatera Utara	330	32	16	10,19	1,00	0,50	20
9	Sumatera Barat	453	29	12	15,83	1,02	0,43	37
10	Riau	331	29	14	11,38	1,00	0,47	24
11	Kepulauan Riau	304	28	15	10,71	1,00	0,53	20
12	Jambi	318	28	13	11,33	1,01	0,46	24
13	Sumatera Selatan	331	31	14	10,70	1,00	0,46	23
14	Bangka Belitung	339	29	16	11,89	0,98	0,57	21
15	Bengkulu	349	28	13	12,49	1,01	0,46	27
16	Lampung	297	29	14	10,13	1,00	0,47	21
17	Kalimantan Barat	280	30	17	9,22	1,02	0,55	17
18	Kalimantan Tengah	213	25	12	8,53	0,99	0,47	18
19	Kalimantan Selatan	313	28	14	11,24	0,99	0,49	23
20	Kalimantan Timur	297	28	15	10,56	1,05	0,53	20
21	Kalimantan Utara	261	27	13	9,65	1,15	0,50	19
22	Sulawesi Utara	244	24	14	10,16	1,03	0,58	18
23	Gorontalo	434	28	17	15,26	1,01	0,58	26
24	Sulawesi Tengah	337	28	15	11,81	1,07	0,54	22
25	Sulawesi Selatan	398	30	16	13,24	1,04	0,52	26
26	Sulawesi Barat	321	29	15	11,07	1,02	0,51	22
27	Sulawesi Tenggara	306	26	13	11,59	1,08	0,49	23
28	Maluku	254	25	12	10,03	1,12	0,48	21
29	Maluku Utara	184	23	12	7,86	1,09	0,50	16
30	Bali	520	32	16	16,49	1,07	0,49	33
31	Nusa Tenggara Barat	347	30	12	11,50	1,04	0,41	28
32	Nusa Tenggara Timur	331	27	13	12,39	1,17	0,50	25
33	Papua	252	27	14	9,38	1,05	0,51	18
34	Papua Barat	203	23	11	8,68	1,07	0,49	18
	Indonesia	340	29	15	11,58	1,02	0,50	23

Catatan/Note:

*) Termasuk kepala sekolah / Including headmasters

Rombel = Rombongan Belajar

**RASIO SISWA PER SEKOLAH DAN SISWA PER KELAS MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP
PROVINSI**
**RATIOS OF PUPILS TO SCHOOLS AND PUPILS TO CLASSES BY STATUS OF SCHOOL AND
PROVINCE**
SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Siswa per Sekolah / Pupils to Schools			Siswa per Rombel / Pupils to Classes		
		Negeri Public	Swasta Private	Rata-rata Average	Negeri Public	Swasta Private	Rata-rata Average
1	DKI Jakarta	738	195	332	35	24	29
2	Jawa Barat	840	190	401	35	27	32
3	Banten	725	174	334	36	26	31
4	Jawa Tengah	765	192	438	32	25	30
5	DI Yogyakarta	517	175	323	28	22	26
6	Jawa Timur	719	185	340	32	27	30
7	Aceh	322	115	276	26	22	26
8	Sumatera Utara	531	201	330	34	30	32
9	Sumatera Barat	567	172	453	29	24	29
10	Riau	415	156	331	30	24	29
11	Kepulauan Riau	376	141	304	30	21	28
12	Jambi	407	123	318	29	24	28
13	Sumatera Selatan	451	187	331	32	28	31
14	Bangka Belitung	435	165	339	29	26	29
15	Bengkulu	420	112	349	29	22	28
16	Lampung	467	148	297	31	26	29
17	Kalimantan Barat	333	201	280	31	29	30
18	Kalimantan Tengah	257	88	213	26	18	25
19	Kalimantan Selatan	377	144	313	28	24	28
20	Kalimantan Timur	394	122	297	30	22	28
21	Kalimantan Utara	307	148	261	28	23	27
22	Sulawesi Utara	345	135	244	26	20	24
23	Gorontalo	472	167	434	29	22	28
24	Sulawesi Tengah	393	131	337	29	22	28
25	Sulawesi Selatan	580	145	398	31	24	30
26	Sulawesi Barat	364	113	321	29	24	29
27	Sulawesi Tenggara	353	122	306	27	23	26
28	Maluku	288	172	254	26	22	25
29	Maluku Utara	230	95	184	25	19	23
30	Bali	760	282	520	31	32	32
31	Nusa Tenggara Barat	543	132	347	31	26	30
32	Nusa Tenggara Timur	350	297	331	27	27	27
33	Papua	309	174	252	29	23	27
34	Papua Barat	247	139	203	25	21	23
	Indonesia	500	180	340	31	26	29

RASIO SISWA PER SEKOLAH MENURUT TINGKAT TIAP PROVINSI

RATIO OF PUPILS TO SCHOOLS BY GRADE AND PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi Province	Tingkat / Grade			Jumlah Total
		X	XI	XII	
1	DKI Jakarta	119	106	108	332
2	Jawa Barat	148	132	121	401
3	Banten	123	112	99	334
4	Jawa Tengah	156	146	136	438
5	DI Yogyakarta	113	106	104	323
6	Jawa Timur	122	114	105	340
7	Aceh	99	94	84	276
8	Sumatera Utara	119	112	100	330
9	Sumatera Barat	162	150	141	453
10	Riau	119	111	101	331
11	Kepulauan Riau	112	101	91	304
12	Jambi	114	109	95	318
13	Sumatera Selatan	118	113	100	331
14	Bangka Belitung	126	112	101	339
15	Bengkulu	125	117	106	349
16	Lampung	108	98	90	297
17	Kalimantan Barat	103	94	83	280
18	Kalimantan Tengah	78	73	63	213
19	Kalimantan Selatan	117	103	93	313
20	Kalimantan Timur	108	101	89	297
21	Kalimantan Utara	87	91	82	261
22	Sulawesi Utara	83	84	77	244
23	Gorontalo	163	143	128	434
24	Sulawesi Tengah	122	115	100	337
25	Sulawesi Selatan	141	133	124	398
26	Sulawesi Barat	111	112	98	321
27	Sulawesi Tenggara	107	104	95	306
28	Maluku	87	87	80	254
29	Maluku Utara	62	65	58	184
30	Bali	185	171	164	520
31	Nusa Tenggara Barat	121	122	104	347
32	Nusa Tenggara Timur	115	112	103	331
33	Papua	83	86	82	252
34	Papua Barat	67	71	65	203
Indonesia		122	114	104	340

RASIO SISWA PER ROMBONGAN BELAJAR MENURUT TINGKAT TIAP PROVINSI

RATIO OF PUPILS TO CLASSES BY GRADE AND PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2015/2016

No.	Provinsi <i>Province</i>	Tingkat / Grade			Rata-rata <i>Average</i>
		X	XI	XII	
1	DKI Jakarta	30	28	28	29
2	Jawa Barat	33	32	31	32
3	Banten	33	32	30	31
4	Jawa Tengah	31	30	28	30
5	DI Yogyakarta	27	25	25	26
6	Jawa Timur	31	30	28	30
7	Aceh	26	26	24	26
8	Sumatera Utara	33	33	31	32
9	Sumatera Barat	29	29	28	29
10	Riau	30	29	28	29
11	Kepulauan Riau	30	28	27	28
12	Jambi	29	28	27	28
13	Sumatera Selatan	31	32	30	31
14	Bangka Belitung	30	28	27	29
15	Bengkulu	29	28	27	28
16	Lampung	30	30	28	29
17	Kalimantan Barat	32	31	29	30
18	Kalimantan Tengah	27	25	23	25
19	Kalimantan Selatan	30	27	27	28
20	Kalimantan Timur	28	29	27	28
21	Kalimantan Utara	27	27	27	27
22	Sulawesi Utara	25	24	23	24
23	Gorontalo	29	28	28	28
24	Sulawesi Tengah	29	29	27	28
25	Sulawesi Selatan	31	30	29	30
26	Sulawesi Barat	28	30	28	29
27	Sulawesi Tenggara	26	27	26	26
28	Maluku	26	25	24	25
29	Maluku Utara	23	24	23	23
30	Bali	32	32	31	32
31	Nusa Tenggara Barat	31	31	29	30
32	Nusa Tenggara Timur	27	27	26	27
33	Papua	27	27	27	27
34	Papua Barat	23	24	23	23
Indonesia		30	29	28	29

PERKEMBANGAN RASIO SISWA PER SEKOLAH DAN SISWA PER ROMBONGAN BELAJAR TIAP PROVINSI

TREND OF RATIOS OF PUPILS TO SCHOOLS AND PUPILS TO CLASSES BY PROVINCE

SMA / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)

TAHUN / YEAR : 2011/2012--2015/2016

No.	Provinsi Province	Siswa per Sekolah / Pupils to Schools					Siswa per Rombongan Belajar / Pupils to Classes				
		2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1	DKI Jakarta	393	402	388	327	332	50	37	28	20	29
2	Jawa Barat	420	430	412	390	401	42	32	26	21	32
3	Banten	333	332	330	319	334	41	34	30	21	31
4	Jawa Tengah	473	474	326	426	438	37	32	23	20	30
5	DI Yogyakarta	325	326	326	315	323	31	32	24	17	26
6	Jawa Timur	395	382	371	338	340	38	33	33	20	30
7	Aceh	365	343	337	284	276	35	31	27	18	26
8	Sumatera Utara	359	351	368	330	330	40	33	34	22	32
9	Sumatera Barat	483	458	465	461	453	35	29	27	20	29
10	Riau	316	302	327	337	331	35	30	28	20	29
11	Kepulauan Riau	264	333	343	309	304	28	36	30	19	28
12	Jambi	315	337	337	328	318	35	32	27	19	28
13	Sumatera Selatan	353	361	426	335	331	36	33	30	21	31
14	Bangka Belitung	321	325	330	319	339	32	32	30	18	29
15	Bengkulu	371	359	393	344	349	36	31	27	20	28
16	Lampung	298	275	278	296	297	34	32	26	20	29
17	Kalimantan Barat	264	260	281	282	280	33	35	28	21	30
18	Kalimantan Tengah	248	224	210	212	213	30	30	28	17	25
19	Kalimantan Selatan	290	300	314	294	313	32	32	29	18	28
20	Kalimantan Timur	271	282	274	291	297	32	38	33	19	28
21	Kalimantan Utara	*)	*)	*)	257	261	*)	*)	*)	19	27
22	Sulawesi Utara	261	250	231	244	244	29	34	29	16	24
23	Gorontalo	413	406	350	446	434	28	30	23	20	28
24	Sulawesi Tengah	344	312	332	327	337	33	35	30	19	28
25	Sulawesi Selatan	363	351	366	389	398	32	35	32	20	30
26	Sulawesi Barat	342	314	318	342	321	35	31	26	19	29
27	Sulawesi Tenggara	309	313	306	304	306	30	39	31	18	26
28	Maluku	296	259	267	259	254	31	38	35	17	25
29	Maluku Utara	197	193	188	200	184	29	28	27	17	23
30	Bali	484	486	511	483	520	40	37	36	20	32
31	Nusa Tenggara Barat	377	360	364	343	347	36	31	30	21	30
32	Nusa Tenggara Timur	372	294	324	357	331	32	26	29	18	27
33	Papua	257	227	248	264	252	34	27	23	19	27
34	Papua Barat	228	225	225	217	203	33	32	29	16	23
Indonesia		357	363	353	338	340	35	37	32	20	29

Catatan / Note :

*) Masih tergabung dengan provinsi Kaltim / Including in Kaltim



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN